Dr. Najahan Musyafak, M.A
Lulu Choirun Nisa, M.Pd

Lawwana

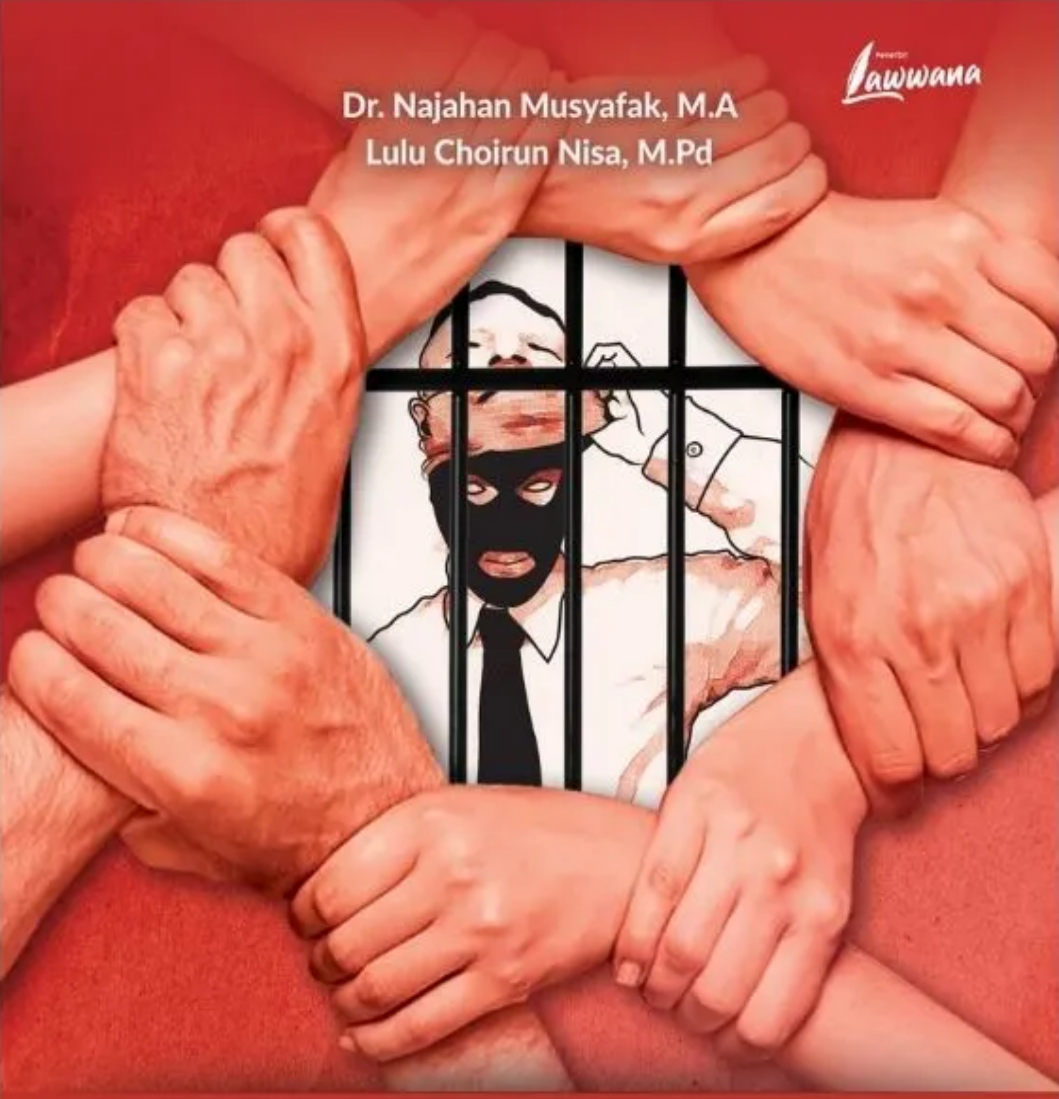

Resiliensi Masyarakat Melawan Radikalisme

Aksi Damai dalam Konflik Agama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

WALISONGO

SEMARANG – JAWA TENGAH

Resiliensi Masyarakat Melawan Radikalisme

Aksi Damai dalam Konflik Agama

Dr. Najahan Musyafak, M.A
Lulu Choirun Nisa, M.Pd

Penerbit Lawwana

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No.28 Th. 2014, Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) hufuf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Resiliensi Masyarakat Melawan Radikalisme

Aksi Damai dalam Konflik Agama

Resiliensi Masyarakat Melawan Radikalisme;
Aksi Damai dalam Konflik Agama
©Copyright Lawwana

Cetakan pertama, Maret 2020
hlm:viii+122 14 cm x 21 cm

ISBN : 978-623-92905-4-2

Penulis : Dr. Najahan Musyafak, M.A
Lulu Choirun Nisa, M.Pd
Editor : Khoirul Anwar, M.Ag
Usfiyatul Marfu'ah, M.S.I
Cover & Layout : Muhammad Danil Aufa

Diterbitkan oleh:
CV Lawwana
Jl. Totem VI B9 NO 22
Kel. Sadeng, Kec. Gunungpati, Semarang Jawa Tengah.
penerbitlawwana@gmail.com | CP: 0812-2765-9485

©Hak pengarang dan penerbit dilindungi Undang-Undang No. 28 Th. 2014
Dilarang memproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulisdaripenerbit.

Pengantar Penulis

Radikalisme agama merupakan salah satu persoalan yang tak kunjung selesai di negeri ini. Pasalnya, selain disebabkan oleh pemahaman keagamaan yang dangkal, eksklusif, tekstualis dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi esensi semua ajaran agama, radikalisme agama kerap dimanfaatkan oleh para pihak demi mencapai kepentingan ekonomi, politik dan ideologi.

Ketika konflik yang disebabkan oleh perilaku radikal terjadi, semua orang baru menyadari betapa mahalnya kerukunan dan perdamaian. Berbagai upaya dilakukan demi memadamkan bara api konflik yang terus menyala dan dinyalakan oleh beberapa orang yang tidak bertanggungjawab. Karenanya, benar kata pepatah: "lebih baik mencegah daripada mengobati". Dalam konteks ini, menjaga kerukunan dan perdamaian dalam keberagaman sejak dini lebih baik daripada merajut perdamaian di saat konflik sudah melanda.

Buku yang ada di tangan pembaca bagian dari hasil penelitian penulis terhadap berbagai upaya merajut perdamaian di Solo Raya. Wilayah yang meliputi Surakarta, Sukoharjo, Sragen, Karanganyar dan sekitarnya merupakan

wilayah dengan penduduk yang sangat beragam baik dari sisi etnis, agama, paham keagamaan maupun kelompok-kelompok keislamannya. Di wilayah ini kerap terjadi konflik yang bernuansa agama, bahkan tidak sedikit beberapa nama teroris di Indonesia yang memiliki jaringan dengan wilayah ini. Penelitian dilakukan untuk mengamati bagaimana upaya perdamaian dilakukan oleh para juru damai di kota yang kerap dituduh sebagai "sumbu pendek" ini.

Penulis haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu selama penelitian ini berlangsung. Kepada Dr. H. Anas Aijudin dan Dr. Anis Mintahudin, Pusat Studi Agama dan Perdamaian (PSAP) Solo, Ketua LP2M beserta jajaraanya, Kepada Khoirul Anwar dan Usfiyatul Marfu'ah yang telah berkenan mengedit naskah ini dihaturkan banyak terima kasih. Penerbit Lawwana yang telah menerbitkan naskah yang sudah lama tersimpan di komputer penulis hingga akhirnya kini bisa dinikmati pembaca secara luas disampaikan banyak terima kasih. Semoga Allah membalas semua amal kebaikan, *jazâkumullah ahsanal jazâ`.*

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, kritik dan saran dari semua pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Semarang, 21 Maret 2020

Dr. H. Najahan Musyafak, M.A

Lulu Choirun Nisa, M.Pd

Daftar Isi

Pengantar Penulis v
Daftar Isi vii
Daftar Tabel x
Daftar Gambar ix

PROLOG 1

RADIKALISME, COMMUNITY RESILIENCE, DAN SOCIAL COHESION 27
Radikalisme 29
Penyebab Radikalisme 34
Community Resilience 39
Model Resliensi *Psycho-Social* 43
Kemampuan Dasar Resiliensi 47
Social Cohesion 54

RADIKALISME DI SOLO RAYA 59
Demografi Wilayah Penelitian 61
Radikalisme di Solo Raya 95

PENCEGAHAN RADIKALISME BERBASIS COMMUNITY RESILIENCE DAN SOCIAL COHESION 99
Pencegahan Radikalisme Berbasis *Community Resilience* 101
Kesadaran Pluralitas *(Plurality Consciousness)* 104
Kerjasama Lintas Organisasi 109
Komunikasi Budaya 129
Memperkuat Jaringan Kelembagaan 133
Pencegahan Radikalisme Berbasis *Social Cohesion* 143
Musuh Bersama *(Common Enemy)* 145
Teologi Kemanusiaan 151

EPILOG 159

Daftar Pustaka 163
Lampiran 169
Tentang Penulis 178

Daftar Tabel

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Kota Surakarta 64
Tabel 2 : Ketersediaan lahan di Kota Surakarta 64
Tabel 3 : Jumlah Tempat Beribadah di Kota Surakarta 67
Tabel 4 : Banyaknya Tempat Peribadatan di Kabupaten Sukoharjo 72
Tabel 5 : Banyaknya Pemeluk Agama di Kabupaten Sukoharjo 73
Tabel 6 : Jumlah Pemeluk Agama di Kabupaten Sragen..... 78
Tabel 7 : Jumlah Sarana Peribadatan per Kecamatan..... 81
Tabel 8 : Jumlah Pondok Pesantren Kabupaten Sragen 83
Tabel 9 : Distribusi Pondok Pesantren Per Kecamatan 88
Tabel 10 : Jumlah Penduduk Karanganyar 92
Tabel 11 : Daftar Pemeluk Agama di Kabupaten Karanganyar... 93
Tabel 12 : Jumlah tempat ibadah di kabupaten Karanganyar.... 94

Daftar Gambar

Gambar 1 Resiliensi sebagai sebuah jejaring kemampuan adaptif 52
Gambar 2 Peta Solo Raya 62
Gambar 3 Peta Kota Surakarta 66
Gambar 4 Peta Kabupaten Sukoharjo 70
Gambar 5 Peta Kabupaten Sragen 75
Gambar 6 Peta Kabupaten Karanganyar 91

BAB 1

PROLOG

Latar Belakang

Wacana radikalisme agama di Indonesia berkembang secara masif di masyarakat melalui berbagai macam saluran dan media setelah tumbangnya kekuasaan Orde Baru. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, gagasan, ide, kritik, berserikat dan berkumpul di berbagai kesempatan tanpa mengenal batas ruang dan waktu telah dibuka seiring dengan dijaminnya *freedom of speech* oleh undang undang. Ruang demokrasi yang terbuka telah memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapatnya di ruang publik tanpa dibayang-bayangi perasaan takut, termasuk di dalamnya kelompok radikal yang mengartikulasikan aspirasi politik dan ideologi keagamaan mereka secara agresif, reaktif, dan demonstratif (Idharam, 2011). Kebebasan berpendapat tersebut diikuti oleh muncul dan berkembangnya organisasi dan gerakan transnasional seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ikhwanul Muslimin, Salafi, Syi'ah, dan Jama'ah Tabligh yang pada perkembangannya kelompok tersebut ikut mewarnai dinamika pemikiran keagamaan di

tanah air dengan mengembangkan sayapnya lewat organisasi sosial, ekonomi politik, dan pendidikan sebagai sayap baru garis perjuangan.

Dinamika gerakan keagamaan tersebut bila dilihat dari sejarah dan peta perkembangan Islam di Indonesia dapat dikelompokkan sebagai gerakan yang menawarkan ideologi dengan nuansa yang berbeda dari organisasi mainstream yang telah eksis seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Al Irsyad yang ditandai dengan berdirinya lembaga pesantren, sekolah, yayasan, dan media yang memiliki misi dan tujuan untuk penguatan kepentingan dan ideologisasi. Strategi, ekspansi dan internalisasi dari gerakan baru tersebut dilakukan secara sistematis, massif dan intensif mulai dari tingkat elite, akademik, generasi muda sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah (*grassroot*) sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran dan gesekan sosial di masyarakat. Pola yang dikembangkan oleh gerakan baru ini dalam derajat tertentu terkadang bersifat menyerang, menyudutkan dan mendeskreditkan kelompok *mainstream*.

Respon masyarakat terhadap gerakan yang ditawarkan memang cukup beragam yang secara psikologis dapat dibedakan menjadi tiga macam sikap, yaitu menerima dan mendukung, menolak dan apatis. Perbedaan sikap yang diikuti dengan perbedaan aktualisasi dan implementasi terhadap apa yang diyakini tersebut telah melahirkan tumbuhnya perbedaan gerakan di masyarakat.

Melihat fenomena tersebut, secara umum sikap dan respons dari pemerintah selaku *regulatory body* dan masyarakat selaku kelompok *civil society* yang beragam corak dan jenisnya bahkan cenderung kurang menunjukkan ke arah yang positif. Artinya, pemerintah kurang tanggap dan tegas dalam mengantisipasi konsekuensi logis yang ditimbulkan oleh gerakan baru di masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah juridis formal untuk menunjukkan sikap kehati-hatian terhadap gejala sosial yang berkembang. Pemerintah tidak mau kalau dicap melanggar hak asasi manusia karena membatasi kebebasan berserikat dan berkumpul, bahkan terkesan melindungi.

Di sisi lain, masyarakat yang tidak sependapat dan tidak setuju dengan 'gerakan baru' menunjukkan perilaku yang 'memusuhi' dan mengambil posisi berhadap-hadapan karena secara ideologis akan merasa terancam eksistensinya secara structural dan kultural yang sudah terbangun dan terbentuk dalam waktu sudah lama, Kondisi masyarakat seperti ini secara langsung maupun tidak langsung akan mengancam kohesifitas dan melemahkan aspek persatuan dan kesatuan bangsa yang sudah tercipta berdasarkan platform keanegaraman budaya, bahasa, suku, ras, kelompok, kepentingan bahkan agama. Situasi sosial di masyarakat mulai terkotak-kotakan oleh berbagai kepentingan yang dalam praktiknya munculnya gesekan antar kelompok yang terekspresikan dalam pertarungan gerakan dan wacana di ranah publik, media, gerakan sosial bahkan pada level tindak kekerasan.

Secara sosiologis, munculnya gerakan dengan mengatasnamakan agama sebagai basis perjuangannya telah menimbulkan persoalan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat. Agama telah dijadikan dan menjadi dasar dan dalil pembenaran dalam melakukan tindak kekerasan yang secara ideologis bertolakbelakang dengan spirit Islam sebagai jalan ikhtiar mewujudkan rahmat dan kasih sayang sang Khaliq di muka bumi sebagai perwujudan konsep rahmatan lil alamiin. Konsep yang dibangun adalah meletakkan segala pemikiran, sikap dan tindakan kembali kepada tekstual ayat-ayat suci tanpa melihat konteks psikologis dan sosiologis masyarakat yang berujung pada klaim pembenaran terhadap diri dan kelompoknya. Benih pemahaman tektualis ini telah memicu adanya sikap apriori dan eksklusifisme, dan mengganggap kelompok di luar dirinya menjadi sah untuk dinihilkan sesuai dengan dalil dan pemahaman teks tanpa membuka ruang dialog. Akibat yang paling mengkhawatirkan dan mengancam konsep perdamaian adalah munculnya beberapa tindakan kekerasan dan perilaku radikal yang mengarah kepada aksi teror di tengah kehidupan masyarakat yang damai serta mengklaim bahwa tindakan tersebut sebagai bentuk aktualisasi ajaran Islam dalam bentuk jihad; diantaranya adalah dengan aksi perusakan dan pengeboman fasilitas umum serta bom bunuh diri.

Serangkaian peristiwa kekerasan yang dilatarbelakngi oleh faham radikal dan terorisme telah terjadi di bumi Nusantara

yang secara kuantitatif berkisar 72 peristiwa (lihat lampiran) selama kurun waktu 19 tahun, mulai tahun 2000 – 2019. Latar belakang dan motif yang memicu munculnya peristiwa tersebut sebagian besar dipicu oleh pemahaman keagamaan yang literalis dan kepentingan politik untuk mengganti tatanan Negara dan sosial yang ada dengan ideologi mereka yang dianggap mampu menyelesaikan problematika yang ada. Jalan kekerasan yang ditempuh telah mengakibatkan kerusakan dan kerugian di berbagai sektor kehidupan masyarakat, baik fisik maupun psikis. Secara fisik, peristiwa seperti pengeboman, penembakan dan perusakan terhadap fasilitas publik telah menggangu kegiatan dan tata laksana pemerintahan serta keamanan masyarakat. Sedangkan secara psikis, peristiwa yang terjadi secara terus menerus telah mengancam kehidupan masyarakat karena dihantui oleh perasaan takut, tidak aman, dan terancam oleh keadaan yang berada di luar kemampuan.

Menurut Juergensmeyer (2001), fenomena munculnya gerakan radikalisme yang mengarah kepada terorisme tersebut bukanlah fenomena baru di Negara demokrasi dan sejarah umat manusia. Kekerasan yang dibalut dengan mengatasnamakan agama merupakan salah satu jenis permainan politik yang memanfaatkan respons keagamaan menjadi perang sekuler. Analisis ini didasarkan atas kesamaan dasar lahirnya masalah sosial yang diintroduksi ke dalam perjuangan agama. Juergensmeyer menjelaskan bahwa ada lima (5) skenario yang dilakukan dan telah diterapkan masing-masing negara dalam

menghadapi tindakan kekerasan, yaitu 1) skenario kekuatan (power); 2) ancaman pembalasan dengan kekerasan untuk menakuti aktivis keagamaan; 3) melakukan kompromi dengan para aktivis yang terlibat terorisme; 4) pemisahan agama dari politik dan kembali pada landasan-landasan moral dan metafisika; dan 5) mengharuskan pihak-pihak yang saling bertikai untuk menyerukan adanya saling percaya dan saling menghormati.

Kelima skenario Juergensmeyer tersebut memberikan sebuah pemahaman bahwa aksi kekerasan atas nama agama akan terus berlangsung selama tidak ada upaya dari masyarakat untuk memahaminya secara benar, penyikapan yang kurang tepat dan kurangnya ketegasan sikap pemerintah untuk menangani secara tepat. Oleh karena itu diperlukan pemahaman keagamaan yang kuat dan komprehensif dalam rangka mendorong perlawanan terhadap segala bentuk kekerasan yang mengancam terwujudnya masyarakat yang pluralis dan damai. Disamping pemahaman, masyarakat juga perlu membangun ketahanan dan kohesivitas sosial untuk membentengi diri dari terpaan peristiwa kekerasan yang disebabkan oleh pemahaman radikal agar memiliki imunitas sosial yang kuat.

Dampak langsung dan tidak langsung yang ditimbukan akibat peristiwa kekerasan yang berawal dari faham radikal dan cenderung mengarah kepada terorisme meliputi aspek ekonomi, sosial, agama, budaya, serta keamanan dan

keselamatan individu, masyarakat bahkan negara. Secara sosiologis, aksi teror yang dilakukan oleh sekelompok orang telah mengganggu dan merusak struktur sosial kemasyarakatan, renggangnya hubungan antar individu dan masyarakat, serta terhambatnya aktivitas sosial ekonomi yang merupakan penggerak roda kehidupan. Sedangkan secara psikologis, peristiwa kekerasan yang terjadi secara mendadak mengakibatkan masyarakat mengalami shock, takut dan pada suatu waktu tertentu bisa mengalami trauma. Terlebih bagi mereka yang secara langsung mengalami peristiwa tersebut.

Respons masyarakat terhadap beberapa peristiwa dan aksi kekerasan cukup beragam. Namun sebagian besar menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap tindakan tersebut dengan mengecam keras tindakan teroris karena Islam tidak pernah membenarkan tindakan kekerasan apa pun baik itu dilakukan oleh individu, kelompok atau pemerintah, serta tidak membenarkan aksi kekerasan dan terjadinya pertumpahan darah pada orang-orang yang tidak bersalah, wanita atau anak-anak yang mengatasnamakan Tuhan. Logika tersebut didasarkan pada pemikiran tentang misi suci agama Islam yang diturunkan dalam rangka menciptakan perdamaian dan kerukunan antar umat serta sebagai jalan untuk mewujudkan nilai-nilai *rahmatan lil 'alamin*. Sebuah konsep yang mulia dan indah tidak dapat diwujudkan bila mengandalkan jalan kekerasan.

Penanganan radikalisme agama yang berujung pada tindakan kekerasan dan teror di Indonesia telah ditangani oleh Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai *leading sector* kelembangaan. Kebijakan yang diambil oleh BNPT dalam menangani tindakan terorisme menggunakan dua pendekatan, yaitu *hard approach* dan *soft approach* (Idris, 2015; Musyafak 2017), Pendekatan tegas berupa penegakan hukum dilakukan oleh BNPT bekerjasama dengan Densus 88 Anti Teror untuk menindak perilaku yang menggunakan senjata dan secara langsung maupun tidak langsung mengancam keamanan dan keselamatan negara dan masyarakat. Sementara itu, pendekatan lunak berupa pencegahan yang bersifat edukasi, sosialisasi dan deradikalisasi dilakukan pemerintah dengan melibatkan masyarakat yang terdiri dari akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, guru, ustadz, organisasi keagamaan untuk aktif melakukan langkah-langkah preventif melalui berbagai kegiatan.

Salah satu tujuan pendekatan lunak (*soft approach*) adalah untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat tentang pengertian radikalisme, ciri-ciri, akibat yang ditimbulkan serta cara pencegahan yang bisa dilakukan pada level individu, keluarga dan masyarakat. Selain itu, masyarakat diharapkan memiliki tingkat imunitas dan ketahanan (*resiliency*) serta keterpaduan (*cohesiveness*) dalam menghadapi berbagai peristiwa teror yang menimpa mereka

akibat gerakan radikal yang sering terjadi di lingkungan dan daerahnya.

Untuk mewujudkan terbentuknya resiliensi dan keterpaduan sosial tersebut perlu dilakukan upaya sistematis, terprogram dan terukur sehingga bisa diperoleh sebuah potret riil potensi masyarakat dalam menangkal radikalisme. Kajian terhadap potensi masyarakat tersebut menjadi penting dalam rangka memperoleh gambaran obyektif mengenai kekuatan lokal yang sudah dimiliki oleh masyarakat dan dapat dipergunakan sebagai 'senjata' untuk mencegah dan menangkal gerakan radikal yang sering terjadi di daerah, seperti di wilayah Solo Raya.

Sejak reformasi bergulir, wilayah Solo Raya secara bertubi-tubi menjadi dan dijadikan 'panggung pertunjukan' bagi gerakan radikal yang menggunakan aksinya melalui kekerasan dan terror. Wujud dari gerakan tersebut berupa aksi unjuk rasa yang diikuti dengan perusakan fasilitas umum, konflik antar kelompok yang dimanifestasikan dengan penggerebekan, pengeroyokan dan penyerangan, bom bunuh diri, penyerangan bersenjata, perampokan serta*sweeping* terhadap karaoke dan bar. Aksi tersebut secara langsung maupun tidak langsung telah memengaruhi kondisi psikologis dan sosial masyarakat dalam berpikir, bersikap dan bertindak seperti perasaan takut, trauma, apatis, dan tersudutkan oleh stigma negatif yang berkembang di media.

Sudut penting dari kajian ini adalah untuk mengetahui secara obyektif tingkat ketahanan masyarakat Solo Raya dalam menghadapi berbagai peristiwa tersebut dan bagaimana sikap yang diambil untuk bisa melakukan pencegahan terjadinya kembali berbagai kejadian yang merugikan sebagian besar warga masyarakat.

***

Signifikansi dan Telaah Pustaka

Hasil penelitian ini secara teoritik diharapkan mampu memberikan perspektif baru dalam upaya pencegahan radikalisme agama dan terorisme berbasis komunitas dengan alur pikir *bottom-up*, mengingat penyelesaian radikalisme yang selama ini diimplementasikan lebih mengarah dan mengedepankan pendekatan *hard approach*, *militaristic approach*, dan kurang mengaitkan radikalisme dengan persoalan dan kondisi sosial, ekonomi, psikologi dan budaya. Kajian ini memperluas cakupan dan rung lingkup teori resiliensi kepada pembahasan terhadap ketahanan terhadap peristiwa yang diakibatkan oleh perilaku teror yang berakar dari ideologi radikal.

Selanjutnya, secara implementatif hasil kajian ini dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak baik pemerintah, lembaga swasta maupun individu yang menaruh perhatian terhadap upaya pencegahan gerakan radikal yang mengarah kepada

tindakan kekerasan dan teror untuk menjadi dan dijadikan "model" atau "format baru" dalam menangkal radikalisme dan terorisme di tengah kemajemukan bangsa.

Kajian mengenai ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana merupakan embrio dari berbagai studi tentang *community resilience* yang dilakukan oleh para ahli. Sebuah studi dilakukan oleh Ellis & Abdi (2017) yang mengeksplorasi strategi untuk memanfaatkan aset masyarakat dalam rangka berkontribusi untuk mencegah ekstremisme keras terutama bagi pemuda, serta model ketahanan masyarakat kaitannya dengan kesiapsiagaan bencana. Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan sosial adalah jantung dari komunitas yang tangguh dan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat harus memanfaatkan dan meningkatkan hubungan sosial yang ada, serta berusaha untuk tidak merusak atau mengurangi peran serta mereka.

Strategi yang ditempuh adalah: *pertama*, eksplorasi peran koneksi sosial di dalam dan di antara komunitas secara maksimal. Secara khusus, dilakukan cara-cara yang mampu memperkuat ikatan sosial sebagai jembatan sosial untuk mengurangi risiko kekerasan, termasuk kekerasan ekstremisme. *Kedua*, peran hubungan sosial antara masyarakat dan lembaga atau badan yang mengatur relasi sosial diaktualisasikan secara konkret. Kajian ini juga membahas tentang bagaimana proses kemitraan antara pemerintah dengan anggota masyarakat digunakan sebagai sistem untuk

intervensi awal dalam menangani kekerasan ekstremisme, serta memperkuat ikatan dan jejaring sosial. Melalui cara cara tersebut anggota masyarakat dapat berkontribusi secara luas untuk membangun ketahanan bersama. Terakhir, studi yang menggunakan pendekatan partisipatif berbasis masyarakat ini bisa menjadi model keterlibatan masyarakat dan kemitraan yang dibangun dapat menjadi peta jalan (*roadmap*) untuk membangun sebuah kemitraan yang benar dengan melibatkan masyarakat sebagai unsur penting pencegahan tindak kekerasan ektrimisme.

Studi tentang resiliensi terhadap serangan teror dilakukan oleh seorang militer dan profesor di Air War College Amerika Michael T, Kindt (2006) dengan mengkaji model persiapan ketahanan yang dilakukan oleh militer, mengeksplorasi upaya nasional untuk mempersiapkan serangan, dan memeriksa inisiatif terkait dengan bidang ketahanan yang belum membuahkan hasil dalam hal kemampuan untuk meningkatkan tingkat ketahanan. Dua strategi ditetapkan dalam rangka untuk membangun resiliensi di kalangan militer, yaitu menetapkan cara yang komprehensif dan efektif untuk menyebarkan informasi mengenai risiko tindakan teroris kepada pemerintah federal, negara bagian, lokal dan orang-orang Amerika. Kedua, memanfaatkan kekuatan setiap individu melalui pendidikan, pelatihan, dan layanan sukarela untuk membuat masyarakat lebih aman, lebih kuat, dan lebih siap untuk menanggapi ancaman terorisme, kejahatan, masalah kesehatan dan

bencana dalam segala bentuk. Kindt menyimpulkan bahwa ketahanan adalah atribut kunci yang harus disiapkan dalam menghadapi krisis dan kesulitan yang datang dalam bentuk serangan, bencana, atau situasi pertempuran, dan untuk melakukan pemulihan kondisi setelah peristiwa. Ketangguhan adalah keterampilan yang dapat ditingkatkan untuk individu dan masyarakat, melalui membangun kepercayaan diri, kemampuan, keterampilan memecahkan masalah, dan keterhubungan sosial.

Studi lain terkait dengan ketahanan pengungsi komunitas Somalia-American di daerah Minneapolis-St. Paul dalam mensikapi eksploitasi yang dilakukan oleh kelompok ekstrim untuk tujuan rekruitmen dilakukan oleh Stevan Weine and Osman Ahmed (2012). Fokus dari penelitian ini adalah mempelajari bagaimana tantangan hidup di komunitas pengungsi, bagaimana para ekstremis yang kejam mencoba mengeksploitasi kondisi mereka untuk tujuan rekrutmen, serta sumber daya dan strategi apa yang dibutuhkan untuk meminimalkan kerentanan mereka. Weine dan Ahmed merekomendasikan perlunya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ketahanan para pengungsi dengan jalan penguatan sumber daya pelindung atau apa yang disebut kapasitas pengurangan peluang. Lebih lanjut, keluarga dan pemuda, masyarakat, serta pemerintah dapat membantu memperkuat sumber daya perlindungan di masing-masing dari tiga tingkat peluang yang muncul, yaitu: 1) waktu yang

tidak dapat dihitung yang dimiliki remaja dan ruang yang tidak bisa teramati; 2) persepsi legitimasi sosial dari ekstremisme kekerasan; dan 3) potensi kontak dengan perekrut atau rekanan teroris.

Sehubungan dengan strategi membangun ketahanan masyarakat terhadap kekerasan ekstremisme, studi ini menyimpulkan perlunya kolaborasi antara masyarakat dan juga pembangunan kapasitas. Intervensi dapat melibatkan pemerintah, masyarakat, dan keluarga yang bekerja secara kolaboratif untuk meningkatkan kapasitas satu sama lain dengan tujuan untuk: 1) memperkuat keluarga secara kolaboratif; 2) mengembangkan dukungan masyarakat untuk keluarga dan pemuda; dan 3) mengadopsi strategi pemerintah untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan.

Kebijakan yang mengarah pada upaya pencegahan perlu dilakukan dengan mengacu kepada hasil studi ini. Intervensi pencegahan pada komunitas Somalia-Amerika di Minneapolis-St, Paul dapat dilakukan dengan cara: 1) membangun sumber daya berbasis web yang mencakup informasi dan pelatihan tentang resiko dan perlindungan untuk digunakan oleh remaja, orang tua, dan penyedia layanan masyarakat; 2) memberi pemuda Somalia dan dewasa sebuah peluang layanan di komunitas mereka dan pekerjaan kemanusiaan dan perdamaian, sehingga mampu menciptakan sebuah alternatif cara bagi pemuda untuk menyalurkan hasrat mereka; dan 3) memberikan dukungan logistik dan pelatihan kepada

para generasi tua dan pemiliki suara-suara kritis yang ada di masyarakat dan di website.

Kajian tentang resiliensi komunitas rawan bencana dilakukan oleh Yusup (2016) dengan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan komunitas di Kawasan Rawan Bencana (KRB) cenderung memilih hidup bersama risiko bencana dan bagaimana mereka mengkonstruksi ruang hidup bersama risiko dalam konteks ekonomi-politik, budaya dan ekologi, serta bahaya yang berubah dari waktu ke waktu. Penelitian Yusup ini menemukan 9 (sembilan) alasan yang mendasari komunitas di KRB memilih hidup bersama risiko bencana,

Alasan *pertama*, masyarakat melihat bahwa letusan dipandang sebagai berkah bukan bencana. Peristiwa alam tidak identik dengan bencana saja, tetapi terkait juga dengan sumberdaya untuk penghidupan. *Kedua*, bagi warga KRB, wilayah di lereng atas Merapi tidak lebih berisiko dibanding tempat lainnya, bencana pun bisa terjadi dimana saja. Oleh karena itu relokasi dianggap bukan solusi yang tepat. *Ketiga*, warga memahami bahwa wataknya Gunung Merapi dan berusaha menyesuaikan dengan irama atau ritme letusannya. *Keempat*, tanah Merapi merupakan sumber penghidupan utama atau bahkan satu-satunya sumber kehidupan bagi warga lereng atas Merapi, atau dengan kata lain masyarakat di Lereng Merapi merupakan '*resource dependency society*'. Oleh karenanya ketika menerima relokasi-pun akses dan

kepemilikan lahan di daerah terdampak menjadi syarat suksesnya program relokasi. *Kelima*, masyarakat memiliki hubungan emosional yang tinggi dengan lingkungannya, sehingga tanah Merapi tidak bisa tergantikan dengan lokasi lainnnya. *Keenam*, letusan dan dampak letusan dihadapi bersama-sama baik dalam komunitas sendiri (*bonding social capital*) maupun dengan komunitas yang lebih besar (*bridging and linking social capital*). Hal ini menunjukkan bahwa peran modal sosial memiliki kekuatan dalam melakukan adaptasi terhadap bencana. *Ketujuh*, warga masih mempercayai bahwa bukit di sekelilingnya bisa menjadi pelindung dari bahaya yang lebih besar. *Kedelapan*, saat bencana terjadi dan menimbulkan kerugian material yang besar termasuk rumah dan aset lainnnya, mereka menerima sebagai sebuah resiko (*acceptable risk*), bahkan ketika ada korban jiwa, warga menerima dengan ikhlas, sehingga aspek traumatik cepat berlalu. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki spirit budaya dalam resiliensi terhadap bencana. *Kesembilan*, mereka melihat bahwa letusan membawa perubahan yang positif, termasuk transformasi sosial dan ekonomi dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Selanjutnya, terkait dengan kajian kohesivitas sosial, Mc Donald (2015) menganalisis tiga kriteria kohesi sosial yang terdiri dari perlakuan terhadap kelompok luar, dukungan untuk pemerintah, dan partisipasi dalam lingkungan pluralis. Mc Donald berpendapat bahwa kasus-kasus yang ia pelajari

menunjukkan bahwa melegitimasi aksi radikal tanpa diikuti tindak kekerasan memiliki dampak yang signifikan terhadap kohesi sosial. Dalam kasus Masjid Brixton dan Pusat Kebudayaan Islam di London di mana jemaat Salafi telah bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk mencegah ekstremis brutal dengan merekrut pemuda mereka merupakan isu menarik untuk dilihat. Kasus ini menawarkan contoh unik dari komunitas radikal yang mungkin sebenarnya memiliki dampak positif pada kohesi sosial dan bahkan kelompok pemudanya dibantu untuk berintegrasi ke dalam masyarakat Inggris.

Selain itu, McDonald juga melihat kasus Hizbut Tahrir Indonesia, sebuah cabang organisasi yang terkenal di dunia Internasional yang bekerja untuk membangun dukungan terhadap sistem khalifah dari tingkat akar rumput. Kasus ini menggambarkan adanya ketegangan antara idealisme dan pragmatisme untuk aktivis agama radikal. Sementara para para aktivis kelompok tersebut mendukung pada sebuah keyakinan yang bisa memecah belah kelompok tertentu. Dalam rangka untuk merelisasikan kepentingan politik dan sosial mereka, kelompok ini sering membuat kompromi terhadap nilai-nilai pragmatisme. Selain itu Donald juga memeriksa kasus komunitas Salafi di Mesir, dengan fokus khusus pada Salafi Dawa dan partai politik al-Nour. Kasus terakhir ini akan menggarisbawahi adanya keragaman dan perjuangan internal di dalam populasi radikal tanpa kekerasan dan dengan demikian menantang beberapa asumsi utama yang dibuat oleh

para pendukung argumen kohesi sosial.

Studi lain dilakukan oleh Zhao (2010) yang mengkaji tentang radikalisme Islam di Uighur dan relevansinya dengan kohesivitas sosial di sana. Hasil riset menunjukkan bahwa munculnya radikalisme merupakan dampak dari menurunnya tingkat kohesi sosial yang terjadi di komunitas Uighur. Kohesi sosial yang melemah disebabkan oleh hilangnya fondasi ekonomi pada masyarakat Uighur sebagai dimensi paling dasar dari kohesi sosial. Ketika hubungan ekonomi antar individu menjadi kompetitif, hubungan sosial antara yang diuntungkan secara ekonomi dan yang dirusak berubah menjadi kurang harmonis dan tegang. Kesenjangan ekonomi mengakibatkan peningkatan tingkat isolasi psikologis dan penurunan tingkat identifikasi sosial kaum Uighur dalam masyarakat yang didominasi oleh marga Han.

Secara kolektif, isolasi ekonomi, marginalisasi sosial, serta persepsi kesenjangan sosial dan ketidakadilan telah menyebabkan menurunnya kohesi sosial. Konsekuensi utama dari hal ini adalah meningkatnya kehausan akan Islam ortodoks dan konservatif di kalangan orang Uighur. Mereka merasa sangat tidak puas dan sebagian besar terpinggirkan di masyarakat, akibatnya mereka mencoba untuk beralih ke agama untuk mencari pertolongan, penghiburan, dan harapan.

Tingkat kohesi sosial yang rendah tidak hanya berkontribusi pada pemberontakan masyarakat Uighur, tetapi juga telah merusak toleransi dan pengekangan diri marga

Han, serta melemahkan kapasitas pemerintah untuk menjual dan menerapkan kebijakan rekonsiliasi antara Uighur dan Han. Program liberalisasi ekonomi dan demokratisasi politik di negara-negara dan kawasan yang dilanda radikalisme dijalankan dengan penuh kehati-hatian.

***

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap dan menemukan pola pencegahahan radikalisme agama dan terorisme berbasis pada *community resilience* dan *social cohesion*.

***

Metode Penelitian

Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan interaksionisme simbolik. Pendekatan ini dipilih karena penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang sebuah peristiwa dan menyediakan penjelasan yang tersirat mengenai struktur, tatanan dan pola yang luas dalam suatu kelompok (Denzin dan Lincoln, 1994). Penelitian kualitatif juga digunakan untuk memahami masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks,

menyajikan pandangan terperinci dari para sumber informasi dalam setting yang alami (Creswell, 2014). Karakteristik tersebut selaras dengan tujuan penelitian ini.

Sementara itu interaksionisme simbolik merupakan salah satu teori yang banyak digunakan dalam penelitian sosiologi dan komunikasi yang mengatakan bahwa tindakan sosial dari seorang individu didorong oleh hasil pemaknaan sosial terhadap lingkungan sekitarnya. Pemaknaan sosial tersebut diperoleh melalui proses interpretasi dan komunikasi terhadap simbol-simbol di sekitarnya (Griffin, 2012). Teori interaksionisme simbolik menganalisis masyarakat berdasarkan makna subjektif yang diciptakan dimana individu sebagai basis perilaku dan tindakan sosialnya. Dalam teori ini individu diasumsikan bertindak lebih pada berdasarkan apa yang diyakininya, bukan berdasar pada apa yang secara objektif benar. Keyakinan individu tersebut merupakan produk konstruksi sosial yang telah diinterpretasikan dalam konteks atau situasi yang spesifik.

Selanjutnya, sebagai penggagas teori ini, Blumer menuliskan tiga prinsip utama teori interaksionisme simbolik. *Pertama*, individu bertindak dan berperilaku berdasarkan makna yang diinterpretasikan dari perilaku atau tindakannya; *kedua*, makna sosial merupakan hasil konstruksi sosial; dan *ketiga*, penciptaan makna sosial dan pemahaman makna sosial merupakan proses interaktif yang terus berlangsung, Makna sosial biasanya sudah eksis sebelum individu berperilaku,

sehingga proses interaksi yang dilakukan dapat menghasilkan sebuah output yang bisa melanggengkannya, mengubahnya perlahan, atau menggantinya secara radikal. Teori ini melihat realitas sebagai konstruksi sosial yang dibentuk melalui proses interaksi yang terus berlangsung.

Informan Penelitian

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi tentang objek penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah orang yang diwawancara langsung yang disebut sebagai narasumber dan mengikuti *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan dalam teknik pengambilan data. Penentukan informan dalam studi ini d menggunakan teknik *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang diteliti. Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010:300).

Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan, atau mungkin dia sebagai penentu kebijakan, tokoh agama, tokoh masyarakat sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2012:54). Peneliti beralasan menggunakan *purposive sampling* yaitu untuk mengumpulkan suatu data yang benar-benar real atau nyata

dengan mewawancarai seorang informan yang dianggap mengetahui atau menguasai suatu keahlian atau pekerjaan tertentu di bidangnya guna mempermudah pengolahan data untuk keperluan penelitian.

Jumlah informan dalam studi ini adalah 56 orang yang tersebar di empat (4) Kabupaten/ Kota yang sudah ditentukan dengan menggunakan teknik sampel bertujuan. Komposisi informan memiliki latar belakang sosial yang beragam terdiri dari perwakilan dari Kesbangpol Linmas, Kepolisian, Kementerian Agama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, akademisi, guru SMA/ SMK/MA, tokoh perempuan, dan penyuluh agama.

Selain pertimbangan latar belakang sosial, pemilihan informan juga berdasarkan pada pertimbangan aspek gender dalam rangka memperoleh perspektif yang seimbang dan komprehensif dalam menilai sebuah peristiwa serta untuk menghindari terjadinya bias gender (Faqih, 2008). Informan yang mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) sebanyak 42 laki-laki dan 14 perempuan.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi kajian di wilayah Solo Raya yang terdiri dari tujuh daerah (satu kota dan enam kabupaten), yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten

Boyololi, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri. Selanjutnya, berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian, intensitas peristiwa yang terjadi dan tingkat aksesbilitas terhadap informan serta waktu penelitian, maka studi ini memilih 4 daerah yaitu Kota Surakarta, Kab, Sukoharjo, Kab, Karanganyar dan Kabupaten Sragen dengan mengacu kepada metode *purposive sampling*.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, wawancara dan diskusi grup yang terfokus atau *Focus Group Discussion* dalam rangka memperoleh data yang dibutuhkan baik yang bersifat primer dan sekunder. Tujuan FGD adalah untuk mengeksplorasi masalah yang spesifik, yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Teknik ini digunakan dengan tujuan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari peneliti terhadap masalah yang diteliti. FGD digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap makna-makna intersubjektif yang sulit diberi makna sendiri oleh peneliti karena dihalangi oleh dorongan subjektivitas peneliti (Creswell, 2014; Sugiyono, 2010).

***

BAB 2

Radikalisme, *Community Resilience* Dan *Social Cohesion*

Radikalisme

Istilah radikalisme telah berkembang secara luas di masyarakat seiring dengan konteks dan perspektif yang dipakai, sehingga pada gilirannya memunculkan banyak pemahaman dan interpretasi yang muncul. Dalam perspektif sosial, radikalisme diterjemahkan sebagai paham yang diyakini oleh individu atau kelompok yang ingin melakukan perubahan secara mendasar terhadap tatanan sosial yang berlaku dengan mengedepankan sikap konfrontasi berupa intimidasi, penekanan dan kekerasan. Selanjutnya, dalam konteks Islam, terminologi radikalisme merupakan paham yang berbasis pada keyakinan ideologis yang fanatik terhadap nilai-nilai yang mereka perjuangkan untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem yang sudah ada dengan Islam secara formalistik dan terkadang menggunakan aksi kekerasan untuk mewujudkan tujuannya.

Penggunaan kata radikalisme dikaitkan juga dengan peristiwa teror yang dilakukan oleh individu dan kelompok

dengan menempatkan aspek radikal sebagai penyebab perilaku teror. Dalam dua dasa warsa terakhir, relasi antara radikalisme dan terorisme melekat secara stigmatik kepada umat Islam yang ditandai dengan adanya berbagai kejadian di tanah air yang dilakukan oleh orang Islam. Hubungan antara Islam radikal dan terorisme terletak pada pemikirian atau paham yang menginginkan perubahan dengan menggunakan kekerasan dan penggunaan simbol-simbol Islam dalam setiap gerakan melakukan teror. Qardhawi (2004: 23) melihat dalam konteks politik-sosial-keagamaan, radikalisme sebagi pandangan, pensikapan, dan tindakan yang "disepakati" secara sosial melampaui batas kenormalan di dalam beragama.

Inti dari radikalisme adalah menghendaki adanya perubahan pergantian terhadap suatu pemerintahan di masyarakat. Dalam setiap aksinya radikalisme menggunakan kekerasan, dan suka memaksakan kehendak. Tujuan dari radikalisme adalah kekuasaan dan penguasaan politik dengan mengedepankan atau memanfaatkan golongan, kelompok-kelompok primordial seperti suku, bangsa, ras, keyakinan, keagamaan, dan kepercayaan. Berbagai pendekatan primordial inilah gerakan radikalisme membangun kekuatan untuk mendapatkan legitimasi dan solidaritas (Dwilaksana, 2014). Radikalisme menunjuk pada gerakan kekerasaan yang diambil oleh individu dan sekelompok golongan sebagai respons atas ketidakpuasan pada masalah sosial, politik, dan ekonomi.

Secara makro, paham radikal dapat ditengarai melalui lima (5) karakteristik. *Pertama;* Memandang negara Barat sebagai kekuatan yang menghegemoni bangsa-bangsa muslim. *Kedua;* Melakukan perlawanan kepada sistem pemerintahan beserta produk hukumnya. *Ketiga;* Jihad menjadi dan dijadikan cara untuk menegakkan agama dan kekuasaan politik. *Keempat;* Penegakan hukum dapat dilakukan melalui kekerasan. *Kelima;* Memandang komunitas lain, terutama Nasrani dan Yahudi sebagai ancaman eksistensinya.

Selanjutnya, karakteristik yang bersifat makro tersebut diterjemahkan dan dimanifestasikan pada level individu (mikro) yang meliputi pandangan, sikap dan tindakan berupa: 1) Melihat gejala sosial secara dikotomis, bersikap tertutup, dan anti dialog. 2) Memiliki sikap skeptis, tidak percaya dan menyalahkan kepada individu dan atau kelompok lain. 3) Menarik diri dari pergaulan keluarga dan sosial. 4) Menentang dan cenderung menyalahkan kepada aturan tertib sosial yang ada. 5) Menuntut terjadinya perubahan secara mendasar, besar dan sistemik. 6) Mengambil oposisi terhadap negara, atau pemerintah yang sah. 7) Melawan segala bentuk ancaman terhadap ideologi dan eksistensi mereka. 8) Meligitimasi tindakan kekerasan dan intimidasi untuk mencapai tujuannya. 9) Mudah mengkafirkan individu atau kelompok yang berbeda pandangan keagamaanya.

Munculnya radikalisme di masyarakat pada level mikro dan makro diawali dengan tumbuhnya sikap intoleransi dalam interaksi sosial yang ditandai dengan penyebaran informasi yang salah, penyebaran kebencian mengenai individu atau kelompok lain, meremehkan eksistensi kelompok iman tertentu dan membatasi hak asasi manusia atas anggota individu atau kelompoknya. Radikalisme di Indonesia menurut Idris (2017) dipengaruhi tiga faktor utama, yaitu faktor internasional, domestik dan kultural. Faktor internasional merupakan aspek global yang secara tidak langsung memiliki potensi pemantik munculnya perasaan simpati terhadap nasib bangsa lain seagama yang diperlakukan tidak adil negara Barat. Ketidakadilan tersebut tercermin dari penilaian mereka terhadap perlakukan dunia terhadap Negara Mesir dan Iraq, politik luar negeri diskriminatif di Palestina dan Israel, serta terjadinya imperialisme ekonomi, dan liberalisme politik yang mengakibatkan dominasi ekonomi negara Barat.

Faktor domestik merupakan faktor-faktor yang dialami dan terjadi di wilayah nasional dan daerah yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat secara umum. Faktor ini meliputi persepsi tentang ketidakadilan dalam distribusi ekonomi, tingkat kesejahteraan yang rendah, akses pendidikan belum merata, dan penegakan hukum yang dinilai masih diskriminatif dan belum berpihak kepada masyarakat serta adanya balas dendam kepada aparat. Faktor tersebut

menyebabkan munculnya kekecewaan terhadap sistem yang berlaku dan menghendaki adanya perubahan dalam rangka ijtihad memperbaiki keadaan yang dipandang belum sesuai dengan cita-cita Negara Indonesia.

Faktor selanjutnya yaitu aspek kultural yang berkembang dan dikembangkan oleh kelompok masyarakat tertentu berupa pemahaman agama yang dangkal, penafsiran terhadap teks-teks agama secara sempit dan literal (tidak kontekstual) serta adanya indoktinasi ajaran agama yang salah, seperti pelaksanaan jihad hanya dilakukan melalui peledakan bom atau bom bunuh diri.

Faktor lain penyebab masuknya ideologi radikal dapat dikategorikan sebagai *push and pull factors* (Hendricks & Newnham, 2017) serta *personal factors* (Viorganni, 2017). Faktor pendorong atau disebut faktor psiko sosial adalah lingkungan atau kondisi kontekstual yang dapat menciptakan kerentanan terhadap perilaku atau ideologi kekerasan ekstrim. Faktor ini meliputi keluhan yang bersifat *real* maupun bayangan, terbatasnya kesempatan pekerjaan dan akses, dan keterasingan dari komunitas sosial. Termasuk pula faktor pendorong ialah adanya penyebab struktural yang meliputi pemerintahan lemah, ketidakadilan, ketidaksejajaran, dan kemiskinan. Sementara itu, faktor penarik adalah motivasi individu yang dapat dipergunakan untuk menarik mereka ke dalam perilaku kekerasan. Faktor ini meliputi identitas dan

kepemilikan, insentif keuangan, status dan reputasi, kebutuhan untuk memiliki, dan panggilan ideologi untuk aksi dan janji-janji surga. Terakhir, personal faktor dapat berupa trauma, gangguan psikologis, serta sifat dan kepribadian dasar.

Munculnya radikalisme juga sebagai respons terhadap situasi sosial yang sedang dihadapi, sehigga menghasilkan 3 kecenderungan sikap yang berbeda yaitu: *Pertama;* kecenderungan untuk melakukan evaluasi, penolakan atau perlawanan. *Kedua;* kecenderungan untuk mengganti tatanan yang ada dengan bentuk tatanan lain. *Ketiga;* kecenderungan justifikasi atau pembenaran terhadap ideologi yang mereka bawa (Karim, 1999: 120; Zada, 2002: 16; Suprihatiningsih, 2012: 377).

***

Penyebab Radikalisme

Radikalisme tidak hadir secara tiba-tiba dan tanpa dilatarbelakangi oleh kondisi ruang dan waktu sebagai sebab tumbuh kembangnya ideologi ini. Banyak faktor melatarbelakangi munculnya paham radikal di Indonesia yang pada gilirannya melahirkan perilaku radikal terorisme. Beberapa ahli menengarai adanya berbagai hal yang menarik dan mendorong radikalisme muncul di masyarakat berdasarkan berbagai perspektif, antara lain psikologi, sosiologi, politik, ekonomi dan agama.

Aspek psikologis yang menyebabkan lahirnya radikalisme ditandai dengan adanya kekecewaan dan keputusasaan terhadap situasi yang ada dan memiliki akibat langsung maupun tidak langsung terhadap pribadi atau kelompok. Mereka tidak mampu mengurai dan menyelesaikan situasi yang dihadapi yang pada gilirannya memilih jalur radikal sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, faktor balas dendam kepada aparat, pemerintah dan penguasa yang telah memperlakukan secara tidak adil terhadap saudara, teman atau anggota keluarganya. Mereka tidak kuasa untuk membela dan melawan karena berbagai macam keterbatasan yang dimiliki. Akumulasi perasaan tersebut yang secara psikologis mendorong munculnya sikap radikal sebagai bentuk protes terhadap nasib yang menimpa diri dan orang-orang terdekat.

Selanjutnya, radikalisme dapat muncul karena perilaku ketidakadilan oleh penguasa yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial (*social gap*) berkepanjangan dan tidak menemukan jalan keluar yang berujung pada asumsi bahwa negara tidak mampu menjamin terciptanya kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Selain itu, lunturnya kohesivitas sosial di masyarakat sebagai akibat dari dinamika sosial dan modernisasi yang ditandai dengan munculnya perilaku individualistik dan egoisme dengan sikap lebih mementingkan kepentingan sendiri dan kelompoknya. Faktor lain yang memicu tumbuhnya radikalisme adalah penilaian terhadap ideologi

negara Pancasila yang dianggap tidak mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Perjuangan untuk mengganti ideologi negara menjadi pintu masuk gerakan radikal dengan segala varian sikap dan aksinya yang berujung pada ranah kekuasaan.

Radikalisme juga disulut oleh faktor pemahaman terhadap agama yang sempit, tekstual dan kaku terhadap teks-teks agama. Agama dipahami secara tekstual seperti apa adanya tanpa diimbangi dengan tafsir kontekstual yang dibarengi dengan sikap menghormati terhadap perbedaan yang muncul. Tafsir terhadap ajaran agama tidak tunggal dan monolitik, karena setiap individu memiliki dasar dan cara pandang yang beragam ketika mendekati sebuah teks. Pemutlakan terhadap kebenaran tafsir yang diyakini melahirkan sikap intoleran terhadap kebenaran terhadap tafsir lain.

Katerkaitan antara radikalisme dan faktor agama ini didukung oleh pendapat Azra (1993: 5) yang menguraikan bahwa radikalisme disebabkan oleh pemahaman keagamaan yang literal, memahami ayat-ayat al-Quran secara parsial serta kesalahan dalam memahami sejarah umat Islam yang kemudian dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan terhadap umat Islam pada masa tertentu. Hal yang senada disampaikan oleh Qardawi (1406: 59) yang memaparkan sebab dan sumber munculnya radikalisme antara lain:

Pertama; Pengetahuan agama yang setengah-setengah melalui proses belajar yang doktriner.

Kedua; Literal dalam memahami teks-teks agama sehingga pemahaman terhadap Islam dari kulitnya saja tetapi minim wawasan tentang esensi agama.

Ketiga; Sibuk dengan masalah-masalah sekunder seperti menggerak-gerakkan jari ketika *tasyahud* dalam shalat, memanjangkan jenggot, dan meninggikan celana dan melupakan masalah-masalah primer.

Keempat; Berlebihan dalam mengharamkan banyak hal yang justru memberatkan umat.

Kelima; Lemah dalam wawasan sejarah dan sosiologi sehingga fatwa-fatwa mereka sering bertentangan dengan kemaslahatan umat, akal sehat, dan semangat zaman.

Keenam; Reaksi terhadap bentuk-bentuk radikalisme yang lain seperti sikap radikal kaum sekular yang menolak agama.

Ketujuh; Perlawanan terhadap ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik di tengah-tengah masyarakat.

Radikalisme tidak jarang muncul sebagai ekspresi rasa frustasi dan pemberontakan terhadap ketidakadilan sosial yang disebabkan oleh mandulnya kinerja lembaga hukum. Kegagalan pemerintah dalam menegakkan keadilan akhirnya direspon oleh kalangan radikal dengan tuntutan penerapan syariat Islam. Dengan menerapkan aturan syariat mereka merasa dapat mematuhi perintah agama dalam rangka menegakkan keadilan. Namun, tuntutan penerapan syariah

sering diabaikan oleh negara-negara sekular sehingga mereka frustasi dan akhirnya memilih cara-cara kekerasan.

Radikalisme yang bermetamorfosis dalam berbagai bentuk sikap dan aksi apapun sesungguhnya ia merupakan musuh semua umat beragama. Radikalisme merupakan kejahatan terhadap manusia dan kejahatan terhadap ancaman bagi bangsa, meskipun terorisme selalu disangkutpautkan dengan agama Islam, namun Islam sejatinya adalah agama yang memberikan keamanan, kenyamanan, ketenangan kepada umatnya. Tidak ada satupun ajaran di dalamnya yang mengajarkan kepada umatnya untuk memebenci dan melukai makhluknya. Jadi, aktivis teroris dan radikalisme telah memanfaatkan ideologi dan agama bagi masyarakat dunia agar memihak kepada ajaran dan ajakan mereka. Aliran ini lebih cenderung mengintai para remaja, karena pada usia ini, mereka masih sangat mudah terpengaruh oleh rayuan dan tipu daya kelompok radikalisme. Paham radiklisme ini terjadi karena proses Islamisasi yang dilakukan kalangan anak muda berlangsung secara tertutup dan cenderung tidak terbuka pada pandagan Islam lainnya hanya berbeda keyakinan. Jika ini dibiarkan bisa menyebabkan disintegrasi bangsa karena mereka berkeyakinan bahwa idologi pancasila tidak lagi penting (Asrori, 2015: 260).

***

Community Resilience

Pengertian mengenai *community resilience* merujuk pada dua kata yaitu *community* dan *resilence* yang dalam bahasa Indonesia diartikan ketangguhan, ketahanan masyarakat. Kata *community* dapat diartikan sebagai komunitas dan memiliki banyak arti, yaitu: a) Sekelompok orang yang tinggal di wilayah geografis tertentu. b) Sekelompok orang yang berbagi budaya, nilai-nilai dan norma-norma yang sama dan yang diatur sesuai dengan struktur sosial yang telah berkembang dari waktu ke waktu. c) Grup di tingkat lokal, nasional atau internasional. d) Sekelompok orang yang berkumpul karena minat khusus atau luas.

Selanjutnya, istilah *resilience* berasal dari bidang ekologi dan sering digunakan untuk menggambarkan karakteristik suatu sistem yang terkait dengan keberlanjutan hidup (Holling 1973; Schrader-Frechette dan McCoy 1993). *Resilience* terjadi ketika individu atau komunitas memiliki sumber daya yang cukup kuat, berlebih, dan cepat dalam menahan atau menetralkan efek langsung dari kekuatan penekan dari luar sehingga tidak terjadi ketidakfungsian peran dan pada gilirannya mampu menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah.

Sementara itu, Gunderson dan Holling (2001) mendefinisikan resiliensi sebagai kapasitas yang dimiliki oleh suatu sistem ketika mengalami gangguan dan mampu mempertahankan fungsi dan kontrolnya. Ketahanan diukur dengan besarnya gangguan yang dapat ditoleransi sistem dan masih bertahan. Hal senada disampaikan oleh Pimm (1984) yang menegaskan bahwa resiliensi merupakan kemampuan sistem untuk melawan adanya gangguan dan mampu untuk kembali kepada situasi keseimbangan setelah terjadinya gangguan.

Bila di awal perkembangannya, penggunaan konsep ketahanan diterapkan pada aspek ekologi, saat ini resiliensi digunakan dalam berbagai macam pekerjaan interdisipliner yang berkaitan dengan interaksi antara manusia dan alam. Resiliensi sering digunakan bersama dengan "kapasitas adaptif", suatu sistem atau komunitas. Dengan pemahaman yang demikian, resilensi merupakan suatu proses yang menghubungkan seperangkat kapasitas adaptif setelah terjadinya gangguan.

Resiliensi, menurut literatur psikologis, adalah kemampuan untuk mengatasi peristiwa negatif atau traumatis dan kembali dengan cepat ke tingkat fungsi yang sehat. Peristiwa traumatis yang dapat menguji ketahanan suatu bangsa atau komunitas tidak hanya mencakup serangan teror, tetapi juga bencana alam dan kecelakaan. Ketahanan terhadap trauma dapat

meningkat disebabkan oleh sejumlah faktor yaitu persiapan untuk trauma, kemampuan untuk mengatasi trauma, dan, keberhasilan pengalaman dalam pemulihan dari trauma masa lalu. Ketahanan merupakan sebuah proses untuk beradaptasi dengan baik dalam menghadapi kesulitan, trauma, tragedi, atau bahkan sumber stres berat (Masten, 2001).

Sejalan dengan pendapat Masten, Reivich dan Shatte (2002) mendefinisikan resiliensi sebagai kapasitas individu atau komunitas untuk merespon secara sehat dan produktif saat berhadapan dengan trauma atau kesengsaraan. Dengan kata lain, resiliensi adalah kemampuan untuk beradaptasi dan tetap teguh dalam situasi yang sulit.

Berdasarkan pada definisi komunitas dan resiliensi di atas, maka dapat diambil pemahaman tentang ketahanan komunitas (*community resilience*) adalah kemampuan berkelanjutan dari suatu komunitas untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti energi, komunikasi, transportasi, makanan, dan lainnya untuk merespons, bertahan, dan pulih dari situasi yang merugikan seperti bencana dan terorisme.

Untuk membangun ketahanan komunitas, diperlukan adanya 6 modal dasar yang perlu dimiliki yang bisa dilakukan menjadi sebuah proses. Keenam modal tersebut adalah 1) masyarakat, 2) pemikiran sistemik, 3) adaptasi, 4) transformasi, 5) keberlanjutan, dan 6) keberanian.

Anggota masyarakat merupakan modal dasar untuk melihat masa depan komunitasnya, karena di tangan mereka nasib komunitas ditentukan. Pola berpikir sistemik menjadi landasan penting untuk mampu memahami permasalahan yang kompleks dan keterkaitan antara berbagai faktor terkait dalam menghadapi krisis serta memahami maknanya bagi komunitas. Fondasi selanjutnya adalah kemampuan beradaptasi. Komunitas diharapkan memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan dan tantangan yang selalu dinamis dan berkelanjutan. Ketika tantangan yang dihadapi begitu besar sehingga tidak mungkin bagi masyarakat untuk beradaptasi, maka diperlukan langkah transformasi untuk bisa melakukan perubahan yang lebih mendasar. Fondasi yang kelima adalah keberlanjutan (*sustainability*). Keberlanjutan dapat tercapai manakala lingkup ketahanan tidak hanya komunitasnya sendiri dan hanya mencakup kebutuhan sekarang, akan tetapi perlu bekerja untuk komunitas lain, generasi mendatang, dan pada ekosistem tempat kita bergantung. Fondasi yang terakhir adalah adanya keberanian. Sebagai individu dan sebagai komunitas, kita membutuhkan keberanian untuk menghadapi masalah yang menantang dan bertanggung jawab atas masa depan kita bersama.

***

Model Resilensi *Psycho-Social*

Untuk mengetahui tingkat resiliensi komunitas, diperlukan adanya alat ukur atau indikator yang dapat dijadikan dasar menilai besaran tingkat ketahanan masyarakat terhadap terpaan bencana yang berasal dari luar. Dalam konteks studi ini, peneliti mengadopsi konsep model resiliensi Speckhard (2005) dengan menggunakan *Modeling Psycho-Social Resilience to Terrorism* terdiri dari 10 komponen sebagai berikut:

1) Posttraumatic Stress (PTSD) / Stress pasca trauma
2) Social Buffering/ Penyangga Sosial
3) World Assumptions/ Asumsi Dunia
4) Mastery/ Penguasaan
5) History/ Sejarah
6) Social Capabilities/ Kapasitas Sosial
7) Perceived Risk and Fear / Persepsi Risiko dan Ketakutan
8) Personal Preoccupation/ Kesibukan pribadi
9) Attitude toward Government/ Sikap terhadap Pemerintah
10) Xenophobia/ Xenopobia

Kesepuluh variabel di atas menjadi rujukan untuk mengukur tingkat resilensi komunitas dalam menghadapi kejadian terorisme yang terjadi di masyarakat, yang secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut:

Post traumatic Stress atau PTSD merupakan indikator pertama untuk mengetahui tingkat ketahanan komunitas dalam menghadapi peristiwa yang mengancam jiwa, individu berisiko mengalami stres pasca trauma, respons kecemasan, depresi, panik, dan respons disosiatif. Semua tanggapan ini berhubungan negatif dengan ketahanan karena berkaitan dengan hilangnya fungsi dan penurunan kemampuan beradaptasi terhadap stresor. Reaksi stres akut juga merupakan efek posttraumatic jangka pendek yang serius. Namun, mereka sering menyelesaikannya sendiri dan tidak berdampak negatif terhadap ketahanan jangka panjang, sedangkan depresi, stres pasca trauma, disosiatif, dan respons kecemasan dapat berlangsung selama berbulan-bulan setelah peristiwa teroris dan mengganggu fungsi normal. Ini lebih sering memerlukan intervensi.

Pemerintah memberikan latihan dan mendampingi masyarakat setelah adanya kejadian, membantu lalu lintas komunikasi, menyediakan dokter dan pekerja sosial untuk mengenali dan merujuk pengobatan yang tepat untuk menghadapi situasi setelah serangan teroris. Dalam hal pertolongan pertama, mereka melakukan sendiri bagaimana ketika mengalami kilas balik traumatis, tanggapan disosiatif, kegelisahan, penghindaran, rangsangan tubuh, depresi, panik dan kehilangan fungsi yang melibatkan kerugian jangka panjang di bidang fungsi hidup yang signifikan. Pelatihan tentang masalah tersebut berguna untuk membantu menormalkan

respons akut pasca-trauma dan meyakinkan orang bahwa respons normal semacam ini akan berlalu dengan sendirinya, tetapi mereka yang tidak mendapat manfaat dari bantuan perawatan profesional.

Penyangga sosial memiliki peran dalam menghadapi sebuah peristiwa teror untuk meningkatkan ketahanan dengan menyediakan ruang komunikasi positif dan menyenangkan. Sebuah jejaring sosial memiliki posisi yang kuat untuk memengaruhi persepsi positif atau negatif terhadap peristiwa teror. Penyangga sosial meliputi bentuk keterikatan, sifatnya menyenangkan, berbagi informasi, dan jaringan komunikasi. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa bentuk keterikatan emosional seperti perasaan aman, gelisah, menghindar, dan kekacauan serta ketidakteraturan perasaan hadir pada individu dewasa berhubungan dengan pengalaman hidup sebelumnya. Hal tersebut dapat digunakan untuk memprediksi kemampuan individu dalam mengatasi dan menenangkan diri saat menghadapi tekanan.

Bowlby (1982; 1988); Ainsworth (1978) menyatakan bahwa terdapat bentuk-bentuk keterikatan yang tidak lazim seperti merasa asing, takut dan cemas yang memicu munculnya perilaku keterikatan dan menjadi karakteristik individu. Mengacu kepada beberapa bentuk keterikatan tersebut dapat disimpulkan bahwa mereka yang menggunakan bentuk keterikatan yang aman akan mampu memanfaatkan

pihak lain dalam mengatasi kecemasan dan meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi trauma yang dialami.

Cara lain untuk mengatasi perasaan cemas atau panik dalam menghadapi peristiwa radikal atau terorisme melalui berbagi informasi positif. Ketika individu berbagi rumor dan kecemasan kepada orang lain, maka akan menghasilkan informasi yang dapat menyebabkan kepanikan dan bahkan penyakit psikogenik. Untuk itu informasi harus dibagikan dengan cara positif dalam rangka membantu mengatasi masalah secara positif, bukannya mengakibatkan rasa takut atau panik. Variabel lain yang bisa digunakan adalah adanya jaringan komunikasi. Hal ini berkaitan dengan kemampuan individu atau kelompok untuk berkomunikasi secara memadai dengan pihak lain untuk memberi dan menerima informasi yang mampu menenangkan dan berguna dalam mengatasi persoalan. Pemberian informasi kepada saudara atau keluarga yang dicintai melalui telepon atau internat bahwa mereka dalam keadaan baik merupakan langkah positif dan memiliki hubungannya dengan resiliensi individu.

***

Kemampuan Dasar Resiliensi

Resiliensi individu maupun komunitas menurut Reivich dan Shatte (2002) dapat dilihat dan diukur dari 7 kemampuan dasar, yaitu regulasi emosi, pengendalian impuls, optimism, analisis penyebab masalah, empati, efikasi diri, dan kemampuan meraih aspek positif dari sebuah keterpurukan (*reaching out*).

Regulasi emosi adalah kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan. Individu yang memiliki kemampuan mengatur emosi dengan mengendalikan dirinya apabila sedang kesal dan dapat mengatasi rasa cemas, sedih, atau marah maka ia akan mampu mempercepat dalam pemecahan suatu masalah. Pengekspresian emosi, baik negatif ataupun positif merupakan sebuah jalan yang sehat dan konstruktif asalkan dilakukan dengan tepat. Selanjutnya, Reivich dan Shatté mengemukakan adanya dua hal penting dalam regulasi emosi, yaitu ketenangan (*calming*) dan fokus (*focusing*). Individu yang mampu mengelola kedua keterampilan ini akan bisa membantu meredakan emosi yang ada serta memfokuskan pikiran-pikiran yang mengganggu dan mengurangi stres.

Kemampuan kedua adalah pengendalian impuls. Kemampuan ini merupakan sebuah daya untuk mengendalikan keinginan, dorongan, kesukaan, serta tekanan yang muncul dari dalam diri seseorang. Individu dengan pengendalian impuls rendah sering mengalami perubahan emosi dengan cepat yang pada gilirannya cenderung mengendalikan perilaku dan pikiran mereka. Akibatnya, individu seperti itu sering kali cepat kehilangan kesabaran, mudah marah, dan berlaku agresif pada hal-hal kecil yang tidak terlalu penting.

Optimisme merupakan kemampuan ketiga dari ciri individu yang resilien. Seseorang yang optimis berarti ia memiliki harapan akan masa depan dan percaya bahwa ia mampu mengontrol arah hidupnya. Bila dibandingkan dengan individu yang pesimis, individu yang optimis lebih sehat secara fisik, dan lebih jarang mengalami depresi, lebih baik di tempat belajar atau bekerja, lebih produktif dalam kerja, dan lebih banyak menang dalam kompetisi. Optimisme mengimplikasikan bahwa individu percaya bahwa ia dapat menangani masalah-masalah yang muncul pada masa yang akan datang.

Kemampuan selanjutnya adalah empati. Empati merupakan kemampuan individu untuk merasakan keadaan emosional orang lain, merasa simpatik dan mencoba menyelesaikan masalah, dan mengambil perspektif orang lain. Empati merepresentasikan bahwa individu mampu membaca tanda-tanda psikologis dan emosi dari orang lain. Empati

mencerminkan seberapa baik individu mengenali keadaan psikologis dan kebutuhan emosi orang lain. Individu yang berempati mampu mendengarkan dan memahami orang lain sehingga ia pun mendatangkan reaksi positif dari lingkungan. Seseorang yang memiliki kemampuan berempati cenderung memiliki hubungan sosial yang positif.

Reivich dan Shatté, mengungkapkan bahwa analisis penyebab masalah memiliki hubungan erat dengan gaya berpikir. Gaya berpikir adalah cara yang biasa digunakan individu untuk menjelaskan sesuatu hal yang baik dan buruk yang terjadi pada dirinya. Gaya berpikir dibagi menjadi tiga dimensi, yaitu: *personal* (saya-bukan saya), *permanen* (selalu-tidak selalu) dan *pervasive* (semua-tidak semua). Pada dimensi personal, individu dengan gaya berpikir 'saya' adalah individu yang cenderung menyalahkan diri sendiri atas hal yang tidak berjalan semestinya. Sebaliknya, Individu dengan gaya berpikir 'bukan saya', meyakini penjelasan eksternal (di luar diri) atas kesalahan yang terjadi.

Pada gaya berpikir *permanen* (selalu-tidak selalu), individu yang pesimis cenderung berasumsi bahwa suatu kegagalan atau kejadian buruk akan terus berlangsung. Sedangkan individu yang optimis cenderung berpikir bahwa ia dapat melakukan suatu hal lebih baik pada setiap kesempatan dan memandang kegagalan sebagai ketidakberhasilan sementara. Selanjutnya pada gaya *pervasive* (semua-tidak semua), individu dengan gaya berpikir 'semua' melihat kemunduran

atau kegagalan pada satu area kehidupan ikut menggagalkan area kehidupan lainnya. Individu dengan gaya berpikir 'tidak semua' dapat menjelaskan secara rinci penyebab dari masalah yang ia hadapi.

Individu yang paling resilien adalah individu yang memiliki fleksibilitas kognisi dan dapat mengidentifikasi seluruh penyebab yang signifikan dalam permasalahan yang mereka hadapi tanpa terperangkap dalam gaya tertentu.

Kemampuan keenam adalah efikasi diri (*self efficacy)*. Efikasi diri merupakan sebuah keyakinan untuk menghadapi dan memecahkan masalah dengan efektif. Efikasi diri berarti meyakini diri sendiri mampu berhasil dan sukses. Individu dengan efikasi diri tinggi memiliki komitmen dalam memecahkan masalahnya dan tidak akan menyerah ketika menemukan bahwa strategi yang sedang digunakan itu tidak berhasil. Menurut Bandura (1977), individu yang memiliki efikasi diri yang tinggi akan sangat mudah dalam menghadapi tantangan. Individu tidak merasa ragu karena ia memiliki kepercayaan yang penuh dengan kemampuan dirinya. Individu ini akan cepat menghadapi masalah dan mampu bangkit dari kegagalan yang ia alami.

Kemampuan ketujuh menurut Reivich dan Shatte adalah apa yang disebut *reaching out* atau kepemilikan aspek positif. Individu yang mampu meningkatkan aspek positif dalam hidup akan dapat melakukan dua hal yaitu: (1) mampu membedakan

risiko yang realistis dan tidak realistis, (2) memiliki makna dan tujuan hidup serta mampu melihat gambaran besar dari kehidupan. Individu yang selalu meningkatkan aspek positifnya akan lebih mudah dalam mengatasi permasalahan hidup, serta berperan dalam meningkatkan kemampuan interpersonal dan pengendalian emosi.

Sementara itu, Fran H Norris dkk (2008) memiliki pandangan yang lebih luas dan komprehensif dimana ketahanan muncul dari serangkaian kapasitas adaptif yang berjejaring. Posisi poin penting ketahanan terletak pada sumber daya itu sendiri dan atribut dinamis dari sumber daya tersebut yang meliputi ketahanan, redundansi, dan kecepatan. Norris menggunakan istilah 'kapasitas adaptif 'untuk menangkap kombinasi dari berbagai variabel tersebut. Secara garis besar, Norris dkk mengidentifikasi empat rangkaian utama sumber daya jaringan adalah: Pembangunan Ekonomi (*economic development*), Modal Sosial (*social capital*), Informasi dan Komunikasi (*information and communication*), dan Kompetensi Komunitas (*community competence*) yang terilustrasikan dalam gambar berikut:

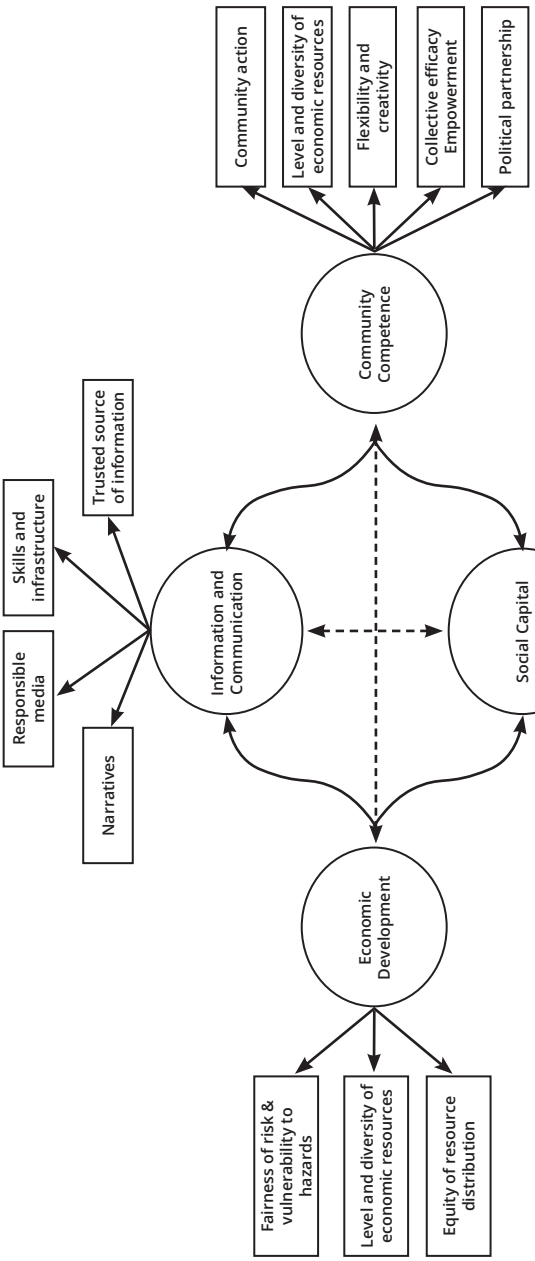

Gambar 1
Resiliensi sebagai sebuah jejaring kemampuan adaptif

Mengacu kepada teori yang disampaikan oleh Norris dkk dalam gambar di atas, variabel modal sosial dan kompetensi komunitas dipandang lebih relevan untuk mengetahui tingkat resiliensi masyarakat sesuai dengan tujuan penelitian yang lebih menitikberatkan pada aspek sosial. Ide dasar modal sosial adalah bahwa individu berinvestasi, mengakses, dan menggunakan sumber daya yang tertanam dalam jejaring sosial untuk mendapatkan pengembalian. Pemahaman ini juga dapat didefinisikan sebagai agregat dari sumber daya aktual atau potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan yang dapat bertahan lama. Adapun komponen modal sosial terdiri dari tujuh (7) aspek yaitu dukungan sosial yang diterima, dukungan sosial yang diharapkan, keterikatan sosial, kerjasama dan hubungan organisasi, peran dan partisipasi kepemimpinan warga, rasa kebersamaan dalam komunitas, serta keterikatan pada tempat.

Sementara itu, kompetensi komunitas dipandang memiliki peran penting dalam membangun ketahanan. Kapasitas untuk mendapatkan informasi yang tepercaya dan akurat, untuk merefleksikan informasi itu secara kritis, dan untuk menyelesaikan masalah yang muncul jauh lebih penting bagi ketahanan masyarakat. Kompetensi komunitas meliputi lima (5) aspek, yaitu gerakan komunitas, ketrampilan dalam pengambilan keputusan dan refleksi kritis, fleksibilitas dan kreatifitas, penguatan keyakinan kolektif dan kemitraan politik.

***

Social Cohesion

Social Cohesion didefinisikan sebagai kepercayaan yang dipegang oleh warga negara dari negara-bangsa tertentu bahwa mereka memiliki komunitas moral, yang memungkinkan mereka untuk saling percaya (Larsen 2013). Di dalam *social cohesion*, *trust* adalah kunci.

Secara etimologi kohesi merupakan kemampuan suatu kelompok untuk menyatu, dan kohesi sosial merupakan hasil hubungan individu dengan lembaga. Dewan Eropa mendefinisikan kohesi sosial sebagai kemampuan suatu masyarakat untuk menjamin kesejahteraan anggotanya, menekan perbedaan dan menghindari polarisasi. Masyarakat yang kohesif merupakan komunitas yang terdiri dari individu-individu bebas yang saling mendukung, mencapai tujuan bersama secara demokratis.

Kohesi sosial terdiri dari kekuatan yang berlaku pada anggota suatu masyarakat atau kelompok untuk tinggal di dalamnya, dan dengan aktif berperan untuk kelompok dalam kelompok kompak, anggota ingin menjadi bagian dari kelompok, mereka biasanya suka satu sama lain dan hidup rukun serta bersatu dan setia di dalam mengejar tujuan kelompok. Kohesi sosial merupakan awal dan konsekuensi penting dari aksi kolektif sukses. Kohesi sosial menengahi formasi kelompok, produktivitas dan pemeliharaan. Dimensi

kohesi Sosial dalam studi ini terdiri dari enam dimensi, yaitu rasa memiliki, rasa moral, konsensus tujuan, kepercayaan, hubungan timbal balik dan kohesi jaringan.

Kebanyakan sosiologi kontemporer mempertanyakan gagasan bahwa solidaritas organik, kesadaran saling bergantung satu sama lain, cukup untuk menegakkan kohesi sosial dalam masyarakat yang sangat berbeda. Namun, argumen saling ketergantungan Durkheim menunjuk ke aspek yang sangat mendasar dari masyarakat modern: kita semua perlu berinteraksi dengan orang yang tidak kita kenal.

Jika kembali ke definisi kohesi sosial sebagai kepercayaan yang dipegang oleh warga negara tertentu bahwa mereka memiliki komunitas moral, untuk masyarakat modern (atau pasca-modern), aspek yang paling penting bukanlah bahwa warga negara percaya bahwa mereka memiliki agama yang sama, nilai-nilai keluarga, sikap terhadap homoseksualitas atau cita-cita lainnya. Dalam operasi sehari-hari masyarakat yang sangat berbeda, aspek paling penting dari kohesi sosial adalah bahwa warga negara percaya bahwa mereka berbagi norma untuk tidak saling menipu.

Menurunnya kohesivitas sosial memberikan berbagai dampak. Salah satu dampak yang paling besar adalah terpicunya radikalisme. Hal ini sudah terbukti terjadi pada kasus Uighur.

Teori kohesi sosial tidak hanya menjelaskan radikalisasi bertahap masyarakat Uighur di Xinjiang, tetapi juga menjelaskan

dampak menurunnya kohesi sosial pada komunitas non-Muslim di wilayah yang sama.

Menurut Turok, kohesi sosial terdiri dari lima dimensi utama:

1. Kondisi material, yang merupakan komponen fundamental dari kohesi sosial, termasuk khususnya pekerjaan, pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan perumahan.
2. Hubungan sosial pasif, yang berarti keteraturan sosial, keamanan, dan kebebasan dari rasa takut
3. Hubungan sosial aktif, mengacu pada interaksi positif, pertukaran, dan jaringan antara individu dan masyarakat
4. Sejauh mana inklusi sosial atau integrasi orang ke dalam lembaga arus utama masyarakat sipil
5. Melibatkan tingkat keadilan atau ketidaksamaan mengenai akses ke peluang atau keadaan material, seperti pendapatan, kesehatan, atau kualitas hidup.

Di antara lima dimensi tersebut, kondisi material adalah merupakan dimensi yang mendasari empat dimensi lainnya.

Jenson (1998) menguraikan klasifikasi kohesi social menggunakan lima dimensi, yaitu:

1. afiliasi / isolasi
   Berbagi nilai-nilai umum, perasaan memiliki komunitas yang sama;
2. penyisipan / pengecualian

kapasitas pasar bersama, khususnya yang berkaitan dengan pasar tenaga kerja; dengan kata lain, yang memiliki / tidak memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam perekonomian;

3. partisipasi / kepasifan
   keterlibatan dalam pengelolaan urusan publik, sektor ketiga);
4. penerimaan / penolakan
   pluralisme dalam fakta dan juga sebagai suatu kebajikan, yaitu toleransi mengenai perbedaan;
5. legitimasi / ilegalitas
   pemeliharaan institusi publik dan privat yang bertindak sebagai mediator, yaitu seberapa memadai berbagai institusi mewakili masyarakat dan kepentingan mereka.

***

BAB 3

Radikalisme di Wilayah Solo Raya

Demografi Wilayah Penelitian

Penelitian tentang Pencegahan Radikalisme Agama Berbasis *Community Resilience* dan *Social Cohesion* ini dilakukan di 4 kabupaten yang tergabung dalam kawasan Solo Raya, yakni Kabupaten Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Karanganyar. Empat kabupaten tersebut termasuk dalam daerah teritori wilayah Jawa Tengah, secara geografis keempat kabupaten dan atau kota ini merupakan daeArah pedalaman (bukan pesisir). Meskipun begitu keempatnya memiliki ciri khas tersendiri di setiap wilayahnya, baik dalam hal kondisi penduduk, keragaman, maupun sosial keagamaan.

Secara geografis, letak Solo Raya disajikan dalam peta di bawah ini.

Berikut adalah deskripsi demografi untuk masing-masing Kabupaten dan Kota Solo Raya yang menjadi subjek penelitian ini.

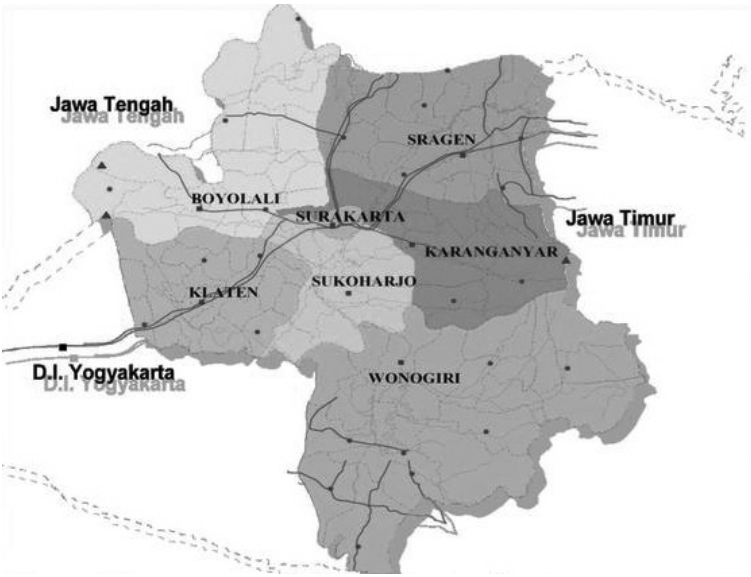

Gambar 2
Peta Wilayah Solo Raya

1. Surakarta

Kota Surakarta disebut juga dengan nama Solo merupakan kota yang menyimpan banyak sejarah dan budaya leluhur bangsa. Melalui Kraton Surakarta sejarah panjang bangsa Indonesia masih tetap terjaga hingga saat ini. Lahirnya sejumlah partai politik seperti Syarikat Islam, Insulinde, National-Indische Partij, PKI, dan Sarekat Islam juga berasal dari Surakarta.

Awalnya Solo merupakan wilayah karesidenan yang terdiri dari Kota Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar,

Wonogiri, Sragen dan Klaten. Namun, saat ini Surakarta atau Solo menjadi kotamadya di bawah kepemimpinan seorang walikota. Solo, yang memiliki luas wilayah 44,05 km2 terdiri dari lima kecamatan yaitu; Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres, dan Banjarsari yang termasuk dalam kategori daerah dataran rendah yang berada di cekungan lereng pegunungan Lawu (tinggi 2.806 m) dan pegunungan Merapi (tinggi 3.115 m), serta dibelah dan dialiri oleh 3 sungai besar, yakni sungai Begawan Solo, Kali Janes dan Kali Pepe sehingga tanah di sekitar daerah ini terbilang subur.

Surakarta merupakan salah satu kota yang terkena dampak pembangunan tol Semarang-Solo sejauh 804 ha hingga Solo-Ngawi-Kertasono sepanjang 1.018 ha yang dibangun pada tahun 2015. Salah satu dampak dari pembangunan jalan tol menjadikan semakin mudahnya akses transportasi antar daerah di sekitar Solo Raya. Aktivitas bisnis yang ada di Kota Solo juga semakin lancar, serta terbukanya lapangan kerja sehingga aktivitas perekonomian rakyat meningkat.

Namun, diantara dampak dari pembangunan tol menjadikan berkurangnya lahan pertanian, alur sungai, serta irigasi. Selain itu dibukannya jalan tol ini akan berpotensi pada terbukanya kawasan pemukiman dan industri baru dan berkurangnya lahan hijau. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan tanah kosong dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Padahal, jumlah penduduk Kota Solo pada

tahun 2017 mencapai angka 516.102, dan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Kota Surakarta

No	Kecamatan	2010	2016	2017
1	Laweyan	86.208	88.614	88.947
2	Serengan	43.731	44.950	45.119
3	Pasar Kliwon	74.396	76.474	76.760
4	Jebres	138.292	142.152	142.686
5	Banjarsari	157.584	161.981	162.590
Surakarta		**500.211**	**514.171**	**516.102**

Adapun ketersediaan lahan di Kota Surakarta dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2
Ketersediaan lahan di Kota Surakarta

No	Tahun	Ketersediaan Tanah Kosong
1	2013	112,99
2	2014	109,67
3	2015	109,67
4	2016	108,82

Sumber: Surakarta Dalam Angka Tahun 2018

Solo merupakan salah satu kota yang nyaman untuk dijadikan tempat tinggal. Melalui budaya masyarakatnya yang ramah, banyaknya destinasi dan cagar budaya yang masih tetap terjaga membuat warga negara asing pun betah tinggal

di Solo. Pada tahun 2016, terdapat 1246 warga negara asing pemegang ijin tinggal terbatas, terdiri dari 851 laki-laki dan 395 perempuan. Banyak turis mancanegara yang singgah di Solo mengunjungi situs budaya seperti keraton Surakarta, serta beberapa pasar tradisional seperti (1) pasar tertua di Solo yaitu Pasar Gede yang dirancang oleh arsitek Belanda bernama Thomas Karsten yang dibangun pada tahun 1927-1930, (2) Pasar Barang Antik Triwindu yang menjual barang antik seperti keris kuno, patung, dan lampu antik dari Keraton Solo maupun kain batik dan barang antic lainnya. Di pasar ini sistem barter masih berlaku, pertukaran antar barang antic ditukar dengan barang antik yang lain. (3) Pasar Keris dan Cenderamata Alun-alun Utara Keraton yang menjadi salah satu daya Tarik para wisatawan (4) Pasar Klewer yang sudah ada sejak 1942 yang berada di sebelah alun-alun Lor Solo yang menyediakan berbagai macam pakaian terutama batik (5) Pasar Klitikan Notohardjo yang dibangun pada tahun 2006 untuk menampung para pedagang kali lima yang semula di Taman Monumen 45 Banjarsari (6) Pasar Kliwon yang merupakan tempat penjualan ternak, berada di Kampung Arab.

Selain tempat bersejarah dan pasar tadisional, Solo memiliki daya tarik di aktifitas kebudayaan masyarakat yang sudah ada secara turun temurun, seperti perayaan budaya Sekaten, Grebeg Mulud, Grebeg Sudiro, Sadranan, serta Kirab 1 Suro, yang kesemuanya merupakan perayaan yang dilakukan

oleh umat Islam. Ada pula perayaan yang dilakukan oleh Keraton, seperti Wiyosan Jumenengandalem; peringatan upacara ulangtahun kenaikan tahta raja yang berkuasa, Sesaji Mahesa Lawung; yang dilakukan dalam rangka membangun kekuatan spiritual Keraton, Labuhan ke Laut Selatan; upacara melabuhkan sesaji ke Laut Selatan, dan lainnya.

Solo juga terbilang sebagai kota yang plural. Hal ini dapat dilihat dari segi keragaman agama yang ada dan dianut oleh masyarakat setempat. Terdapat agama-agama besar seperti Islam, Kristen Katholik, Protestan, Budha dan Hindu berkembang di Solo dan masyarakat mampu hidup berdampingan secara damai, meski agama Islam memiliki penganut mayoritas.

Secara geografis, Kota Solo dapat dilihat dalam peta berikut:

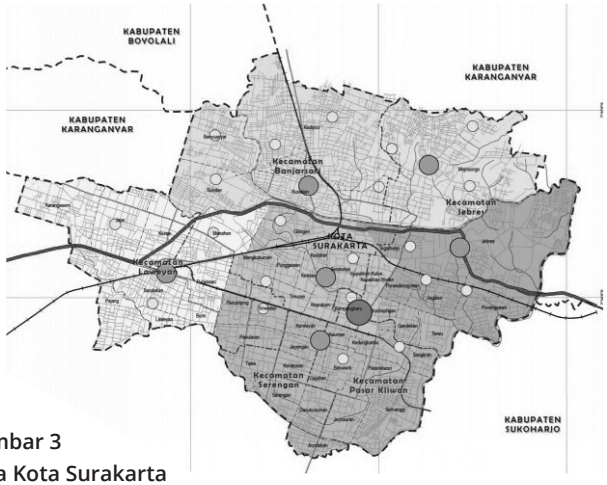

Gambar 3
Peta Kota Surakarta

Tabel 3
Jumlah Tempat Beribadah di Kota Surakarta

No	Kecamatan	Masjid	Gereja Katolik	Gereja Kristen	Kuil/ Vihara	Pura	Surau/ Langgar
1	Laweyan	144	2	26	0	1	37
2	Serengan	51	0	26	1	0	16
3	Pasar Kliwon	99	2	8	0	1	36
4	Jebres	168	2	90	2	0	45
5	Banjarsari	234	6	83	4	1	34
Jumlah		**696**	**12**	**233**	**7**	**3**	**168**
2013		620	5	185	8	3	193
2014		666	6	239	8	3	209
2015		666	6	239	7	3	209
2016		648	6	189	7	3	256

Sumber: Kota Surakarta Dalam Angka Tahun 2018

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa masjid dan surau memiliki jumlah terbanyak diantara tempat ibadah lainnya dan mengalami kenaikan angka setiap tahunnya, sementara terjadi penurunan jumlah gereja Kristen secara signifikan dari tahun ke tahun. Sementara jumlah Pura, Kuil/Vihara tergolong stagnan dalam hal jumlah.

Organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Solo memiliki keragaman, baik yang berafiliasi pada organisasi keagamaan (Islam seperti NU, Muhammadiyah, muslim Syi'ah, Ahmadiyah dan lainnya) kepemudaan (seperti KNPI, Ansor, Fatayat, Nasyiatul Aisyiyah), maupun kebangsaan dan lainnya (seperti Fornas Bhineka Tunggal Ika dan MAFINDO). Organisasi-organisasi ini memiliki peran masing-masing di tengah-tengah masyarakat Solo yang mampu mewarnai kondisi sosial keagamaan Kota Solo.

2. Sukoharjo

Kabupaten Sukoharjo awalnya merupakan wilayah pemerintahan Surakarta dengan nama kawedanan, kemudian terjadi pemekaran wilayah dan menjadi kabupaten tersendiri semenjak 15 Juli 1946. Dilihat dari luas wilayahnya, Kabupaten Sukoharjo bukanlah termasuk kategori kabupaten besar, secara administratif Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 Kecamatan (Kecamatan terluas di Kabupaten Sukoharjo

adalah Kecamatan Polokarto, dan Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Kartasura) yang terdiri dari 167 desa/kelurahan (150 desa, 17 kelurahan), dan hanya memiliki luas 46.666 ha atau 1.43% luas wilayah Jawa Tengah. Secara relief, sebagian daerah Sukoharjo menempati daerah datar, yakni meliputi Kecamatan Kartasura, Baki, Gatak, Grogol, Sukoharjo, dan Mojolaban, sedangkan sebagian yang lain berada pada daerah kemiringan, yakni meliputi Kecamatan Polokarto, Bendosari, Nguter, Bulu, dan Weru.

Kabupaten Sukoharjo terletak di antara 6 (enam) kabupaten/kota, yakni Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar di sebelah Utara, Kabupaten Karanganyar di sebelah Timur, Kabupaten Gunungkidul dan Wonogiri di sebelah Selatan, serta Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali di sebelah Barat. Letak yang strategis ini didukung pula oleh jalur perlintasan yang dikenal dengan istilah Subosuka Wonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten) dapat memberikan keuntungan bagi pembangunan maupun perekonomian setempat.

Secara geografis, posisi Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat dalam peta berikut:

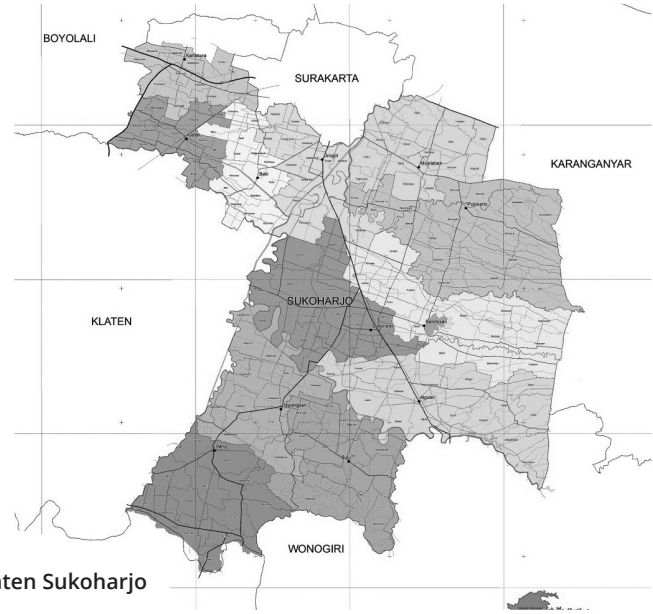

Gambar 4
Peta Kabupaten Sukoharjo

Kabupaten yang memiliki *tagline* Sukoharjo Makmur (Maju, Aman, Konstitusional, Mantap, Unggul, dan Rapi) ini dikenal juga dengan kabupaten yang memproduksi jamu tradisional. Kabupaten ini memiliki beberapa objek wisata alam seperti situs budaya, situs bersejarah, petilasan, air terjun, waduk, serta makam tokoh bersejarah. Adanya pembangunan tol Semarang-Solo memberikan dampak pada perkembangan beberapa sektor pembangunan, seperti dibukanya lahan untuk perumahan dan bisnis perhotelan, serta mempermudah akses pariwisata yang ada di Kabupaten Sukoharjo.

Pelaku industri kecil yang ada di Kabupaten Sukoharjo memiliki jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan industri menengah dan industri besar. Pada tahun 2017, jumlah

pelaku industri kecil sampai pada angka 16.647, sedangkan pelaku industri menengah hanya 341 dan pelaku industri besar hanya pada angka 125 saja, dari jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo sebanyak 878.374 jiwa, terdiri dari 435.183 laki-laki (49,54%) dan 443.191 perempuan (50,46%). Artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki.

Kabupaten Sukoharjo pernah meraih penghargaan sebagai Kota peduli Hak Asasi Manusia (HAM) selama 3 tahun berturut-turut semenjak 2015 hingga 2017. Penghargaan ini didapatkan karena keberhasilan yang dilakukan pemerintah dalam membangun kesadaran masyarakat akan produk-produk hukum, seperti terpenuhinya hak atas kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, serta rumah layak huni. Meski telah menerima penghargaan sebagai Kota Peduli HAM, di tahun 2017, Sukoharjo pernah tercatat adanya kasus penolakan Kapel ST. Ignasius di Dukuh Ngrayapan, Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban oleh masyarakat atas nama organisasi keagamaan.

Banyaknya tempat ibadah di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2017 tiga kali lipat dari jumlah tempat ibadah yang ada di Kota Surakarta, yakni sebanyak 3.120, yang terdiri dari 1.925 masjid, 1.075 mushala/surau, 108 gereja, 12 kuil/pura/vihara.

Tabel 4
Banyaknya Tempat Peribadatan di Kabupaten Sukoharjo

No	Kecamatan	Masjid	Mushola/langgar	Gereja	Pura	Vihara
1	Weru	124	192	7	0	0
2	Bulu	101	33	5	0	0
3	Tawangsari	147	63	5	2	0
4	Sukoharjo	220	112	12	0	0
5	Nguter	128	121	4	0	0
6	Bendosari	183	83	0	0	0
7	Polokarto	213	74	1	0	0
8	Mojolaban	168	84	8	1	0
9	Grogol	191	72	26	1	4
10	Baki	140	47	12	1	2
11	Gatak	106	62	7	0	0
12	Kartasura	204	132	21	1	0
Sukoharjo		1.925	1.075	108	6	6

Sumber: Sukoharjo dalam Angka 2018

Tabel 5
Banyaknya Pemeluk Agama di Kabupaten Sukoharjo

No	Kecamatan	Islam	Katholik	Kristen	Hindu	Budha
1	Weru	48.581	169	762	5	15
2	Bulu	27.285	61	347	0	3
3	Tawangsari	47.277	170	493	52	0
4	Sukoharjo	88.243	858	1.631	9	20
5	Nguter	41.175	182	612	0	0
6	Bendosari	51.579	305	499	0	0
7	Polokarto	75.101	90	164	0	7
8	Mojolaban	91.750	1.437	1.784	58	30
9	Grogol	127.887	3.906	6.443	180	238
10	Baki	76.878	1.710	2.609	96	139
11	Gatak	46.463	1.266	1.004	4	41
12	Kartasura	114.542	4.924	9.093	121	76
Sukoharjo		836.761	15.078	25.441	525	569

Sumber: Sukoharjo dalam Angka 2018

Jika dilihat dari data, mayoritas penduduk di Kabupaten Sukoharjo beragama Islam dengan jumlah 836.761 atau sebanyak 95,3% dari seluruh penduduk. Pemeluk agama Kristen di Kabupaten Sukoharjo menempati urutan kedua terbesar dengan angka 25.441 saja, sementara pemeluk agama Katolik mencapai 15.078, pemeluk agama Hindu hanya 525 orang, pemeluk agama Budha sebanyak 569 orang.

3. Sragen

Kabupaten Sragen merupakan kabupaten paling timur di Jawa Tengah yang berpatasan dengan Kabupaten Grobogan di sebelah Utara, Kabupaten Karanganyar di sebelah Selatan, Kabupaten Boyolali di sebelah Barat, dan Kabupaten Ngawi (Jawa Timur) di sebelah Timur. Kabupaten yang terletak 30 km sebelah timur dari Kota Surakarta. ini terdiri dari 20 kecamatan, yaitu Kecamatan Plupuh, Kecamatan Kalijambe, Kecamatan Masaran, Kecamatan Kedawung, Kecamatan Sambirejo, Kecamatan Gondang, Kecamatan Sambungmacan, Kecamatan Ngrampal, Kecamatan Sragen, Kecamatan Sidoharjo, Kecamatan Tanon, Kecamatan Gemolong, Kecamatan Miri, Kecamatan Sumberlawang, Kecamatan Mondokan, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Gesi, Kecamatan Tangen, dan Kecamatan Jenar.

Data yang ada di tahun 2017, penduduk Sragen berjumlah 882.090 yang terdiri dari laki-laki 432.178 jiwa dan perempuan 449.912 jiwa, dengan kepadatan penduduk 936/

Km2, hal ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Dengan jumlah kecamatan yang ada, Kabupaten Sragen memiliki luas wilayah lebih luas, serta jumlah ini lebih banyak daripada yang ada di Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo.

Secara geografis, lokasi Kabupaten Sragen dapat dilihat dalam peta berikut:

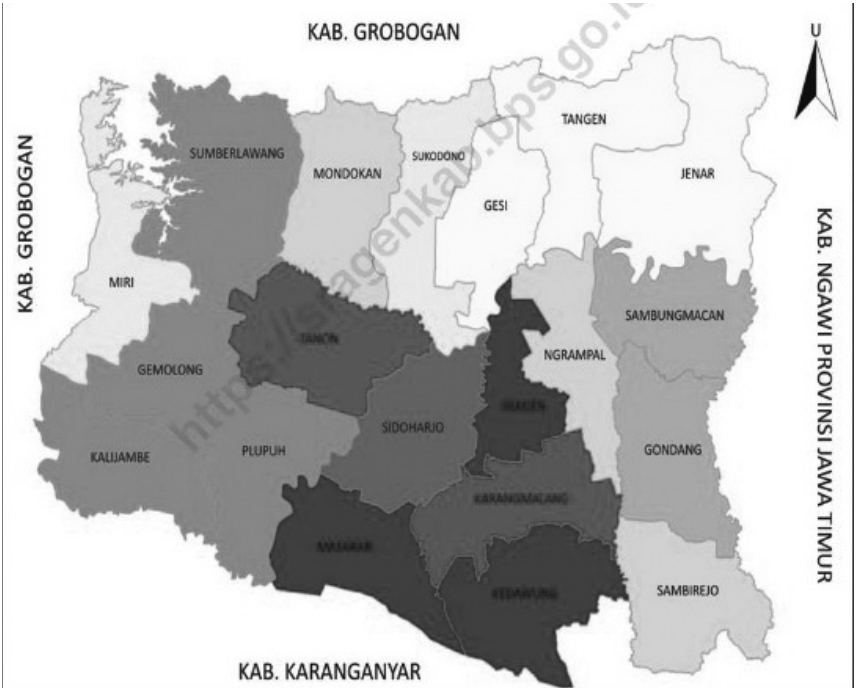

Gambar 5
Peta Kabupaten Sragen

Kabupaten Sragen yang memiliki luas wilayah 941,55 km2, 20 kecamatan dan 208 desa/kelurahan ini banyak terdapat kekayaan alam dan ragam budaya termasuk bangunan bersejarah. Terdapat museum arkeologi yang terletak di Kalijambe, berdekatan dengan area situs fosil purbakala Sangiran, salah satu situs warisan dunia UNESCO. Adanya situs ini mampu meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat setempat. Tumbuh beberapa industri kecil yang berperan penting dalam peningkatan kepariwisataan. Pemberdayaan ekonomi berkembang dalam bidang budaya, kesenian lokal, serta potensi lainnya.

Dari segi keberagaman, persebaran penduduk berdasarkan agama cukup menyebar. Kesenian rakyat yang ada di Kabupaten Sragen pun beragam, kesenian seperti campursari, tayub, karawitan, rodat, serta kesenian rakyat kentongan masih tetap dilestarikan. Terdapat berbagai macam destinasi wisata seperti wisata sejarah, wisata religi, wisata alam, wisata buatan, dan wisata minat khusus yang dikelola oleh Dinas Pariwisata setempat.

Data menunjukkan bahwa pada semua kecamatan di Kabupaten Sragen didominasi oleh penduduk yang memeluk agama Islam, bahkan di Kecamatan Jambe hampir mencapai angka 99% penduduk beragama Islam, pemeluk agama terbanyak selanjutnya ialah Kristen Protestan, kemudian Kristen Katolik, diikuti Hindu, dan Budha. Menariknya, tidak

ada satupun penduduk di Kabupaten Sragen yang memeluk agama Konghuchu.

Jumlah pemeluk agama ini kemudian diimbangi oleh jumlah tempat beribadah yang ada di tiap-tiap kecamatan, Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sragen, terdapat 6 (enam) rumah ibadat yang tercatat sebagai tempat yang digunakan beribadah oleh masyarakat. Pemeluk agama Islam tercatat memiliki 2 (dua) tempat ibadah yang memiliki jumlah paling banyak, yaitu masjid dan mushola dengan angka sebagaimana terdeskripsikan dalam tabel.

Tabel 6
Jumlah Pemeluk Agama di Kabupaten Sragen

No	Kecamatan	Islam	Kristen Protestan	Kristen katolik	Hindu	Budha	Konghucu	Jumlah
1	Kalijambe	49.159	10	23	5	0	0	49.197
2	Plupuh	42.933	121	54	0	0	0	43.108
3	Masaran	72.258	708	222	598	9	0	73.795
4	Kedawang	58.748	711	126	0	13	0	59.598
5	Sambirejo	34.980	684	89	14	0	0	35.767
6	Gondang	40.698	1.121	303	11	19	0	42.152
7	Sambungmacan	43.972	601	73	0	0	0	44.646
8	Ngrampal	37.191	128	156	12	0	0	37.487
9	Karangmalang	64.787	1.505	950	44	47	0	67.333
10	Sragen	62.173	3.434	3.434	36	61	0	69.138
11	Sidoharjo	50.125	403	938	4	17	0	51.487

No	Kecamatan	Islam	Kristen Protestan	Kristen katolik	Hindu	Budha	Konghucu	Jumlah
12	Tanon	50.970	180	303	32	1	0	51.486
13	Gemolong	45.754	364	692	8	0	0	46.818
14	Miri	32.178	91	182	81	0	0	32.532
15	Sumberlawang	43.120	195	175	736	33	0	44.259
16	Mondokan	33.815	53	5	13	27	0	33.913
17	Sukodono	29.520	32	34	13	0	0	29.599
18	Gesi	19.556	182	133	0	14	0	19.885
19	Tangen	25.652	267	63	18	22	0	26.022
20	Jenar	26.519	211	156	14	0	0	26.900

Sumber: Sragen dalam Angka, 2018

Data di atas menunjukkan bahwa pada semua kecamatan di Kabupaten Sragen didominasi oleh penduduk yang memeluk agama Islam, bahkan di Kecamatan Jambe hamper mencapai angka 99% penduduk beragama Islam. Penduduk dengan pemeluk agama terbanyak selanjutnya ialah Kristen Protestan, kemudian Kristen Katolik, diikuti Hindu, dan Budha. Menariknya, tidak ada satupun penduduk di Kabupaten Sragen yang memeluk agama Konghuchu.

Jumlah pemeluk agama ini kemudian diimbangi oleh jumlah tempat beribadah yang ada di tiap-tiap kecamatan. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sragen, terdapat 6 (enam) rumah ibadat yang tercatat sebagai tempat yang digunakan beriadah oleh masyarakat. Pemeluk agama Islam tercatat memiliki 2 (dua) tempat ibadah yang memiliki jumlah paling banyak, yaitu masjid dan mushola.

Tabel 7
Jumlah sarana peribadatan per kecamatan

No	Kecamatan	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Wihara	Klenteng
1	Kalijambe	135	91	0	0	0	0	0
2	Plupuh	131	94	1	0	0	0	0
3	Masaran	137	119	4	1	2	0	0
4	Kedawung	107	174	6	1	0	1	0
5	Sambirejo	70	121	7	1	2	0	0
6	Gondang	83	56	5	5	0	0	0
7	Sambungmacan	74	128	5	0	0	0	0
8	Ngrampal	87	33	2	0	0	0	0
9	Karangmalang	115	110	5	0	0	0	0
10	Sragen	113	93	12	10	0	1	0
11	Sidoharjo	112	171	0	5	0	0	0
12	Tanon	102	300	4	1	1	0	0
13	Gemolong	105	162	3	1	0	0	0

No	Kecamatan	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Wihara	Klenteng
14	Miri	82	94	0	2	1	0	0
15	Sumberlawang	103	193	5	0	4	0	0
16	Mondokan	67	194	1	1	0	0	0
17	Sukodono	82	171	1	0	0	0	0
18	Gesi	31	62	1	1	0	0	0
19	Tangen	45	59	2	0	0	0	0
20	Jenar	41	49	2	1	0	0	0
Sragen		1.822	2.474	66	30	10	2	0

Sumber: Sragen dalam Angka, 2018

Data di atas menunjukkan bahwa di Kecamatan Kalijambe hanya terdapat rumah ibadah umat Islam, yakni masjid dan mushola, sebanyak 135 masjid dan 91 mushola. Di semua kecamatan jumlah masjid dan mushola terbanyak di antara jumlah tempat ibadah lainnya, hal ini dikarenakan jumlah umat Islam juga paling banyak di masing-masing kecamatan. Meskipun, jumlah tempat ibadah lain seperti gereja, pura, dan wihara tidak sebanding dengan jumlah pemeluknya. Hanya ada 66 gereja Protestan se kabupaten Sragen sementara pemeluknya mencapai 11.001 orang. 30 gereja Katolik dengan 8.111 pemeluk Kristen Katolik. 10 Pura dengan 1.639 pemeluk Hindhu. 2 Wihara dengan 263 pemeluk Budha.

Di Sragen juga banyak berdiri pondok pesantren, di semua kecamatan bahkan memiliki pondok pesantren. Terdapat 156 pondok pesantren yang ada di Kabupaten Sragen yang terbagi ke dalam 20 kecamatan.

Tabel 8
Jumlah Pondok Pesantren Kabupaten Sragen

No	Kecamatan	Nama	Jumlah
1	Kalijambe	1. Yaumika 2. Alkaromah 3. Miftahul Huda Ibnu Kad 4. Daarul Mutholaah 5. Sunan Gunungjati Baala	5

No	Kecamatan	Nama	Jumlah
2	Plupuh	1. Nurul Yaqin 2. Al Falah 3. Fatkhul Hidayah 4. Manba'ul Falah 5. Darus Salam 6. Riyadlatuth Tholibin 7. Karya Hidayatullah 8. Nasrun Ummah 9. An Nur	9
3	Masaran	1. Al Falah 2. Budi Luhur 3. Mambaul Huda 4. Darul Falah 5. Ibnu Abas Assalafi 6. Hidayatul Falah 7. Al Barkah 8. Nurul Huda 9. Al Islam Darul Falah 10. Al Falah 11. Al Hadadiyah 12. Assalam 13. Hidayaturrohmah 14. Ta'mirul Islam	14
4	Kedawung	1. Farul Falah 2. Al Falah 3. Mamba'ul Usulil Hikmah 4. Nurul Falah 5. Baiturrohim 6. Hizbulloh 7. Sunan Kalijogo 8. Arroyan 9. Fajrul Fallah	9
5	Sambirejo	1. Al Barokah 2. Al Manar 3. Al Masruki 4. Ummul Quro 5. Al Iksaniyah Abulfaid 6. Baitul Qur'an	6

No	Kecamatan	Nama	Jumlah
6	Gondang	1. Nurul Huda 2. Al Huda 3. An Najah 4. Roudatul Mutaqin	4
7	Sambungmacan	1. Miftakhul Huda 2. Badran Nurul Falah 3. Yanba'ul Qur'an 4. Nurul Hikmah 5. Darul Falah 6. Al Huda 7. Nurul Iman	7
8	Ngrampal	1. Senimam Bumi S. 2. Al Luwung 3. Anwarul Qur'an 4. Al Mu'minun 5. Nurul Falah Al Amin 6. Hidayatul Muhtadin 7. Fathul Falah 8. Daarul Qur'an	8
9	Sragen	1. Yappi 2. Banu Saudah 3. Al Mu'min 4. Darul Ihsan 5. Bustanul Qur'an 6. Hidayatullah/An Nahl 7. Al Wihdah 8. Alfalah Sunan Kalijogo 9. Syifaun Qolbi 10. Arrohim 11. Jamus Kalimosodo 12. An-Nur 13. Roudhotur Rohman 14. Darul Hikmah 15. Darunnaraja 16. Padlul Quran 17. Griya Qur'an 18. Attaqwa	18

No	Kecamatan	Nama	Jumlah
10	Sidoharjo	1. Al Allawy 2. Taqorrub 3. Barokatul Falah 4. Al-Falah 5. Al Muhajirin 6. Nurul Fallah 7. Mafatikhul Falah 8. Bumi Arum Alluwung 9. Al Falah Hidayatu; 10. Qurrotul A'yun 11. Waskito Jati 12. Tachfidzul Qur'an 13. Akhul Muslim 14. Al Ikhsan	14
11	Karangmalang	1. Walisongo 2. Al Husna 3. Riyadul Sholihin 4. Tafidul Qur'an al Ha 5. Nurul Mubin 6. Madina	6
12	Tanon	1. Hidayatul Qur'an 2. Roudhotul Tholibin 3. Al Hikmah 4. Roudhotuth Tholibin 5. Nurul Qodim 6. Roudhotu; Muta'allimin 7. Sunan Muria 8. Salamah Wabarokah 9. Darrussalam 10. Al Ghozali 11. Ibnu Mas'ud 12. Al Fitroh 13. Al Falah 14. Nurul Huda 15. Darussalam 16. Miftakhul Huda	16

No	Kecamatan	Nama	Jumlah
13	Gemolong	1. Majelis Tafsir Al-Qur'an 2. Al-Musanni 3. Roudotul Sholikhin 4. Sabilul Khoirot 5. Bachrul Falah 6. Miftahun Nuur 7. Al Musthofa	7
14	Miri	1. Zumrotul Anwar 2. At Taqwa	2
15	Sumberlawang	1. Nurul Huda 2. Darus Salaf 3. Al Falah 4. Sunan Kalijogo 5. Mambaul Ulum	5
16	Mondokan	1. Al Muayyad 2. Miftaqul Ulum 3. Nurul Muftadi 4. Roudotul Mujawwidin 5. Tahfidul Qur'an 6. Al Ikhlas 7. Mambaut Ath Thoyibah 8. Riyathus Sholihin 9. Darul Ullum 10. Nurul Huda 11. Roudhotul Wahid 12. Nurul Huda	12
17	Sukodono	1. An Na'im Ajisoko 2. Al-Falah 3. Nurul Islam	3
18	Gesi	1. Raudlatul Hikmah 2. Miftaudin 3. Nurul Hikmah 4. Mathaliul Hikmah	4

No	Kecamatan	Nama	Jumlah
19	Tangen	1. Manba'ul Falah 2. Imam Ruba'i 3. Miftakhul Hikmah 4. Sunan Drajad 5. Falahul Hikmah	5
20	Jenar	1. Nurul Falah 2. Miftakhul Falah 3. Zumrotuth Tholibin	3
Jumlah			157

Sumber: Sragen dalam Angka, 2018

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa setiap kecamatan memiliki lembaga pendidikan non formal keagamaan dengan jumlah yang variatif. Secara kuantitatif persebaran pondok pesantren di Kabupaten Sragen paling banyak terdapat di 5 kecamatan, yaitu Karangmalang, Tanon, Sragen, Masaran, dan Mondokan yang secara detil dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 9
Distribusi Pondok Pesantren Per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah	%
1	Kalijambe	5	3
2	Plupuh	9	6
3	Masaran	14	9
4	Kedawung	9	6
5	Sambirejo	6	4

No	Kecamatan	Jumlah	%
6	Gondang	4	3
7	Sambungmacan	7	4
8	Ngrampal	8	5
9	Karangmalang	18	11
10	Sragen	14	9
11	Sidoharjo	6	4
12	Tanon	16	10
13	Gemolong	7	4
14	Miri	2	1
15	Sumberlawang	5	3
16	Mondokan	12	8
17	Sukodono	3	2
18	Gesi	4	3
19	Tangen	5	3
20	Jenar	3	2
Total		157	100

4. Karanganyar

Penamaan Karanganyar diambil dari salah satu pedukuhan yang berada di desa yang diberikan oleh Mangkunegara I, dimana di desa inilah Mangkunegara I mendapatkan kemantapan pada perjanjian baru (bahasa Jawa: anyar) untuk menjadi penguasa.

Kabupaten Karanganyar terletak di perbatasan provinsi Jawa Tengah-Jawa Timur. Sebelah Barat terdapat Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali, sebelah Timur terdapat Kabupaten Magetan (Jawa Timur), sebelah Utara terdapat Kabupaten Sragen, dan sebelah Selatan terdapat Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo.

Kabupaten yang memiliki tagline Tentram (Tenang, Teduh, Rapi, Aman, dan Makmur) ini secara administratif terdiri dari 17 kecamatan 177 desa/kelurahan (15 kelurahan, 162 desa). Kecamatan Jumapolo memiliki dusun paling besar yakni 101 dusun, sedangkan kecamatan Jenawi memiliki dusun paling sedikit, yakni 34. Kabupaten Karanganyar memiliki kecamatan eksklave yang terletak di antara Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta, yaitu Kecamatan Colomadu.

Kabupaten ini termasuk dalam kategori daerah yang agraris, memiliki luas Wilayah 77.379 Ha. Sebagian besar wilayah digunakan sebagai lahan pertanian. Industri tekstil pun berkembang di daerah ini, terutama di sekitar perbatasan antara Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, dan Kota Surakarta. Selain itu, wilayah Karanganyar yang senjuk dan berada di dataran tinggi membuat industri pariwisata dan perhotelan menjadi salah satu yang berkembang.

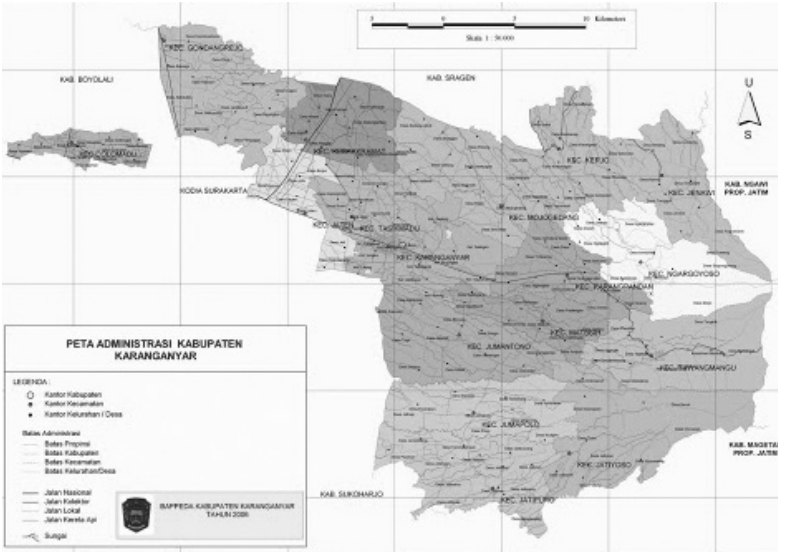

Gambar 6
Peta Kabupaten Karanganyar

Daerah Palur, menjadi pintu keluar masuk angkutan dan transportasi jalur tengah antara antar provinsi, dari Jawa Timur ke Jawa Tengah (Surakarta). Wilayah ini disebut juga dengan jalur Negara, karena menghubungkan kota Yogyakarta-Solo-Surabaya. Sementara ibukota Kabupaten berada di jalur Solo-Tawangmangu-Sarangan-Magetan-Madiun.

Pada tahun 2017 jumlah penduduk kabupaten Karanganyar sejumlah 871.596 jiwa, terdiri dari laki-laki 430.975 jiwa dan perempuan 440.621 jiwa. Artinya, dari 100 perempuan ada 98 laki-laki. Sedangkan tingkat kepadatan penduduknya mencapai 11,264 jiwa/km2. Jumlah ini

mengalami peningkatan selam 7 tahun terakhir. Pada tahun 2010 mencapai 814.907, meningkat pada tahun 2016 di jumlah 864.021 jiwa dan mengalami peningkatan lagi di tahun 2017 menjadi 871.596 jiwa.

Tabel 10
Jumlah Penduduk Kabupaten Karanganyar

Tahun	Jumlah Penduduk
2010	814.907
2016	864.021
2017	871.596

Sumber: Karanganyar dalam angka, 2018

Sementara itu, jumlah tempat beribadah yang ada di Kabupaten Karanganyar sebanyak 2.492 Masjid, 3.493 buah, terdiri dari 18 gereja katolik, 25 Pura, 175 Gereja Kristen, 5 vihara. Jumlah ini tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan dari tahun sebelumnya.

Pemeluk 5 agama di Kabupaten Karanganyar dapat terakamodosi dengan baik dalam hal peribadatannya. Rumah ibadah pemeluk agama Islam tetap terbanyak di antara tempat ibadah lain, yang terdiri dari 2.492 masjid dan 778 mushola, Gereja Protestan sebanyak 175, gereja Katolik 18, 25 Pura, dan 5 Wihara.

Tabel 11
Daftar Pemeluk Agama di Kabupaten Karanganyar

No	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1	Jatipuro	38.825	207	140	0	40	-
2	Jatiyoso	39.788	216	29	4	21	-
3	Jumapolo	40.892	137	2.524	1	17	-
4	Jumantono	47.572	292	115	1	32	-
5	Matesih	44.028	502	134	8	10	-
6	Tawangmangu	45.851	675	158	11	22	-
7	Ngargoyoso	33.487	435	24	679	12	-
8	Karangpandan	41.506	782	123	10	6	-
9	Karanganyar	78.039	1.837	1.199	40	17	-
10	Tasikmadu	58.493	1.067	790	33	0	-
11	Jaten	69.642	4.619	2.850	100	52	-
12	Colomadu	54.657	4.474	2.371	68	46	1
13	Gondangrejo	67.278	3.018	452	4	8	-
14	Kebakkramat	59.213	844	480	4	13	-
15	Mojogedang	63.879	645	186	214	0	-
16	Kerjo	35.569	393	143	4	45	-
17	Jenawi	23.857	505	252	1.439	5	-
Karanganyar		838.576	20.648	11.970	2.620	346	1

Sumber: Karanganyar dalam angka, 2018

Tabel 12

Jumlah tempat ibadah di kabupaten Karanganyar

No	Kecamatan	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara
1	Jatipuro	118	23	7	1	-	1
2	Jatiyoso	143	33	7	-	-	1
3	Jumapolo	144	27	4	4	-	-
4	Jumantono	202	55	11	1	-	-
5	Matesih	168	40	7	1	-	-
6	Tawangmangu	128	37	8	1	2	1
7	Ngargoyoso	134	25	7	-	6	-
8	Karangpandan	159	39	11	-	1	-
9	Karanganyar	232	36	10	1	-	1
10	Tasikmadu	117	62	7	2	-	-
11	Jaten	136	35	17	1	-	-
12	Colomadu	98	90	16	1	-	-
13	Gondangrejo	185	71	24	1	-	-
14	Kebakkramat	127	63	9	1	-	-
15	Mojogedang	191	76	14	1	2	-
16	Kerjo	116	46	7	1	-	1
17	Jenawi	94	20	9	1	14	-
Karanganyar		2.492	778	175	18	25	5

Sumber: Karanganyar dalam angka tahun 2018

Radikalisme di Solo Raya

Wilayah Solo Raya yang terdiri dari 6 kabupaten (Sukoharjo, Klaten, Wonogiri, Boyolali, Karanganyar dan Sragen) dan 1 kota (Surakarta) telah menjadi laboratorium studi radikalisme sosial keagamaan di Indonesia.

Secara sosiologis, Solo Raya juga dikenal sebagai "sumbu pendek" karena memiliki akar konflik yang panjang dari masa ke masa, bahkan siklusnya terjadi setiap dua dasawarsa. Di sisi lain, Solo Raya juga dikenal sebagai basis gerakan Islam garis keras ditandai dengan munculnya beragam kelompok Islam yang berpaham intoleran radikal. Mereka lebih suka menggunakan pendekatan kekerasan (*violence approach*) dalam menyikapi suatu permasalahan sosial keagamaan di masyarakat apabila dinilai sudah melanggar kaidah norma dan agama. Pola yang digunakan dalam berbagai kekerasan tersebut antara lain berupa ancaman, penggrebekan, bentrokan antar komunitas masyarakat, *sweeping*, intimidasi, dan pemaksaan.

Munculnya kekerasan berbasis agama di Solo Raya disebabkan oleh empat faktor pemicu, yaitu masalah ideologi, perbedaan keyakinan agama, kekerasan terhadap praktik budaya, dan diskriminasi komunitas agama lain. Masalah ideologi terlihat dalam tindak kekerasan yang dilakukan oleh Lembaga Umat Islam Surakarta (LUIS) bersama dengan Front Pembela Islam (FPI) Surakarta terhadap anggota Papernas (Partai Persatuan Nasional) yang melakukan Konferda II di Surakarta dan Sukoharjo tahun 2006. LUIS maupun FPI menilai Papernas hendak mengembangkan ideologi komunis yang terlarang di Indonesia. Sejak Orde Baru berkuasa, isu komunisme merupakan isu yang dipakai dan efektif untuk memojokan masyarakat tertentu. Melalui stigma komunisme, individu dan kelompok tersebut dijadikan dan menjadi musuh utama pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat. Penyerangan dan penghentian Konferda Papernas DPD II Sukoharjo dan Surakarta pada tahun 2006 oleh sebuah kelompok yang menamakan diriya sebagai musuh utama Papernas yang dinilai sebagai kelompok pengusung ideologi komunis gaya baru. Penyerangan tersebut tidak hanya terjadi di Surakarta, juga di kota Malang, Yogyakarta dan Jakarta.[1]

Sedangkan perbedaan keyakinan agama terlihat pada kasus kekerasan yang disebabkan adanya perbedaan pemahaman keagamaan dan keyakinan yang dilakukan oleh

[1] Lihat *www.mediakeberagamaan.com*. Diakses tanggal 1 Juni 2011.

Front Pembela Islam (FPI), Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) kepada aktivis LSM Insan Emas pada Juni 2007. FPI dan LUIS membubarkan acara seminar dan dialog antar umat beragama dengan cara kekerasan fisik dan intimidasi. Pembubaran tersebut dilatarbelakangi oleh sebuah penilaian terhadap Insan Emas dianggap menyebarkan paham pluralisme yang diharamkan MUI. Kasus lain terjadi juga pada tahun 2009 dimana dua laskar tersebut melakukan pelarangan acara bedah buku yang berjudul: "Pendidikan Perdamaian Berbasis Islam" yang diterbitkan oleh Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial (PSBPS UMS).

Selanjutnya, kasus kekerasan terhadap praktik budaya dan tradisi lokal terlihat dari *sweeping* yang dilakukan oleh laskar Front Pembela Islam terhadap acara tahlilan dan pernikahan yang menggunakan *janur* (daun kelapa muda) di kelurahan Joyosuran Pasar Kliwon Surakarta. Kekerasan lain terungkap pada aksi yang dilakukan oleh Laskar Hizbullah yang mendatangi kantor Solo Radio pada 14 September 2009. Mereka menuntut kepada manager Solo Radio menyampaikan penyataan maaf secara lisan dan tulisan karena media penyiaran tersebut memutar lagu Genjer-Genjer. Laskar Hizbullah menganggap Solo Radio telah menyebarkan paham komunis di Surakarta.

Faktor pemicu keempat adalah diskriminasi kepada komunitas agama lain. Aksi kekerasan dan intimidasi dilakukan

kepada masyarakat yang akan mendirikan rumah ibadah dengan mempersoalkan aspek Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tempat ibadah yang dinilai kurang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana diatur oleh regulasi. Kasus tersebut terjadi terhadap IMB GKAI Gebang Kadipiro Surakarta (2006), IMB GKJI Kristus Gembala Serengan (2007), IMB GSJA Bukit Sion Serengan (2007), IMB GBI Kenteng Baru Pasar Kliwon (2007), dan IMB GPPS Mojosongo Jebres (2010).

***

BAB 4

Pencegahan Radikalisme Berbasis *Community Resilience* dan *Social Cohesion*

Pencegahan Radikalisme Berbasis *Community Resilience*

Radikalisme yang mengarah kepada kekerasan sosial keagamaan di Solo Raya secara umum disebabkan oleh empat faktor, yaitu: *Pertama*, faktor rasial; *Kedua*, faktor politik, seperti konflik yang bersifat politik ada dua, yaitu dampak politik makro (nasional) dan politik mikro (regional). *Ketiga*, faktor ekonomi, dan faktor ini merupakan faktor yang dominan, seperti terjadinya krisis pangan pada tahun 1966. *Keempat,* faktor segregasi sosial.

Sejarah mencatat bahwa konflik yang bersifat rasial pernah terjadi di Surakarta diantaranya tawuran Kong Sing Cina-Jawa pada tahun 1911, konflik pribumi (abang becak)

dengan etnis Arab pada tahun 1972, dan konflik pemuda Tionghoa dengan Jawa pada September 1980 (Mulyadi, 2012: 46).

Konflik sosial lain yang muncul ke permukaan adalah adanya pengaruh dari situasi politik makro di Indonesia pada tahun 1911 yaitu terjadinya peristiwa Sarikat Islam, revolusi sosial anti Swapraja tahun 1946, peralihan kekuasaan dari Orde Lama (Soekarno) ke Orde Baru (Soeharto) pada tahun 1965, dan kerusuhan reformasi tahun 1998. Sedangkan yang bersifat mikro (regional) di antaranya adalah (1) benturan konsep Vorst Domain vs Volks Domain yang berakibat munculnya Sarekat Hindia tahun 1919 dalam kasus H. Misbach, (2) lahirnya pemogokan buruh kereta api tahun 1924, (3) pergeseran konsep projo kejawen menuju konsep kolonial dan modern yang mengakibatkan terjadinya revolusi sosial tahun 1946.

Sederetan peristiwa kekerasan sosial di Solo sampai tahun 1998 atau dapat disebut pra reformasi disebabkan secara dominan oleh kepentingan politik, ekonomi dan budaya. Namun demikian, telah terjadi pergeseran latar belakang dan motif munculnya konflik sosial di Solo Raya pasca reformasi, yaitu dimasukkannya aspek agama sebagai pemantik (*trigger*) ketidakstabilan situasi sosial di masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya yang sistematis, terukur dan berkelanjutan yang dapat menciptakan sebuah imunitas atau

kekebalan sebagai modal untuk membangun masyarakat yang kuat.

Kesadaran akan pentingnya langkah antisipatif dari masyarakat Solo Raya telah mengemuka dan menjadi wacana dalam berbagai forum pertemuan antar tokoh masyarakat, pejabat dan organisasi sosial keagamaan. Masyarakat perlu mengidentifikasi dan mengetahui adanya potensi tindak kekerasan sosial keagamaan, termasuk radikalisme agama yang bersifat rasial dan laten. Oleh karena itu diperlukan tindakan yang bisa memperkuat tatanan sosial kemayarakatan melalui; *pertama*, membangun ketahanan masyarakat (*community resilience*); *kedua*, meminimalisasi adanya ketimpangan ekonomi sehingga tidak terjadi kelas juragan dan kelas pembantu (budak); dan *ketiga*, mencermati akar-akar kerusuhan yang bersifat *local genius*.

***

Kesadaran Pluralitas *(Plurality Consciousness)*

Masyarakat Solo Raya dalam membangun ketahanan masyarakat (*community resilience*) untuk menangkal radikalisme agama paling tidak dilakukan dengan dua hal: pertama, penguatan *civil society* sebagai *counter* gerakan dan wacana radikalisme agama; dan kedua, ketahanan budaya (*culture resilience*). Hal tersebut tercermin dari berbagai radikalisme dan kekerasan atas nama agama yang terjadi di Surakarta telah mendorong masyarakatnya mengalami perubahan ke arah positif, yakni adanya kesadaran pluralitas (*plurality consciouness*) yang bisa meminimalisir adanya tindakan radikalisme agama.

Sebagai kekuatan *civil society*, kedewasaan masyarakat Surakarta dalam menghadapi pluralitas dapat dilihat dengan membentuk simpul-simpul sosial keagamaan sebagai bentuk kesadaran pluralitas dan penguatan ketahanan sosial budaya sipil (*civic culture*). Hal tersebut dilakukan sebagai media untuk perekat kehidupan yang

damai di tengah pluralitas masyarakat Solo Raya. Munculnya gerakan keagamaan *mainstream* di ruang publik yang aktif mengampanyekan Islam *rahmatan li al-'âlamîn* sebagai bentuk penangkalan terhadap radikalisme keagamaan di wilayah ini. Selain gerakan keagamaan *mainstream* yang dilakukan oleh organisasi keagamaan yang sudah ada seperti NU, di Solo Raya bermunculan fenomena kebangkitan gerakan keagamaan dengan corak sufisme seperti Jamaah Muji Rosul (JAMURO), Jampi Sanubari, Ar-Raudhah, Tali Jiwa, Jamuri, Ahbabul Musthofa, dan Hubbun Nabi.

Kelompok-kelompok tersebut umumnya lahir dari respons terhadap kekerasan agama yang ditampilkan oleh kelompok anti-dialogis seperti kelompok Islamisme bercorak salafi-haraki yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap gerakan Islam radikal di Solo Raya, seperti Pesantren Al-Mukmin Ngruki, Pesantren Darul Syahadah, dan Pesantren Isy Karima Karanganyar. Pesantren di atas menjadi pusat *harakah* dari berbagai pesantren yang ada di daerah sekitarnya, seperti Pesantren Ulil Albab dan Darul Hijrah Sukoharjo, Yayasan Al-Madinah, MMI, JAT, JAK, JAD, Jama'ah Al-Islam Gumuk, Yayasan Al-Baniy Matesih, Yayasan Al-Manar, YAPI Wonosari, Al-Istiqlal, dan Ibnu Abbas Klaten serta beberapa gerakan keagamaan yang bercorak radikal.

Di sisi lain, gejolak fanatisme atas nama agama di Surakarta mulai muncul ke permukaan, hal ini bisa dilihat dari

beberapa kasus antara lain:

Pertama, Kota Surakarta memiliki stigma sebagai kota yang melahirkan teroris. Stigma tersebut bisa dirunut pada hampir setiap isu teroris yang mengemuka bisa dipastikan ada warga Solo Raya yang menjadi aktor tersangkanya. Misalnya pada tanggal 16-17 September 2009 di Mojosongo, Solo, Jawa Tengah, 4 tersangka teroris yang paling dicari tewas oleh Densus 88 Antiteror. Keempat tersangka adalah: Noordin M. Top, Bagus Budi Pranoto alias Urwah, Adit Susilo alias Hadi, Aryo Sudarso alias Aji. Pada tahun Mei 2010 juga ditangkap 5 orang yang diduga kuat sebagai jaringan teroris.

Kedua, Kota Surakarta memiliki tingkat konflik keberagamaan yang berujung pada pelanggaran terhadap kebebasan beragama. Tercatat berbagai aktifitas dari kelompok tertentu terhadap kelompok lain atau masyarakat yang dinilai tidak benar secara sepihak telah terjadi di wilayah ini, yaitu:

1. *Sweeping* toko buku penjual majalah Play Boy (2006)
2. *Sweeping* kegiatan Yasinan (2007)
3. *Sweeping* acara perkawinan dengan menggunakan Janur (2007)
4. Tuduhan kristenisasi pada Kegiatan pendidikan keterampilan di Gereja St Petrus Purwosari, Laweyan (2007)
5. Pembubaran diskusi lintas agama (2007)

6. Penyesatan terhadap Jamaah Ahmadiyah (2008)
7. Pelarangan berujung pembubaran pembuatan film Lastri yang disutradarai oleh Eros Jarot (2008)
8. Penyesatan Buku PSB UMS (Pendidikan perdamaian Berbasis Islam) dan tuntutan ditarik dari peredaran (2009)
9. Kegiatan Nasi Murah Kemanusiaan GKJ Manahan (2009)
10. Sweeping tempat hiburan malam dan tempat penampungan (2009)
11. Sweeping Solo radio, karena memutar lagu Genjer-genjer (2009)
12. Aksi penolakan pemakaman jenazah teroris (2009)

Keberadaan gerakan keagamaan *mainstream* di Solo Raya yang bercorak sufism mengusung pola keberagamaan humanis yakni wajah Islam terlepas dari nuansa fanatisme dan ekskluvisme yang menjadi pemicu radikalisme agama. Keberadaan kelompok keagamaan *mainstream* ini selain sebagai *counter* narasi dan gerakan sekaligus menjadi kekuatan *civil society* yang menjadi basis massa dalam menguatkan pola keberagamaan masyarakat Solo Raya sekaligus sebagai alternatif sufistik berupa praktik keberagamaan yang inklusif, toleran, dan menekankan keterbukaan di tengah masyarakat multikultural.

Implementasi praktik keberagamaan yang diusung kelompok *mainstream* ini berbasis pada wacana

multikulturalisme tersebut sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran saling menghargai, menghormati, dan toleransi untuk menghindari adanya kekerasan atas nama agama dan ancaman diintegrasi masyarakat Solo Raya. Kelompok keagamaan *mainstream* seperti Nahdlatul Ulama (NU), Ahbabul Musthofa, Jamuro, Jamuri, Tali Jiwo, Hubbun Nabi, Ar-Raudhah, dan Jampi Sanubari menjadi media kultural yang efektif karena bersifat terbuka tidak memandang stratifikasi sosial, tidak ada yang diistimewakan. Karena itu, kelompok keagamaan ini menjadi kekuatan *civil society* untuk melakukan gerakan sosial dengan framing Islam ramah yang menjadi *counter* narasi radikalisme agama seklaigus menjadi titik kumpul dan alat untuk menanamkan multikulturalisme, perbedaan pandangan keagamaan, madzab, cara keberagamaan, dan upaya menciptakan kehidupan yang harmonis antar elemen yang berbeda di Solo Raya.

***

Kerjasama Lintas Organisasi

Upaya masyarakat Solo Raya dalam membangun ketahanan komunitas (*community resiliency*) dilakukan dengan menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan antar elemen yang secara empirik dapat dilihat dari beberapa macam aktifitas dan kegiatan yang dilakukan oleh individu tokoh, kelompok maupun masyarakat yang mencakup sektor agama, pendidikan, sosial dan birokrasi. Respons terhadap munculnya kekerasan di masyarakat dan berbagai peristiwa teror yang secara langsung maupun tidak langsung mengancam keamanan lingkungan, individu dan rasa persatuan telah melahirkan sebuah kesadaran di masyarakat untuk mempertahankan eksistensi kebersamaannya melalui kerjasama lintas agama, organisasi dan golongan sesuai dengan konteks dan kebutuhan. Kerjasama yang dibangun oleh masyarakat Solo Raya sudah berlangsung lama dan biasanya didasarkan pada isu dan situasi yang dihadapi sehingga sifatnya bisa permanen dan atau insidental.

Forum Suara Hati Kebersamaan Bangsa (FSHKB) misalnya, merupakan sebuah wadah bagi para pemimpin

agama dari berbagai komunitas di Solo yang lahir untuk mengantisipasi dan mensikapi akibat yang lebih luas setelah peristiwa kerusuhan Mei 1998. Forum yang difasilitatori oleh KH Dian Nafi, pengasuh pondok pesantren Al Muayyad Windan dan sekaligus sebagai anggota, bekerja bersama untuk mencegah meluasnya kejadian konflik dan kekerasan antar komunal. Mereka siaga kapanpun dibutuhkan untuk melakukan kegiatan dan aksi perdamaian (Pohl, 2009). Berbasis di pondok pesantren Windan, KH Dian Nafi juga mendirikan *Interfide* (Institut Dialog Antar Iman) Windan yang tujuannya untuk membangun perdamaian di masyarakat, dialog antar agama serta mempromosikan demokrasi, pluralisme, dan keadilan gender.

Organisasi berbasis institusi lintas agama yang ada di Kota Solo adalah Lembaga Perdamaian Lintas Agama dan Golongan). LPLAG adalah suatu lembaga yang terdiri dari sejumlah tokoh agama dan aktifis perdamaian di Surakarta yang terbentuk dari aspirasi murni masyarakat Surakarta. LPLAG merupakan lembaga nonprofit bersifat independen dan merupakan gerakan berbagai tokoh agama, masyaratkat serta golongan untuk membangun Solo sebagai kota damai. Pada awalnya, lembaga ini berbentuk forum yang secara resmi didirikan pada tanggal 23 Pebruari 2003. Prasetyo (2013) menyatakan bahwa tujuan dari didirikannya forum ini adalah untuk menjaga kondusifitas Kota Surakarta. Seiring dengan

dinamika dan kebutuhan organisasi, lembaga ini pada tahun 2019 berubah bentuk menjadi Yayasan Perdamaian Lintas Agama dan Golongan (YPLAG). Tokoh-tokoh agama yang aktif dalam Yayasan ini antara lain Achmad 'Hilmi' Sakdillah dan Al Munawar (Nahdlatul Ulama), Bambang Mulyatno dan Paulus Hartono (Pendeta), Zon Vanel, KH Dian Nafi (Pondok Pesantren) dan Suharso (LDII).

Kegiatan lembaga ini dilakukan secara terencana dan konsisten antara lain mengirimkan peserta pelatihan perdamaian tingkat Asia Pasifik di Mindanao Filipina yang diselenggarakan oleh Mindanao Peacebuilding Institute (MPI), Konferensi Pemuda Nusantara untuk Perdamaian Indonesia, Seminar Perempuan dan Perdamaian Kota serta Pelatihan Perdamaian untuk Institusi Berbasis Agama. Menurut Al Munawar, kondisi sosial politik masyarakat Solo Raya setelah berlangsungnya Pemilu Pemilihan Presiden 2018 semakin mengkawatirkan, sehingga perlu ada uluran tangan dari semua pihak termasuk pemerintah untuk ikut mengurai masalah tersebut pada tingkatan akar rumput.

> '… fenomena kerentanan sosial saat ini lebih tampak, lebih mengkhawatirkan dan sudah tidak main-main lagi… oleh karena itu perlu segera untuk ditangani melalui pembangunan manusia Indonesia yang secara kualitas sudah ketinggalan. Selain itu, masalah radikalisme sudah mengakar di masyarakat sehingga

> harus dicegah sebelum tumbuh berkembang, perlu dikurangi dan diobati, kalau perlu diamputasi agar tidak menjalar lebih luas. Radikalisme tidak hanya terjadi di masyarakat, tetapi sudah masuk ke jalur pendidikan dan sektor pemerintahan. Lembaga pendidikan Play Group, TK dan Sekolah Dasar sudah diarahkan kepada ideologi anti Pancasila. Kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menangani masalah radikalisme yang diwujudkan dengan sikap tegas terhadap organisasi yang sudah dilarang, termasuk pendukungnya. Selain itu, Pancasila harus ditegakkan dan amalkan dalam setiap kehidupan termasuk di dunia pendidikan yang dilandasi oleh kebijakan local, (local wisdom), sopan santun, tata krama, dan akhlakul karimah. Kembalikan Ke Solo Tempo Dulu. Semua upaya tersebut juga harus didukung dan dimulai dari pendidikan keluarga dimana nilai-nilai dasar kebaikan ditanamkan…'(FGD Solo, 4 Juli 2019).

Sementara itu, upaya untuk membangun perdamaian bagi anak muda dilakukan dengan mendirikan Pusat Studi Agama dan Perdamaian (PSAP) pada tahun 2014 di wilayah Solo. PSAP bertujuan untuk mewujudkan persaudaraan kemanusiaan melalui pemberdayaan masyarakat agar bisa berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan perdamaian, kesejahteraan, keadilan, demokrasi dan kelestarian lingkungan hidup di kota Surakarta dan sekitarnya (Aijudin, 2017; Kurniasih

2019). Untuk mewujudkan tujuan tersebut PSAP, lembaga PSAP yang dipimpin oleh seorang dosen muda Anas Aijudin menjadikan lembaga sebagai tempat untuk: 1) kajian agama dan filsafat; 2) diskusi pengembangan wacana dalam bidang perdamaian, keadilan, demokrasi, gender, kearifan lokal dan kelestarian lingkungan hidup; 3) pemberdayaan masyarakat lintas agama, suku, dan golongan; 4) pendampingan bagi masyarakat korban konflik sosial dan agama, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan kerusakan lingkungan hidup.

Langkah yang ditempuh PSAP untuk membuka dialog dan kajian secara akademik dan terbuka tersebut relevan dengan fenomena gerakan radikal yang sudah memasuki dunia kampus, sehingga diperlukan adanya pendekatan ilmiah didasarkan pada fakta ekpirik dan rasional. Ahmad Syarifudin, mahasiswa IAIN Surakarta jurusan Manajemen Bisnis Syariah yang juga aktifis organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), menyatakan bahwa kampus menjadi ladang untuk pengembangan ideologi transnasional. organisasi HTI (HizbutTahrir Indonesia) masuk ke kampus dengan mendirikan kelompok kajian MUSTANIR di IAIN Surakarta dengan mengedepankan tokoh yang menguasai bidang pendidikan dan bahasa Arab. Masuknya organisasi tersebut karena lembaga pendidikan tinggi ini dipandang sebagai institusi agama yang secara simbolik memiliki relasi dengan Islam berupa nama, penampilan dan cara berpakaian mahasiswa dan dosennya.

Dengan dibubarkannya organisasi HTI oleh pemerintah bukan berarti ideologi yang diusung untuk mendirikan khilafah di Indonesia sudah selesai, namun perlu ada upaya yang serius dan sistematis dari semua pihak. Ahmad Syarifudin menyatakan:

> '…radikalisme tidak selesai dengan mendemo keberadaan HTI yang tidak sejalan dengan ideologi Pancasila dan dibubarkannya organisasi tersebut oleh pemerintah, namun perlu ada upaya nyata yang dimulai dari deteksi dini terhadap mahasiswa baru untuk mengetahui sejauhmana tingkat pemahaman keagamaan mereka. Sudah ada skenario yang mengawal mahasiswa untuk bergabung dengan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dan organisasi mahasiswa tertentu… dan hal ini disponsori oleh partai tertentu…Oleh karen itu, diperlukan pendekatan akademis dan ideologis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan referensi kuat tentang Islam. Upaya ini harus melibatkan peran orang tua, keluarga dan masyarakat' (FGD Solo, 4 Juli 2019).

Menyikapi pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam pencegahan radikalisme, diperlukan adanya kesadaran dan tindakan nyata dari elemen masyarakat untuk memahami bahaya radikalisme bagi masa depan bangsa Dengan adanya pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang radikalisme akan menjadi bekal bagi orang tua dalam melakukan pencegahan

diri terhadap proses penyebaran ideologi radikal di masyarakat. Pentingnya kesadaran tersebut sebagaimana telah dilakukan oleh Muthiah Chudlori sebagai ketua Pengurus Cabang Muslimat NU Kabupaten Sragen melakukan sosialisasi kepada jamaah pengajian dan anggota organisasi dari tingkat ranting (kelurahan) tentang bahaya radikalisme bagi pembangunan perdamaian, toleransi, dan keutuhan bangsa. Masyarakat juga perlu aktif dan peduli terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di sekitarnya dan melaporkan serta berkordinasi dengan pihak aparat terkait dengan isu radikalisme terorisme seperti adanya kejadian bom di Gemolong Sragen. Muthiah menandaskan bahwa:

> '... meskipun secara langsung organisasi Muslimat tidak terkena dampaknya, tetapi kami selaku warga negara memiliki kewajiban untuk menjaga jamaah dan anggota organisasi dari pengaruh ideologi radikal. Muslimat bekerjasama dengan Polres Sragen melakukan sosialisasi tentang anti radikalisme. Jamaah juga harus melek teknologi teruatama penggunaan *handphone* yang sudah menjadi media untuk penyebaran ideologi radikal. Radikal tidak selalu dengan bom, tetapi sikap yang menonjolkan keakuan, tidak toleran, tertutup atau eksklusif, merasa paling benar sendiri, mudah menyalahkan pendapat orang lain yang tidak sepaham

> dengan dirinya serta tidak mau mengakui NKRI adalah gejala yang mengarah kepada sikap radikal. Pemahaman terhadap fenomena tersebut perlu dimiliki oleh jamaahnya.' (FGD Sragen, 5 Juli 2019).

Selain melakukan upaya membangun ketahanan jamaah secara internal lewat jalur struktural, selaku pimpinan organisasi perempuan di bawah Nahdlatul Ulama, Muthiah Chudlori juga aktif di penjangkauan HIV/ AIDS dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Forum Kordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Tengah. Mengingat penyebaran ideologi radikal juga sudah masuk ke jalur pendidikan SMA/ SMK, maka materi anti radikalisme perlu diberikan kepada siswa baik secara terpisah melalui kegiatan Rohis atau disisipkan dalam mata pelajaran agama. Oleh karena itu menurutnya guru agama harus dibebaskan dari pengaruh faham radikal dan pembinaan terhadap guru agama perlu dilakukan secara intensif agar anak didiknya bisa terhindar dari indoktrinasi di sekolah. Guru agama ataupun guru sekolah yang tidak mau ikut upacara bendera harus diberi catatan dan pembinaan khusus dari Kementerian Agama atau Dinas Pendidikan.

Masuknya ideologi radikal di kalangan siswa disampaikan oleh salah satu guru SMAN 1 Sragen (Fulan: bukan nama sebenarnya) yang melihat adanya buku pelajaran agama khusus yang berjudul Tauhid jilid 1-6, selain buku paket dari Kementerian Agama. Isi dari buku tersebut adalah

menyudutkan amaliyah kelompok lain, bukannya memberikan ruang bagi siswa untuk mengetahui berbagai kelompok dan pendapat dalam agama. Materi tersebut hanya diajarkan oleh guru tertentu yang tidak sesuai dengan bidang mata pelajaran agama, tetapi guru Sain. Artinya, mata pelajaran agama tidak diampu oleh guru agama yang sesuai dengan tugas dan kompetensinya, meskipun di sekolah tersebut memiliki guru PAI 4 orang. Fulan menggarisbawahi bahwa proses radikalisasi di sekolah jelas ada dan dilakukan secara sistematis dan terukur:

> '...indikasi adanya faham radikal di kalangan siswa terlihat dari pasca peristiwa pembakaran bendera 'wala' di Bogor yang direspon oleh siswa dengan mengubah Foto Profil (Display Picture) di *handphone* mereka menjadi bendera tauhid. Selain itu, penolakan program kunjungan sekolah ke Denpasar Bali dilakukan melalui grup Whatsapp dengan simbol 'RAPATKAN BARISAN'. Kedua kejadian tersebut merupakan fenomena di sekolah yang cukup memperihatinkan, karena siswa sudah menjadi sasaran ideologisasi kelompok tertentu. Siswa juga dilarang untuk mendatangkan grup musik untuk mengisi acara sekolah yang bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Rohis membuat acara kajian sebagai kegiatan 'tandingan' acara sekolah tersebut. Ikatan dan komunikasi Rohis

> dengan alumni cukup kuat bahkan alumni dijadikan mentor dalam setiap kegiatan, bukan guru agama yang seharusnya menjadi nara sumber. Guru Agama tidak diberi ruang dan materi yang proporsional dalam setiap kegiatan Rohis, karena dianggap memiliki afiliasi terhadap organisasi dan faham keagamaan yang berbeda.' (FGD Sragen, 5 Juli 2019)

Mensikapi fenomema radikalisme di sekolah, tokoh pemuda Sragen Habib Masduki menyatakan bahwa perlu upaya untuk mempersempit ruang gerak dan kesempatan agar penyebaran radikalisme tidak berkembang. Tumbuh suburnya radikalisme disebabkan adanya niat dari pelaku dan kesempatan yang ada, oleh karena itu harus ada perbaikan niat untuk menebarkan ajaran agama damai dan toleran serta menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Bila faham radikal sudah mengakar di masyarakat, maka perlu segera untuk diobati agar tidak menjadi sebuah anomali. Perlu adanya pendekatan dan sikap tegas dari aparat untuk mengurai masalah tersebut karena bila tidak tertangani dengan baik akan menjadi benih konflik di masyarakat yang mengancam masa depan perdamaian. Selain masalah keseriusan dalam penanganan, perhatian yang kurang terhadap guru agama yang berasal dari Dinas Pendidikan perlu di tingkatkan. Mereka memiliki tugas dan menjadi ujung tombak dalam pembinaan ideologi agama yang

mengajarkan toleransi dan perdamaian. Upaya yang konkrit untuk menangani persoalan radikalisme di sekolah harus menjadi agenda pemerintah.

Habib Masduqi yang juga aktif di organisasi Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI), sebuah organisasi persatuan pondok pesantren di bawah naungan Nahdlatul Ulama, menyatakan bahwa di wilayah kabupaten Sragen telah tumbuh lembaga pendidikan pondok pesantren yang banyak dan menjadi potensi untuk pencegahan faham radikal. Menurutnya, terdapat 173 buah pondok pesantren pada 2018, 27 diantaranya memenuhi persyaratan sebuah pondok pesantren (*arkanul ma'had*) dengan klasifikasi 103 lembaga berhaluan Islam moderat dan 70 pesantren berafiliasi kepada ideologi moderat yang memiliki jumlah santri lebih besar. Disinilah peran dari Kementerian Agama untuk melakukan pembinaan dan pengawasan berkembangnya faham radikal melalui institusi pondok pesantren.

Tumbuhnya faham radikal di masyarakat juga terjadi di wilayah kabupaten Karanganyar dengan sasaran anak muda, lembaga pendidikan dan tempat ibadah. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus penangkapan warga oleh Detasemen Khusus Anti Teror (Densus 88) di kecamatan Karangpandan dan Gondangrejo. Menurut Agus Kandiawan dari kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol

Linmas) kabupaten Karanganyar bahwa di wilayahnya sudah ada infiltrasi atau penyusupan dari pihak luar daerah yang disebabkan oleh perpindahan penduduk atau karena faktor pernikahan.

Berdasarkan data Kesbangpol Linmas, terdapat 8 orang warga mantan nara pidana teroris, 12 orang masih dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Dari jumlah warga tersebut yang sudah kembali ke masyarakat tersebut 5 diantaranya sudah terbuka untuk komunikasi dan sosialisasi dengan masyarakat, sedangkan 3 orang lainnya masih bersikap tertutup dan tidak mau mendatangi undangan, tetapi apabila didatangi ke rumahnya mereka mau menerima.

Data lain menunjukkan bahwa terdapat tempat ibadah (Masjid) dan tempat pendidikan (pondok pesantren dan sekolah) yang tertutup, tidak bisa diakses oleh masyarakat umum. Indikator adanya faham radikal di sekolah yang anti Pancasila dan NKRI adalah mereka tidak mau mengadakan upacara bendera, mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta tidak mau memasang gambar presiden dan wakil presiden. Menyikapi fenomena tersebut, selaku institusi pemerintah bekerjasama dengan masyarakat dan aparat keamanan melakukan upaya pembinaan secara formal yang sifatnya persuasif. Agus Kandiawan mengatakan:

> '...untuk mencegah terjadinya penyebaran faham

> radikal di tempat ibadah, Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang kepengurusan takmir masjid yang ditangani oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra)… lembaga pendidikan yang tertutup dilakukan pembinaan tentang nilai kebangsaan, Pancasila, toleransi dan sikap gotong royong kerjasama dengan FORKOMINDA dan BIN… mereka juga diundang oleh Bupati untuk diajak dialog ketika ada acara resmi kenegaraan seperti upacara 17 Agustus. Selian itu kami juga melaksanakan pengawasan melekat terhadap para pendatang agar jelas identitas dan tujuannya.' (FGD Karanganyar, 5 Juli 2019).

Selain upaya tersebut, program yang dilakukan pemerintah adalah melakukan pendidikan wawasan kebangsaan, sosialisasi 4 pilar kebangsaan (Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-undang Dasar 1945) di setiap kecamatan dengan menguundang tokoh masyarakat, agama dan pemuda. Persoalan radikalisme bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah dan penegak hukum tetapi juga menjadi tanggungjawab masyarakat untuk secara proaktif melakukan deteksi dini dengan memberikan laporan kepada pihak berwajib bila di wilayahnya ada indikasi penyebaran faham radikal. Agus Kandiawan menambahkan bahwa saat ini metode penyebaran faham radikal tidakhanya dilakukan secara tatap muka langsung, tetapi sudah melalui media social sehingga secara teknologi sulit untuk dicegah. Disinilah

perlunya pengawasan dari orang tua dan masyarakat secara intensif terhadap perilaku anak dan orang di sekitarnya yang sudah mengarah ke faham radikal dan tertutup. Pendidikan agama yang benar dan keteladanan merupakan nilai-nilai yang harus ditanamkan secara terus menerus dan menjadi tanggungjawab bersama.

Keprihatinan terhadap berkembangnya faham radikal disampaikan juga oleh penyuluh agama di kecamatan Karangpandan, Ida Hamidah. Sebagai penyuluh, dia sering melakukan komunikasi dan interaksi dengan para guru SMA untuk berbagi informasi mengenai masuknya faham radikal di sekolah. Beberapa murid minta izin kepada guru akan menggunakan cadar dan mengenakan jilbab yang berukuran besar sampai menutupi pantatnya. Sang guru selanjutnya menyerahkan persoalan kepada guru Pembina Rohis, namun sayangnya Pembina Rohis sendiri sudah menjadi Pembina salah satu lembaga pendidikan yang terindikasi radikal. Realitas tersebut menggambarkan kompleksitas persoalan radikalisme di dunia pendidikan, oleh karena itu dia berpendapat:

> '...di sekolah perlu diberikan pendidikan wawasan kebangsaan di luar mata pelajaran yang sudah ada, karena orang tua sudah memasrahkan pendidikannya kepada pihak sekolah sehingga sekolah memiliki tanggungjawab terhadap masa depan anak didik akan nilai-nilai kebangsaan. Selain itu, guru Pembina Rohis

harus diseleksi secara ketat oleh Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama' (FGD Karanganyar, 5 Juli 2019).

Sekolah merupakan lembaga yang rawan untuk dimasuki faham radikal, baik yang dilakukan melalui kegiatan intra sekolah maupun ekstra. Dalam hal kegiatan intra, guru dan kepala sekolah serta pembina Rohis yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan. Sementara itu pada level pencegahan terhadap faham radikal di masyarakat, penyuluh bekerjasama dengan kepolisian melakukan penyuluhan tentang bahanyanya perilaku menyimpang dalam beragama. Penyuluh juga menjadi Dai Kamtibmas, sebuah gagasan yang dicetuskan oleh pihak kepolisian dengan melibatkan para tokoh agama untuk melakukan pengajian rutin di setiap kecamatan, majlis taklim dengan menyisipkan muatan-muatan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Dalam konteks membangun ketahanan masyarakat di Solo Raya sebenarnya sudah ditopang oleh keberadaan organisasi lintas agama yang bernama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang secara kelembagaan difasilitasi oleh pemerintah kabupaten/ kota. Keberadaan FKUB turut membantu menciptakan suasana keberagamaan di wilayah agar kondusif dan aman untuk ditinggali oleh siapapun tanpa memandang latar belakang agama, suku, ras dan golongan. Salah satu tugas penting yang diemban FKUB adalah turut membantu dalam merumuskan kebijakan terutama berkaitan dengan kerukunan

umat beragama dan memfasilitasi hubungan kerja dengan pemerintah daerah.

Sesuai dengan tugasnya, terdapat 5 hal yang menjadi garapan FKUB yaitu: 1). melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; 2) Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; 3) Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; 4) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan 5) Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Keberadaaan dan peran FKUB sebagai media untuk menjembatani dan mengkordinasikan berbagai kepentingan antar agama dirasakan penting untuk dijaga dan keaktifannya. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai benteng terhadap serangan ideologi radikal yang berasal dari media sosial dan transnasional yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia. Arti penting FKUB ini diungkapkan oleh Pendeta Bambang Mulyanto yang menyatakan:

> '…radikalisme dapat dilawan melalui intensitas pertemuan para tokoh dengan membangun dialog dan membenahi relasi antar agama sehingga

akan melahirkan sikap bijak dan toleran terhadap perbedaan. Agama hanya dipahami secara sempit dan menampakkan baju dan simbol agama bukan esensi agama yang mengajarkan perdamaian, toleransi dan saling menghargai. Radikalisme muncul dari pemahaman agama yang sempit, derasnya arus informasi lewat media sosial radikal yang berisi ideologi transnasional yang tidak sesuai dengan nilai kebangsaan, bertolak belakang dengan karakter akhlak mulia serta tindakan sosial yang eksklusif, tidak mau bergabung dengan kelompok lain. Relasi antar tokoh dan organisasi perlu dibenahi untuk menghidupkan kembali *local wisdom,* nilai kebangsaan, pemahaman terhadap perbedaan yang akan melahirkan sensifitas terhadap kelompok, termasuk pemilihan bahasa dan diksi yang digunakan dalam interkasi sosial…' (FGD Solo, 4 Juli 2019).

Di Sukoharjo, gerakan untuk menjaga kebhinnekaan, persaudaraan, perdamaian dan persatuan masyarakat diwujudkan dalam organisasi Jaringan Lintas Kultural (JLK). Jaringan ini dipimpin oleh seorang aktifis pemuda bernama Sofwan Faisal Sifyan yang memiliki sekretariat di Solo Baru, Grogol, Sukoharjo. JLK aktif melakukan berbagai kegiatan sebagai respon terhadap dinamika sosial politik di masyarakat. Dialog Publik bertema 'Mereka Telah Kembali & Kita Rajut Lagi Persaudaraan Kebangsaan' misalnya merupakan upaya JLK

untuk membahas persoalan anggota masyarakat Sukoharjo yang akan melakukan resosialisasi setelah menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan karena kasus terorisme.

Problematika radikalisme dan terorisme menurut Faisal sudah mengalami pergeseran arah dan telah meluas di lihat dari sisi ruang lingkup dan penanganannya. Penanganan terhadap mantan nara pidana terorisme yang telah bebas dan kembali ke masyarakat tidak hanya diperlukan upaya deradikalisasi ideologi untuk kembali ke NKRI, tetapi juga membantu mereka dalam persoalan sosial ekonomi. Upaya BNPT dan aparat Kepolisian dalam rangka pemulihan ekonomi dengan pelatihan ketrampilan dan wirausaha serta pemberian modal usaha belum mampu memberikan jaminan hidup dan mengembalikan ideologi seperti yang diharapkan. Mereka masih bekerja secara serabutan dan belum memiliki penghasilan yang tetap, sementara kebutuhan hidup untuk anak dan istri harus dipenuhi. Oleh karena itu perlu ada pendampingan kepada mereka melalui pendekatan dan strategi yang tepat agar tujuan utama proses resosialisasi dapat berjalan dengan baik. Faisal menyatakan:

> '...upaya yang dilakukan pemerintah lebih menekankan kepada tindakan pencegahan di masyarakat dan kurang menyentuh persoalan mereka (mantan napiter) secara riil sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi. Proses resosialisasi tidak hanya tertuju

kepada proses penerimaan masyarakat dan kemampuan mereka beradaptasi kembali secara sosial di masyarakat, tetapi mereka juga butuh KTP, SIM dan administrasi kependudukan lain yang dapat membantu mereka memiliki status sebagai warga negara. JLK melakukan proses reintegrasi ini dengan membantu 21 orang sebagai klien untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara. Selanjutnya, penggunaan istilah deradikalisasi meskipun dari sisi terminologi akademis tepat, namun diksi tersebut kurang disukai oleh mereka sehingga perlu digunakan istilah yang berbeda meskipun substansinya sama. ' (FGD Sukoharjo, 5 Juli 2019).

Fenomena menarik yang terjadi di lapangan adalah terjadinya pergeseran warna dan model pakaian yang digunakan. Para wanita (akhwat) yang biasanya memilih warna hitam dan berbentuk abaya sudah mengalamin perubahan warna cerah seperti pink dan modelnya pun sudah bergeser menggunakan jean dan T Shirt serta lebih kelihatan modist.

Selain persoalan mantan napiter, hal lain yang perlu disikapi oleh semua pihak adalah kembalinya para deportan dari Syuriah yang kurang mendapatkan perhatian ketika kembali ke tanah air lewat jalur Libanon dan mereka bergabung dengan Jamaah Ansharud Daulah (JAD) dan ISIS. Mereka berada dan berdomisili di beberapa daerah Solo Raya seperti Karanganyar, Boyolali, dan Sukoharjo.

Masyarakat Solo Raya secara faktual telah memiliki modal ketahanan yang cukup dalam menghadapi faham radikal. Hal tersebut dimanifastasikan dalam sikap dan tindakannya yang tidak setuju bahkan menentang dengan faham radikal terutama yang mengarah kepada terorisme. Data yang dihimpun dari para tokoh agama, pemuda, perempuan, akademisi, pemerintah, dan aparat keamanan di 4 kabupaten kota menunjukkan bahwa masyarakat Solo Raya mencintai kerukunan, perdamaian, toleransi dan tenggang rasa, dan saling menghormati di tengah perbedaan yang ada serta ingin mengembangkan nilai-nilai lokal yang sudah berkembang dan mengakar di masyarakat. Kepedulian masyarakat terhadap ancaman radikalisme yang berkembang di masyarakat ditunjukkan dengan adanya aksi nyata untuk mencegah penyebaran faham radikal dalam berbagai kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pengajian, diskusi, seminar serta pelatihan baik bersifat individu, organisasi maupun kerjasama dengan pihak terkait.

***

Komunikasi Budaya

Para budayawan Solo Raya mendorong pembangunan kesadaran pluralitas melalui aksi budaya (*cultural resilience*) seperti wayang kampung untuk mengkomunikasikan seni rekonsiliasi pri dan non-pri. Misalnya dengan lakon fei tsu chen digeber keluar masuk kampung yang selama periode konflik terjadi potret segregasi sosial kampung pribumi dan non-pribumi. Misalnya lakon itu digelar di kampung-kampung sekitar Pecinan Solo sehingga memperoleh tanggapan positif untuk mengapresiasikan lakon fei tsu chen sebagai lakon rekonsiliasi perkawinan antara etnik Cina dan Jawa.

Wayang kampung sengaja diproduksi untuk menggelar mobilitas kesenian yang tinggi, dalam pencapaian makna dan tujuan lakon-lakon yang bersifat rekonsiliatif. Karena itu, beberapa tema cerita selalu berorientasi pada nilai perdamaian. Untuk mengakomodasikan nilai-nilai rekonsiliasi itu, lakon yang digelar fei tsu chen di kampung Balong sebagai kampung pecinan Solo bulan Agustus 2000 sangat berhasil untuk mencerminkan pesan perdamaian antar etnik pri bumi dan non-pribumi (Ong Hok Ham 1998).

Komunitas wayang suket dengan menampilkan lakon sebagai bentuk sindiran (*satire*) wujud dari pemberdayaan masyarakat *wong cilik* untuk menjaga nilai-nilai rekonsiliasi dengan elit politiknya. Hal ini dikarenakan masyarakat Solo Raya adalah suku Jawa secara pandangan hidup lebih suka untuk menyimpan perasaannya dan tekanan (*ngrasani*, *ngudoroso*) dari pada langsung berhadapan (*adu arep*) untuk menyelesaikan persoalan sosial. Dengan pandangan hidup ini, memungkinkan terjadinya kekerasan atas nama agama atau radikalisme agama. Melalui budaya, masyarakat Solo Raya mengantisipasi adanya konflik dengan berbagai bentuk dan faktor penyebabnya. Mereka memiliki *paugeran* berupa *living tradition* Jawa "*rukun agawe santoso, crah agawe bubrah*" tetapi hal tersebut mendapat tantangan dan ujian dalam mewujudkan masyarakat Solo Raya majemuk, toleran, dan hidup saling berdampingan. Paling tidak, kedepan kehidupan harmonis tersebut akan dihadapkan pada persoalan radikalisme agama dan intoleran kelompok keagamaan Islam yang dewasa ini menjamur di Solo Raya.

Menurut Anas Saidi, secara sosiologis Solo Raya, terutama Surakarta adalah wilayah yang memberi kesempatan yang terbuka kepada paham apa saja untuk berkembang. Paham fundamentalisme dengan gerakan yang sering berbau kekerasan merasa mendapatkan lahan yang subur untuk dikembangkan di wilayah ini. Demikian juga paham

sekulerisme yang mengabaikan pentingnya moralitas publik untuk dilestarikan, termasuk dalam mencari keuntungan materi melalui cara-cara yang dianggap melanggar etika publik seperti: perjudian dan pelacuran, dalam banyak hal telah mendapatkan tempat yang paling nyaman di wilayah ini. Di samping itu, Solo Raya merupakan basis kaum abangan (Islam nominalis) yang paling nyata, sekaligus kantong spiritual aliran kebatinan yang menyebar.

Fenomena kekerasan atas nama agama persis seperti permainan politik yang memanfaatkan respons keagamaan menjadi perang sekuler. Meski dengan cukup hati-hati ia melihat sisi lain, yakni kemungkinan adanya perlawanan terhadap upaya menentang globalisme dan modernisme (Jurgensmeyer, 2001) Analisis ini didasarkan atas kesamaan dasar lahirnya masalah sosial yang diintroduksi ke dalam perjuangan agama. Lebih lanjut, Juergensmeyer, ada lima skenario yang dilakukan dan telah diterapkan masing-masing negara untuk mengakhiri radikalisme agama. Pertama, skenario kekuatan yang dilakukan dengan cara mengendalikan aktor-aktir pelaku radikalisme agama dengan jalan kekerasan (*violence approach*). Kedua, skenario ancaman pembalasan dengan kekerasan yaitu dengan memenjarakan untuk menakut-nakuti aktivis-aktivis keagamaan sehingga mereka ragu-ragu untuk melakukan aksinya. Ketiga, skenario dengan melakukan kompromi/negosiasi dengan para aktivis yang

terlibat dalam terorisme. Keempat, skenario pemisahan agama dari politik dan kembali pada landasan-landasan moral dan metafisika, artinya politisasi agama dapat dipecahkan melalui sekulerisasi. Model seperti ini justru menimbulkan reaksi keras dari aktivis-aktivis keagamaan radikal yang kadarnya semakin tinggi. Kelima, skenario yang mengharuskan pihak-pihak yang saling bertikai untuk menyerukan adanya saling percaya dan saling menghormati.

***

Memperkuat Jaringan Kelembagaan

Berbekal pada pengalaman, masyarakat Solo Raya semakin dewasa dalam memotret realitas radikalisme agama dengan bergantung pada bentuk *nature* dari radikalisme itu sendiri. Artinya, penguatan narasi dan pendekatan budaya (*cultural approach*) sebagai model *early warning system* dalam menangani radikalisme agama dengan pola memandirikan masyarakat dan penguatan ikatan sosial yang selama ini dinilai sudah agak kendor akibat arus modernisasi dengan memperkuat relasi dan jaringan kelembagaan dengan pemerintah, aparat, dan perguruan tinggi.

Beberapa program yang dilaksanakan secara kolaboratif dan bersama pemerintah kabupaten/ kota adalah keterlibatan dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol Linmas), Kelompok Kerja Penyuluh (Pokjaluh) Kementerian Agama, dan Balai Latihan Kerja (BLK) Kementerian Tenaga Kerja. Kegiatan tersebut bermuara pada konsep mengedepankan jaring keselamatan komunitas (*community safety net*) yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan seperti penguatan *baseline* data sebagai pondasi menetapkan kebijakan dan merumuskan intervensi program

reintegrasi sosial dengan memfasilitasi para aktor radikalisme agama untuk kembali hidup normal di tengah masyarakat. Berbagai program dilakukan dengan penguatan ekonomi, pemenuhan hak politik, dan rehabilitasi nama mereka di tengah masyarakat.

Kehadiran pemerintah dengan berbagai programnya di atas ternyata belum mampu menyentuh kalangan generasi milenial yang memang rentan terpapar radikalisme. Pola penyebaran dan pendekatan radikalisme telah mengalami perubahan paradigma *(shifting paradigm*) komunikasi dari *offline* ke *online* berbasis media sosial seperti *Facebook, WhatsApp, Line, Instagram*, dan *Skype*. Perubahan tersebut kurang diantisipasi dengan cepat oleh pemerintah sehingga generasi muda tidak bisa memperoleh rujukan yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Keprihatinan tersebut diungkapkan oleh seorang pejabat Kesbangpol Linmas Kabupaten Sukoharjo:

> … auto kritik saya kepada pemerintah adalah jangkauan pemerintah tidak sampai kepada bagaimana anak muda berislam melalui sosial media...Kita hanya bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya normatif… (Ardiyansah, 2019).

Selain itu, masyarakat Solo Raya terlibat aktif terhadap kegiatan perguruan tinggi seperti IAIN, UMS, dan UNS yang melakukan respon terhadap realitas social untuk membaca situasi awal terkait dengan radikalisme agama dan akar

masalahnya dilakukan untuk memperkaya analisis pengambil kebijakan. Kegiatan akademik seperti seminar, diskusi publik, lokakarya dan penelitian dilaksanakan dengan melibatkan tokoh masyarakat, perwakilan organisasi keagamaan dan sosial. Aktifitas tersebut dilakukan sebagai penguatan terhadap upaya deradikalisasi.

Kampus-kampus tersebut juga melakukan kegiatan deradikalisme agama melalui pengembangan dan kontekstualisasi ajaran agama dengan kondisi lokal seperti pengembangan sikap toleransi, menghormati perbedaan, dan penghargaan terhadap pluralitas. Pandangan ini sudah menjadi platform dan sejalan dengan pemikiran dari aparat sipil negara (ASN) yang berdinas di Kesbangpol Kabupaten Sukoharjo:

> … Pancasila hanya satu-satunya yang bisa menangkal radikalisme. Karena di situ ada ajaran untuk saling berbagi, saling bertoleransi, karena sadar bahwa di Indonesia tidak hanya Muslim tetapi berbagai agama di Indonesia mulai ribuan tahun yang lalu sudah hidup berdampingan, sudah saling kerjasama saling toleransi …(Ardiyansah, 4 Juli 2019).

Ketahanan budaya untuk deradikalisasi agama di Solo Raya dipahami sebagai gerakan kultural (*cultural movement*) yang dibangun oleh kelompok *civil society* mendorong tumbuh dan berkembangnya kemandirian pengetahuan masyarakat (*knowledge society*) termasuk dalam bidang politik dan agama.

Dalam konteks ini, gerakan kultural memberikan batasan pada bentuk etika dan moral politik. Ketahanan budaya ini sebagai upaya menanamkan kesadaran kritis pada masyarakat dengan memposisikan Islam sebagai kekuatan moral (*moral force*) dalam proses perubahan sosial. Sebab, dengan realitas masyarakat Solo Raya yang plural, kemampuan menemukan titik temu sangat menentukan dalam memberdayakan *civil society* (Wahid, 1994: 84).

Beberapa strategi *civil society* dalam membangun ketahanan budaya masyarakat Solo Raya antara lain: pertama, melakukan pemetaan *(mapping)* atas persoalan politik, keagamaan, dan kebangsaan termasuk penguatan berbagai potensi yang ada di masyarakat sebagai basis dari kekuasaan *civil society* yang akan dikembangkan. Kedua, menggerakan potensi sosial, politik, dan keagamaan *civil society* sesuai dengan bidang masing-masing. Ketiga, ke depan semua komponen *civil society*, masyarakat, dan pemerintah mempunyai kapasitas kemandirian. Fokus ketahanan budaya *civil society* masyarakat Solo Raya diarahkan untuk pengembangan pendidikan keagamaan yang moderat, dakwah yang merangkul, isu-isu kebangsaan, dan penguatan potensi lokal. Hal tersebut dilakukan *civil society* Solo Raya untuk menumbuhkan kesadaran dan kemandirian masyarakat atas dasar penguatan kultur sipil (*civic culture*) untuk pengembangan karakter dan identitas *al-diniyyah* dan *al-wathoniyah*.

> … Kesbangpol telah banyak melakukan upaya, salah satu upaya pencegahan adalah pemahaman kita terkait dengan wawasan kebangsan. Setiap tahun badan Kesbangpol ini melakukan pendidikan pengamalan empat pilar di masing-masing kecamatan dengan mengundang tokoh masyarakat dan tokoh agama. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, UUD 19545, NKRI, dan BhinekaTunggal Ika (Kandiawan, 5 Juli 2019).

Hal tersebut dilakukan menuju masyarakat Solo Raya yang terbuka, kekuatan *civil society* dan komunitas keagamaan *mainstream* menggerakan budaya masyarakat sipil (*civic culture*) serta mendorong Islam dijadikan sebagai wacana pembebas (*liberation discourse*) sebagai pengejawantahan harmonisasi hubungan antar agama. Jika Islam ditafsirkan sebagai bagian dari teosentris dan bersifat tekstual-literalis yang hampa dari ruang dan waktu, sehingga ketika wacana keislaman akan dibumikan secara praksis berubah wajahnya menjadi ”sesuatu” yang eksklusif, dogmatis, mengedepankan *truth claim*, dan mudah mengkafirkan orang lain.

Ketahanan budaya kelompok *mainstream* secara prinsip mendorong corak beragama berdasarkan pada akhlak yang mulia (*personal goodness*) dalam menyikapi pluralitas masyarakat Solo Raya, perbedaan madzab, ideologi, dan gerakan keagamaan. Budaya ”tidak menyalahkan” dan

"saling menjaga" yang diusung *civil society* ini dalam prinsip tasawuf dikenal dengan istilah *"takhalluqu bi akhlaqillah"* dan tauhid sebagai *"core values*" yang mengarahkan pada prinsip persamaan, persaudaraan, dan penghormatan pada pluralisme. Dalam bahasa agama dikenal dengan istilah *insan kamil* yakni manusia paripurna membuang jauh-jauh tabiat jelek, *hate speech*, fundamental, dan radikalisme agama.

Ketahanan budaya merupakan upaya mengharmoniskan hubungan agama dengan budaya lokal Solo Raya yang selama ini pola ini diberangus oleh kelompok radikal. Pola relasi yang baru antara agama dan budaya sebagai bentuk kritik terhadap pola keberagamaan kelompok Islam ideologis dengan mengedepankan formalitas simbol dan identitas keislaman. Pola ini menjadikan Islam ditafsirkan secara teosentris yang bersifat tekstual-literalis, hampa dari ruang dan waktu. Agama menjadi kering karena tidak mau bersentuhan dengan budaya. Agama dan budaya tidak saling tegursapa sehingga keduanya berada pada posisi *"single entity"* sehingga agama hanya semacam ruh tanpa ada raga yakni budaya. Hal ini menjadikan wacana keislaman ketika diimplementasikan secara praksis berubah wajahnya menjadi "sesuatu" yang eksklusif dan dogmatis.

Ketahanan masyarakat Solo Raya dalam menangkal radikalisme agama yang dilakukan baik melalui penguatan *civil society* maupun penguatan ketahanan budaya merupakan

upaya untuk menjaga keberlangsungan kehidupan sosial baik materaial maupun spiritual secara terus menerus. Bagian penting dari ketahanan masyarakat Solo Raya terletak pada kemampuan memilih nilai-nilai sosial-budaya dan kelembagaan sosial yang mampu mendukung secara terus menerus proses kehidupan yang semakin baik dan berkelanjutan. Hal ini dapat berarti memilih nilai sosial-budaya dan lembaga-lembaga lokal yang sudah ada kemudian diperbaharui, dipelihara dan dikembangkan secara terus menerus dan mandiri oleh warga masyarakat atas kekuatan yang dimiliki. Di dalam kemandirian suatu satuan masyarakat mampu memilih dan memutuskan apa yang baik bagi dirinya maupun kepentingan pihak lain dan lingkungan lebih luas, mengingat ada keterkaitan kepentingan bersama. Menumbuhkan potensi kemandirian masyarakat Solo Raya berarti mendorong proses belajar bersama antara *stakeholders* yang terlibat didalamnya untuk melakukan tpemetaan terhadap masalah yang dihadapi, mengenali potensi atau sumber-sumber yang dimiliki dan bagaimana mencari peluang-peluang untuk mengatasi permasalahan, termasuk persoalan radikalisme agama.

Menurut Sofyan (2019), ada tiga bentuk pensikapan terhadap kelompok radikalisme agama ketika berada di masyarakat, yaitu reintegrasi sosial, deradikalisasi, dan demoralisasi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kasat Intel Sukoharjo:

> … Ketika ada ancaman ada peristiwa radikalisme agama, upaya kepolisian untuk menggandeng tokoh-tokoh agama untuk menggelorakan tentang perdamaian, kebersamaan, kerukunan, sikap saling menghargai, dan kebhinekaan di tengah masyarakat. Ketika ada orang-orang yang perlu diwaspadai dan dicurigai kita perlu diasah kepekaan masyarakat sekitar…. Yang ada di sini memberikan pengertian kepada perangkat negara ketika ada orang-orang yang perlu diwaspadai tolong disampaikan kepada kami kepolisian terdekat. Karena rata-rata masyarakat apatis, jadi banyaknya kecolongan karena masyarakat apatis, tidak pernah menginformasikan kepada aparat atau kepada kepolisian… (AKBP Sukimin, 4 Juli 2019).

Fenomena ini menegaskan bahwa Solo Raya adalah daerah perhelatan Islam radikal yang di dalamnya terdapat jaringan terorisme lokal, nasional maupun trans-nasional. Dalam konteks Surakarta menguatnya gerakan radikalisme terorisme menyiratkan tiga pesan penting: *pertama*, gerakan tersebut menjadi ancaram serius bagi Islam yang damai, terbuka dan toleran yang selama ini menjadi *trademark* Islam dengan paham Aswaja dan berada pada area pedesaan yang bersifat tradisional seperti NU. *Kedua,* gerakan tersebut merupakan ancaman bagi NKRI yang berideologi Pancasila. *Ketiga*, gerakan tersebut menjadi ancaman serius bagi kehadiran perempuan di ruang publik.

Karena itu, *community resilience* baik yang berupa penguatan *civil society* maupun ketahanan budaya sebagai alternatif untuk meredam arus radikalisme-puritanisme Islam di Solo Raya. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk atau cara dalam memahami Islam agar dapat sesuai dan berkomunikasi dengan proses modernisasi di tengah masyarakat Solo Raya tanpa harus tercerabut dari akar budayanya.

Secara teoritis, model keislaman dengan ketahanan budaya dilakukan untuk penguatan simpul-simpul kecil dari tokoh agama dan masyarakat yang ada di tengah masyarakat Solo Raya. Melalui penguatan *civil society* dan ketahanan budaya masyarakat Solo Raya dimaksudkan untuk meminalisir kekerasan yang mengatasnamakan agama dan Tuhan ini yang menjadi sumber ketidakadilakan serta ketidakharmonisan masyarakat. Selain itu, sikap tersebut yang menjadi pemisah antar manusia dengan label agama. Pada titik ini, agama menjadi institusi yang hanya berkutat pada persoalan teologis, ideologis, retorik, dan tidak mampu berbuat banyak dalam kehidupan sosial yang sesungguhnya. Agama telah kehilangan fungsi sosialnya sebagai penegak keharmonisan sosial, keadilan, kesetaraan dan akomodasi budaya.

Gerakan perlawanan kultural melalui penguatan *civil socety* dan ketahanan budaya merupakan bentuk respon ketidaksepahamannya terhadap berbagai gerakan fundamentalisme yang cenderung menggunakan kekerasan

serta simbol-simbol budaya yang tidak sesuai dengan *local wisdom* masyarakat Solo Raya. Secara prinsip, tindak kekerasan dengan menggunakan label agama adalah bentuk dan pengingkaran terhadap agama itu sendiri, karena dapat mereduksi dan merusak nilai-nilai universal yang dikandung agama. Dalam konsep *community resilience* dengan penguatan *civil society* dan ketahanan budaya secara prinsip mengedepankan *al-Islâm shâlih li kulli zamân wa makân* maka Islam bisa terus berkembang selama ia bersifat akomodatif dan menggandeng budaya lokal dimana ia hadir.

Sinergitas antara Islam dan budaya lokal diyakini akan melahirkan Islam Indonesia bisa lebih kaya karena sarat dengan nilai-nilai luhur budaya lokal yang penuh kearifan, santun dan toleran, seperti yang selama ini menjadi pandangan dunia (*worldview*) masyarakat Solo Raya. Dengan Islam yang ramah sebagai *counter concept* dari Islam radikal adalah bentuk deradikalisasi wacana yang bisa mendorong tampilnya Islam sebagai agama yang humanis dan universal serta mampu mengakomodir nilai atau kekuatan budaya lokal. Selain itu, melalui ketahanan budaya dipahami sebagai upaya membumikan nilai-nilai keislaman yang mengedepankan pendekatan budaya diharapan memiliki "daya hidup" di tengah masyarakat Solo Raya.

***

Pencegahan Radikalisme Berbasis *Social Cohesion*

Solo Raya merupakan ranah kontestasi gerakan Islam radikal yang di dalamnya terdapat jaringan terorisme lokal, nasional maupun transnasional. Laju gerakan dan perkembangan jaringan Islam radikal di wilayah Solo Raya tidak bisa dilepaskan dari tumbuhnya banyak laskar, lembaga pendidikan, dan pesantren yang bercorak salafi-haraki yang tersebar di wilayah ini (Aijudin 2008). Realitas tersebut semakin mengukuhkan stigma negatif bahwa Solo Raya sebagai tempat yang melahirkan berbagai bentuk gerakan radikal keagamaan.

Jaringan Islam radikal di Surakarta terbentuk dari kantong-kantong laskar, lembaga pendidikan, dan pesantren dengan corak salafi-haraki yang saling terhubung dari beberapa wilayah sekitar sebagai penyangganya, yaitu Klaten, Karanganyar, Sukoharjo, Boyolali, Sragen, dan Wonogiri. Hasil penelitian Aijudin (2008) menegaskan bahwa setiap lembaga memiliki fungsi dan peran yang berbeda. Keberadaan beberapa pesantren menjadi pusat koordinat, masjid menjadi sub-ordinat berfungsi sebagai satelit pengkaderan di daerah daerah melalui kegiatan halaqoh, pengajian, dan kajian. Sebagai wilayah penyangga Surakarta, kelima kabupaten tersebut

merupakan daerah yang banyak terpengaruh oleh perubahan sosial-keagamaan di Surakarta dan mengakibatkan munculnya beragam kajian keislaman, paham, gerakan dan berbagai ideologi keagamaan.

Kehadiran radikalimse agama di tengah pluralitas masyarakat telah menjadi faktor pemicu terjadinya perpecahan (disintegrasi) masyarakat. Secara sosial, pelaku radikal cenderung bersifat asosial, tidak mau membaur, dan menutup diri dari dunia luar. Hal ini yang mendorong kehadiran radikalisme agama di ruang publik Solo Raya menjadi faktor pendorong terbentuknya kohesi sosial (*social cohesion*) dengan mengedepankan dua hal yaitu: radikalisme sebagai musuh bersama (*common enemy*) bagi semua lapisan masyarakat; dan menciptkan misi bersama melalui penyamaan persepsi tentang keberadaan agama mengajarkan cinta kasih, kemanusiaan, dan perdamaian sebagai bentuk penguat ikatan sosial.

***

Musuh Bersama *(Common Enemy)*

Radikalisme agama telah mengakibatkan terjadinya disintegrasi sosial dalam bentuk terkotak-kotaknya masyarakat secara demarkatis atas nama agama yang mengedepankan terminologi Islam vs non-Islam, Mukmin vs Kafir, Surga vs Neraka, dan Lurus vs Sesat. Istilah tersebut sering digunakan oleh kelompok Islam radikal di Solo Raya baik dalam level gerakan, kehidupan pesantren, masjid, dan lembaga pendidikan yang dimiliki. Adanya jaringan dengan corak salafi-haraki yang ada di wilayah Surakarta dan sekitarnya tersebut yang kemudian memunculkan stigma baru bahwa lembaga pendidikan Islam sebagai tempat pengecambahan (*breeding ground*) radikalisme. Wacana tersebut terkait erat dengan jaringan intelektual, kultural, koneksitas, paham keagamaan dan ideologi yang dimilikinya.

Melalui lembaga pesantren, masjid, laskar, dan lembaga pendidikan formal dengan karakter salafi-haraki tersebut, kelompok ini mampu menghasilkan generasi *'ulam*â` *'âmil*în yang siap berdakwah dan *jih*â*d fî sab*îlillah untuk menegakkan syariat Islam secara *kâffah* (Mu'in,

dkk 2007: vii). Implementasi di lapangan dari konsep *jihâd fî sabîlillah* dan Islam *kâffah* tersebut terlihat dari munculnya pelabelan bahwa Solo Raya merupakan "area sumbu pendek," wilayah yang mudah tersulut konflik. Solo juga dikenal sebagai area kaderisasi terorisme, dimana berbagai organisasi jihadis yang ada banyak melahirkan aktivis Islam radikal, bahkan terorisme. Stigmatisasi ini memiliki argumentasi bahwa dari kenyataan banyaknya gerakan yang ada di berbagai daerah, jaringan dan individu berasal dari wilayah ini terlibat dalam berbagai kasus radikalisme-terorisme. Secara spesifik Purwadidada (2014, 158) menyebut Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki memiliki hubungan dengan kelompok radikal terorisme baik yang memiliki status alumni, pengajar dan pengurus pesantren atau berdomisili di sekitar pondok.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sampai 2019, peristiwa yang berujung pada konflik, kekerasan, dan kasus terorisme memiliki angka yang cukup tinggi di wilayah Solo Raya. Berawal dari kejadian tahun 2009 saat Noordin M. Top, tokoh teroris yang menjadi DPO saat itu tewas di Solo bersama dengan pengikutnya yaitu; Bagus Budi Pranoto alias Urwah, Adit Susilo alias Hadi, Aryo Sudarso alias Aji yang ketiganya merupakan warga Solo. Sembilan bulan setelah peristiwa tersebut pada Mei 2010 warga Solo dikejutkan dengan ditangkapnya 5 orang warga Solo yang diduga sebagai bagian dari jaringan teroris yang mengadakan pelatihan di Poso dan Jonto Aceh. Setahun setelah peristiwa tersebut, pada akhir

bulan Mei 2011 Densus 88 menembak mati Sigit Qordhowi di Ngruki, Sukoharjo. Sigit diidentifikasikan memiliki hubungan erat dengan jaringan teroris yang melakukan bom bunuh diri (*suicide bomber*) di Masjid Ad-dzikra, Maporesta Cirebon.

Fakta kekerasan dan terorisme terus berlanjut, lima bulan setelah itu, tepatnya bulan September 2011 terjadi bom bunuh diri yang dilakukan oleh anggota teroris jaringan Cirebon di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunthon Banjarsari yang menimbulkan banyak korban luka. Kemudian rentang bulan Juli sampai Agustus pada tahun 2012 kembali terjadi empat kali aksi teror di Kota Solo. Pada 17 Agustus 2012 terjadinya penembakan di pos pengamanan Polisi di Glembegan Solo, yang mengakibatkan korban dua polisi. Teror ini dilanjutkan 18 Agustus 2012 terjadi insiden pelemparan granat di pos penjagaan polisi di Gladag Solo. Selang 14 hari setelah itu terjadi penembakan pada polisi yang bertugas di pos penjagaan Matahari Singosaren Solo pada Kamis 30 Agustus 2012. Kejadian ini menewaskan seorang anggota polisi tersebut dilakukan 2 orang bersepeda motor, dan dengan tenang menembak ke arah polisi yang berjaga.

Pada tahun 2014 publik Solo dikagetkan dengan dideklarasikannya *Islamic State Iraq and Suriah* (ISIS) Solo, yang diprakarsai oleh para simpatisan ISIS yang tinggal di Solo. Deklarasi ini kemudian mengundang berbagai kalangan yang memiliki persamaan ideologi bergabung dengan ISIS. Jaringan

ini secara perlahan namun pasti bergerak, masuk diberbagai majalis mengajian, organisasi, dan kelompok-kelompok masyarakat. Ideologi yang mereka kembangkan adalah pandangan bahwa negara ini merupakan negara kafir dengan penguasa *thogut*, maka diperbolehkan mengambil tindakan teror untuk pemerintah seperti ini.

Kasus bom bunuh diri oleh Nurrahman, seorang pemuda pengikut ISIS di Solo dengan mengendarai motor dengan menabrakkan diri di Maporesta Surakarta merupakan contoh dari implementasi ideologi ISIS di atas. Kejadian bom bunuh diri ini kemudian pada bulan Desember 2016 disusul kasus bom Bekasi, istilah yang digunakan publik untuk menyebut rencana anggota ISIS yang akan melakukan bom bunuh diri di Istana Presiden. Jaringan pelaku bom Bekasi ini berada di Solo Raya. Peristiwa diawal tahun 2019 terjadi di Kartasura berupa upaya bom bunuh diri di dekat pos penjagaan polisi menjelang hari raya Idul Fitri.

Berbagai peristiwa tersebut menunjukan bahwa kota Solo dan sekitarnya merupakan persemaian berbagai gerakan Islam yang memiliki watak keras, radikal dan sikap keberagamaan intoleran. Hal ini setidaknya dicirikan, pertama, sikap tidak toleran, tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Kedua, sikap fanatik, yaitu selalu merasa benar sendiri serta menganggap orang lain salah. Ketiga, sikap eksklusif, yaitu membedakan diri dari kebiasaan masyarakat

kebanyakan. Keempat, sikap revolusioner, yaitu cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan fenomena di atas, radikalisme agama telah membuat ”sekat” dan merusak nilai-nilai utama dalam agama itu sendiri, yakni kemanusiaan dan cinta yang berimplikasi di tengah kehidupan masyarakat Solo Raya yang plural. Tidak memandang apa agamanya, suku, ras, bahasa, keyakinan, maupun tradisinya, bahwa radikalisme agama menjadi musuh bersama yang harus dihapuskan di tengah masyarakat Solo Raya. Kebersamaan tanpa melihat latar belakang ini yang menjadikan radikalisme sebagai faktor integrasi sosial yang menyatukan dua atau lebih unsur sosial menjadi satu kesatuan utuh yang dapat diterima dengan baik. Melalui radikalisme agama bisa memicu adanya integrasi sosial yang bertujuan untuk melakukan pengendalian terhapad konflik dan penyimpangan sosial serta untuk menyatukan unsur unsur sosial yang berbeda dalam masyarakat. Integrasi sosial atau kohesi sosial penting untuk menjaga masyarakat agar siap menghadapi tantangan baik berupa tantangan fisik atau mental yang terjadi dalam kehidupan sosial termasuk radikalisme agama bahkan terorisme.

> ... Secara umum, penyebab radikalisme ada beberapa: pertama, mengalirnya ideologi transnasional dari Timur Tengah; kedua adalah media sosial, yang radikal itu besar. Pemuda memperoleh radikalisme

dari media sosial. Ketiga, pembinaan agama kita yang sempit, sehingga esensi agama tidak muncul, yang ada hanya baju luarnya saja. Keempat pendidikan yang tidak utuh, sehingga orang sudah puas, padahal tujuan dari pendidikan tidak itu. Ini yang perlu dibenahi di Indonesia ... (Kristen, FGD Solo).

***

Teologi Kemanusiaan

Faktor kohesi sosial yang kedua adalah memperkuat teologi perdamaian antar agama yang ada di masyarakat. Semua agama mengajarkan cinta kasih, kemanusiaan, dan perdamaian. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk penguatan *civil society* dan ketahanan budaya menempatkan Islam sebagai instrumen pemberdayaan dengan jalan menciptakan ruang publik (*public sphere*) seperti pengajian, majelis taklim, dan majelis dzikir serta shalawat. Hal ini sejalan dengan pandangan Baso, pemberdayaan *civil society*, Islam dipahami sebagai agama publik (*public religion*), mengingat konteks publik dari agama bukan lagi negara atau masyarakat, tetapi dalam masyarakat sipil (Baso, 2016: 107).

Agama dalam penguatan *civil society* dengan pendekatan transformasi sosial politik adalah memberikan penekanan pemberdayaan terhadap masyarakat bawah, yang dilakukan dengan jalan menjaga jarak dengan negara meski tidak menolak keberadaan negara (Mibtadin, 2017: 291). Ke depan, kekuasaan negara yang besar dapat diimbangi oleh kekuatan kemandirian masyarakat dengan menempatkan Islam sebagai etika sosial (*social ethics*) bagi masyarakat Solo Raya.

Pemberdayaan *civil society* sebagai wujud teologi kemanusiaan didasarkan pada visi transformasi sosial (*social*

transformation), pembaharuan budaya, dan penyadaran hak-hak bermasyarakat dalam kehidupan bernegara. Hal ini mengarah pada struktur sosial yang adil, menuntut masyarakat untuk selalu dinamis, mengembangkan kepemimpinan populis, dan memberikan peluang munculnya pemimpin dari bawah. Melalui pemberdayaan *civil society* diharapkan adanya kemandirian dalam masyarakat—terutama Solo Raya—di mana hak asasi manusia (HAM) dijunjung tinggi, kebersamaan (*sense of oneness*), dan sikap saling menghormati yang difungsikan untuk melakukan kerja-kerja kebangsaan yang menempatkan Islam sebagai etika sosial.

Masyarakat Solo Raya meyakini bahwa semua agama mengajarkan cinta kasih, kemanusiaan, dan perdamaian, maka ada dua hal dalam menempatkan Islam sebagai etika sosial. *Pertama*, Islam sebagai sumber dan visi moralitas. Sejauh ini, Islam sebagai sumber kekolotan dan konflik serta hanya penjaga moralitas manusia semata, dan jika fungsi agama hanya pada aspek ini, maka mematikan inisiatif dan kreativitas umat Islam itu sendiri. Pada titik ini, menginginkan Islam menjadi agama yang lebih dinamis (*dinamic religion*) dan mampu berperan dalam pergulatan kehidupan umat manusia (J. Sudarminta, 1991: 92). *Kedua*, Islam sebagai pemberi rasa damai, mempunyai fungsi yang penting dalam menunjang proses peradaban manusia. Rasa damai muncul dari keyakinan bahwa Tuhan merupakan ukuran keselarasan dunia, dimana kebenaran agama bersifat eksplisit berkaitan dengan nilai-

nilai. Dengan pendekatan ini, agama akan mendorong umatnya untuk saling terbuka dan saling belajar satu dengan yang lain, sehingga Islam bisa menjadi agama yang bermakna bagi kehidupan bersama (Mibtadin, 2017: 237).

Penanaman nilai perdamaian dan kemanusiaan perlu dilakukan oleh seluruh warga bangsa dan dimulai komunitas bangsa paling dasar, yaitu keluarga. Pola asuh dan pendidikan anak menjadi langkah awal untuk menciptakan sebuah masyarakat yang sesuai dengan cita-cita agama. Pengakuan pentingnya peran keluarga ini dinyatakan oleh Prapti pegiat organisasi PKK Surakarta:

> … Dengan adanya pola asuh anak di dalam keluarga dengan cinta dan kasih sayang, keluarga ini sudah dapat menuju pada masalah kerukunan, membahas permasalahan-permasalahan yang sampai nasional maupun internasional bisa kita bahas dalam kumpul keluarga, kita berbicara lingkup kecilnya di dalam keluarga… (Focus Group Discussion Solo, 4 Juli 2019).

Islam sebagai etika sosial, maka ia akan menjadi semangat (*al-ruh*) dalam melakukan transformasi sosial keagamaan dengan menempatkan nilai-nilai lokal sebagai landasan membangun masyarakat yang damai, toleran, beradab dan menghargai perbedaan yang ada. Selanjutnya Prapti mengatakan bahwa nilai-nilai yang termaktub dalam

Pancasila sudah mengajarkan adanya aspek ketuhanan, gotong royong, musyawarah, persatuan, toleransi yang dapat dijadikan modal untuk membangun masyarakat yang damai.

Modal sosial ini akan mampu memberi kontribusi penting dalam proses pembentukan karakter bangsa dan negara. Perlu ada political will dari pemerintah sebagai fasilitator terwujudkan nilai-nilai local di masyarakat dalam upaya mencegak berkembangnya radikalisme. Hal tersebut diungkapkan Al Munawar, Wakil Ketua PCNU Surakarta:

> … Harus ada kebijakan lokal. Lebih-lebih di Solo ini, coba dikembalikan lagi karakter orang Solo, seperti sopan santun, dan budi pekerti, itu sangat penting utuk diajarkan Kehadiran pemerintah sangat diperlukan. Pemerintah sudah sangat ketinggalan untuk mengurusi radikalisme. Ini bisa dimulai dari anak didik yang paling kecil, jangankan SD, TK saja sudah banyak yang mengarah ke sana, bahkan *play group* sudah diarahkan ke sana, sudah diarahkan bagaimana Indonesia sudah tidak Pancasila. Kalau sudah dari awal seperti ini susah, sehingga kehadiran pendidikan di sini sangat penting sekali dalam tahap pencegahannya…. Munawar, 2019).

Pengembangan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan yang ramah yang pada dasarnya untuk memberikan modal sosial (*social capital*) pada ibu-ibu jamaah pengajian dan

masyarakat secara umum agar bisa menghargai perbedaan yang ada. Dalam melakukan proses banyak mengalami persinggungan dengan beragam masyarakat, sikap, karakter, dan kepentingan. Realitas masyarakat multikultural seperti Solo Raya mendorong masyarakat untuk bisa hidup saling menghargai dan berdampingan secara damai. Keragaman budaya dan khazanah dengan berbagai aspeknya dijadikan sebagai kekuatan sosial yang memiliki potensi positif dalam pengembangan nilai-nilai pluralisme kebangsaaan sebagaimana disampaikan tokoh Ahmadiyah:

> … Menanamkan ide 4 pilar, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 45, ini sangat penting bagi kita. Ini sebenarnya tergantung dari kita, sebagai tokoh masyarakat agar bisa mendidik anak-anak kita, untuk bisa memahami dengan benar tentang Islam, sebagai *rahmatan lil alamin*… Kami di Ahmadiyah ada semboyan. *Love For All Hatred For None*, artinya kecintaan semua tidak boleh benci pada siapapun. Ini adalah langkah untuk menangkal radikalisme. Kita paham bahwa Rasulullah sebagai *rahmatan lil alamin*. Rahmat itu artinya kasih sayang. Artinya kita harus bisa menanamkan kasih sayang satu dengan yang lain. Tidak memandang keyakinan, ras, suku dan lain sebagainya. Jadi ini adalah langkah-langkah yang perlu ditanamkan dalam masyarakat dalam menangkal radikalisme... (Supriyanto, 4 Juli 2019).

Berdasarkan pada harapan dan pemetaan tersebut, tampilan Islam moderat perlu dilakukan dengan memperhatikan kondisi objektif masyarakatnya yang majemuk, baik kultur, agama dan etnis; tanpa mengorbankan ajaran-ajaran dasar Islam. Masyarakat Solo Raya pada prinsipnya memiliki pemahaman yang moderat, tidak secara eksklusif dan ekstrem, baik ekstrem konservatif maupun ekstrem liberal. Dari pola pemahaman ini, Islam ditampilkan sebagai agama yang mengedepankan nilai persaudaraan, baik *al-ukhuwwah dîniyyah, wathaniyyah, insâniyyah,* perdamaian (*salâm*), tolong-menolong (*ta'âwun*), toleransi (*tasâmuh*) dalam hubungan antar sesamanya. Dengan Islam moderat akan membentuk karakter dan identitas bangsa yang santun, terbuka, dan saling menghormati sesama, serta menghindarkan dari pemahaman keagamaan yang eksklusif, intoleran, dan radikal yang berbahaya karena bisa memecah kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

***

BAB 5

EPILOG

Terpaan beberapa peristiwa kekerasan yang berujung pada tindakan teror yang berakar dari paham radikal di wilayah Solo Raya telah menimbulkan berbagai macam respon dan melahirkan adanya kesadaran bersama masyarakat untuk melakukan tindakan nyata dengan membangun sebuah ketahanan komunitas (*community resiliency*) dan kohesivitas sosial (*social cohesion*). Melalui teknik diskusi grup terfokus (*focus group discussion*) di empat kabupaten/ kota yang melibatkan 56 orang dari berbagai latar belakang dan profesi, penelitian ini menjawab pertanyaaan penelitian dengan menghasilkan beberapa temuan lapangan mengenai bentuk ketahanan dan kohesifitas sosial yang dimiliki dan dibangun oleh masyarakat Solo Raya.

Ketahanan masyarakat Solo Raya tercermin dari cara pandang kritis masyarakat terhadap beberapa peristiwa kekerasan dan teror yang terjadi di Surakarta, Sukoharjo, Karanganyar dan Sragen. Mereka berpendapat bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan nilai dan ajaran agama yang mereka yakini, dimana agama selalu mengajarkan perdamaian, tidak merusak, menghargai perbedaan dan menebarkan cinta kasih kepada sesama tanpa memandang latar belakang sosial, agama, dan keyakinan. Selanjutnya, masyarakat merasa yakin dan penuh percaya diri bahwa mereka mampu untuk

menghadapinya dengan kekuatan yang dimiliki dengan saling berkomunikasi dan kordinasi serta saling menguatkan diantara kelompok dan organisasi yang ada.

Aspek lain yang menjadi temuan dalam penelitian ini adalah terjalinnya kemitraan politik yang harmonis antara organisasi sosial kemasyarakatan, pemuda, wanita, dan keagamaan dengan pemerintah daerah, pihak aparat kepolisian dan TNI. Kemitraan tersebut diwujudkan dalam bentuk komunikasi dan kordinasi secara rutin dan insidental serta penyelenggaraan kegiatan bersama. Masyarakat melakukan tindakan nyata dalam melakukan pencegahan radikal terorisme melalui kegiatan pengajian, seminar, dan dialog lintas golongan dan agama. Kreativitas masyarakat juga dibangun melalui berbagai kegiatan kesenian seperti pentas wayang, kesenian hadrah, dan pameran lukisan sebagai gerakan kultural membendung paham radikal.

Penguatan peran *civil society* sebagai *counter* terhadap gerakan dan wacana radikalisme agama, yang dilakukan oleh masyarakat Solo Raya merupakan kompetensi komunitas yang sudah diberdayakan dalam rangka mempersatukan simpul-simpul kekuatan untuk mengampanyekan konsep Islam *rahmatan li al-'âlamîn*, sebagai agama yang ramah dan damai.

Community resilience masyarakat Solo Raya dalam rangka mencegah radikalisme terwujud melalui 4 (empat) bentuk yaitu kesadaran pluralitas (*plurality awareness*), terbangunnya dialog

lintas iman melalui Forum Lintas Agama (*interreligious forum*), terbentuknya komunikasi budaya (*cultural communication*), dan menguatnya jaringan kelembagaan (*institutional network*).

Sebagai kota budaya, Surakarta dan sekitarnya memiliki banyak kegiatan budaya yang dimanfaatkan untuk membangun kesadaran pluralisme dan keindonesiaan, menanamkan pemahaman bahwa radikalisme merupakan paham yang tidak cocok dengan keyakinan masyarakat bahwa setiap agama mengajarkan kasih sayang dan cinta kasih sejak lingkup sosial terkecil yaitu keluarga. Pengembangan nilai-nilai agama dan kebangsaan yang ramah sebagai *social capital* untuk membentuk karakter dan identitas bangsa yang santun, terbuka dan saling menghormati sesama serta menghindarkan dari pemahaman keagamaan yang eksklusif, intoleran dan radikal.

Temuan ini memperkuat teori *community resilence* yang disampaikan oleh Norris (2008) yang mengatakan bahwa ketahanan masyarakat merupakan sebuah proses adaptasi terhadap datangnya bahaya atau bencana yang dilakukan melalui jaringan sumberdaya, salah satunya adalah kompetensi komunitas yang meliputi aksi nyata komunitas, ketrampilan kritis dalam pemecahan masalah, fleksibilitas dan kreativitas, kepercayaan diri dan kemitraan politik.

Temuan selanjutnya dari studi ini adalah bahwa kohesivitas sosial masyarakat Solo Raya yang didasarkan pada

dimensi kepercayaan akan nilai–nilai universalitas sudah terkristalisasi ke dalam sebuah kesatuan visi bersama yang tercermin dalam 2 aspek, yaitu: *Pertama*, masyarakat Solo Raya menganggap bahwa radikalisme merupakan musuh bersama (*common enemy*) karena telah mengakibatkan porak porandanya tatanan sosial dan persaudaraan serta kekerabatan, serta pudarnya toleransi dalam kehidupan sosial. *Kedua*, teologi kemanusiaan dan perdamaian yang telah dimiliki oleh individu menjadi perekat sosial yang bisa menyatukan gerak langkah masyarakat Solo Raya dalam membendung lajunya penetrasi aliran radikal. Masyarakat meyakini bahwa semua agama mengajarkan hidup damai, toleran dan menebarkan kasih sayang.

Penelitian ini mengonfirmasi teori *social cohesion* ditulis oleh Jenson (1988) dimana masyarakat memiliki dan melakukan aktifitas afiliasi dalam rangka untuk berbagi nilai-nilai universal dengan mengedepankan kesamaan perasaan. Selanjutnya, masyarakat Solo Raya secara komunal menerima akan nilai pluralitas dan eksistensi perbedaan yang dipandang sebagai sebuah fakta sosial, oleh karena itu diperlukan adanya tolerasi dalam kehidupan sosial dan beragama.

***

Daftar Pustaka

Acket, Sylvain, et,al,, 2011, *Measuring and validating social cohesion: a bottom-up approach,* Luxembourg: CEPS Instead Working Press.

Aijudin, Anas, 2008, *Laporan Penelitian Transformasi Sosial Gerakan Keagamaan di Surakarta*, Puslitbang Kemenag; Semarang.

Ainsworth, M. D. S., 1978. *Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation*. Lawrence Erlbaum.

Asrori, M. dan Ali, M., 2015, *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik.* Jakarta: Bumi Kasara.

Azra, Azyumardi, 1993, 1993. Esai-esai lntelektual Muslim dan Pendidikan Islam, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Bandura, A., 1977, 'Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change'. *Psychological Review*. 84(2). 191-215.

Baso, Ahmad. 2015. *Agama NU Untuk NKRI*, Jakarta; Pustaka Afid.

Biro Pusat Statistik, 2018, *Karanganyar dalam Angka Tahun 2018,* dalam https://karanganyarkab.bps.go.id/ diakses tanggal 15 Juli 2019.

Biro Pusat Statistik, 2018, *Sragen dalam Angka Tahun 2018,* dalam https://sragenkab.bps.go.id diakses tanggal 15 Juli 2019.

Biro Pusat Statistik, 2018, *Sragen dalam Angka Tahun 2018,* dalam https://surakartakota.bps.go.id diakses tanggal 15 Juli 2019.

Biro Pusat Statistik, 2018, *Sragen dalam Angka Tahun 2018,* dalam https://sukaharjokab.bps.go.id diakses tanggal 15 Juli 2019.

Bowlby, J.,1982. *Attachment and loss*: Vol. 1, Attachment (2nd ed.). New York: Basic Books.

Creswell, John W. 2013, *Researcrh Design : Qualitative, Quantitatif, & Mixed Methods Approaches*, London : Sage Publications.

Faqih, Mansour, 2008, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Insist Press.

Gunderson, Lance H. Craig Reece Allen, C. S. Holling, 2012, *Foundations of Ecological Resilience*. Washington, D.C.: Island Press.

Hasanah, Nur, 2018, Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Terorisme pada Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2014-2019, *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, Vo,6, Nomor 3, 2018: 881-892.

Ellis, B Heidi & Saida Abdi, 2017, 'Building Community Resilience to Violent Extremism Through Genuine Partnerships', *American Psychologist*, Vol, 72, No, 3, 289–300, American Psychological Association.

Idris, Irfan, 2017, *Deradikalisasi; Kebijakan, Strategidan Program Penanggulangan Terorisme*, Yogyakarta: Cahaya Insani.

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies,, 2014, *IFRC Framework for Community Resilience*, Genewa: IFRC.

Jafar, Tiara Firdaus, dkk,, 2019, Ketahanan Nasional Menghadapi Ancaman Lone Wolf Terrorism di Jawa Barat, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vo, 25 No,1 April 2019, h,73-9.

Jenson, Jane, 2010, *Defining and Measuring Social Cohesion*, Commonwealth Secretariat and United Nations Research Institute for Social Development: United Kingdom.

Juergensmeyer, Mark, 2001, *Terror in the Mind of God, The Global Rise of Religious Violence* Berkeley & L,A: University of California Press.

Kindt, Michael T, 2006, *Building Population Resilience to Terror Attacks Unlearned Lessons from Military and Civilian Experience*, Counterproliferation Paper No, 36 USAF, Alabama: Air University Maxwell Air Force Base.

Kurniasih, Dwi, 2019, 'Ujaran Kebencian di Ruang Publik: Analisis Pragmatik pada Data Pusat Studi Agama dan Perdamaian (PSAP) Solo Raya' dalam *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 15, No. 01, Juni 2019, p. 49-57

Larsen, Christian Albrekt, 2014, *Social cohesion: Definition, measurement and developments*, Aalborg Universititet.

Masten, A, S,, 2001, 'Ordinary magic: Resilience processes in development', *American Psychologist*, Vol,56, 227–238.

Masten, A, S,,2007, 'Resilience in developing systems: Progress and promise as the fourth waves rises', *Development and Psychopatology*, 19, 921- 930, doi: 10,1017/S0954579407000442.

Mibtadin, 2017. *Gerakan Sosial Masyarakat Sipil. Studi Gerakan Sosial LKiS, Fahmina, dan The Wahid Institute*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. Unpublished dissertation.

Mu'in M,, Abdul, dkk., 2007, *Pendidikan Pesantren dan Potensi Radikalisme*, Jakarta: CV, Prasasti.

Musyafak, Najahan, 2017, 'Bersinergi untuk Deradikalisasi' dalam *Deradikalisasi NKRI; Pesan Damai dari Jawa Tengah,* Semarang; CV Rafi Pratama.

Norris, Fran H.et al., 2008, 'Community Resilience as a Metaphor, Theory, Set of Capacities, and Strategy for Disaster', dalam *American Journal of Community Psychology*, April 2008, DOI: 10.1007/s10464-007-9156-6.

Ong Hok Ham 1998, *Kapok Jadi Non Pribumi, Warga Tionghoa Mencari Keadilan*, Bandung: Zaman.

Pohl, Florian, 2009, *Islamic Education and the Public Sphere*, Germany: Waxmann

Prasetyo, Laurentius Yananto Andi, 2013, 'Peran Tokoh Lintas Agama Dalam Menangkal Gerakan Radikalisme Agama Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Pada Komunitas Tokoh Lintas Agama Di Kota Surakarta, Jawa Tengah)', dalam *Jurnal Ketahanan Nasional*, Nomor XIX (3) Desember 2013, hal. 139-149.

Purwawidada, Fajar, 2014, *Jaringan Baru Teroris Solo,* Jakarta: KPG.

Reivich, K, dan Shatte, A, 2002, *The Resiliency Factor :7 Keys to Finding Your Inner Strength and Overcoming Life's Hurdles*, New York: Three Rivers Press.

Sefriyono dan Mukhibat, 2018, Preventing Religious Radicalism Based on Local Wisdom: Interrelation of Tarekat, Adat, and Local Authority in Padang Pariaman, West Sumatera, Indonesia, *Sosiohumanika: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*, Vol, 11 (1), Mei 2018: 1-18.

Solichun, 2018, *Peran Organisasi Pemuda Dalam Menangkal Radikalisme (Studi pada GP Ansor Kota Surabaya Periode 2017-2021)*, Tesis, 2018: 1-118.

Speckhard, A,, 2005, Civil Society's Response to Mass Terrorism: Building Resilience, In R, Gunaratna (Ed,), *Combating Terrorism: Military and Non Military Strategies*, Singapore: Eastern Universities Press.

Sugiyono, 2014, *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*, Bandung: Alfabeta.

Weine, Stevan, and Osman Ahmed, 2012, "Building Resilience to Violent Extremism Among Somali-Americans in Minneapolis-St, Paul," *Final Report to Human Factors/ Behavioral Sciences Division, Science and Technology Directorate*, U,S, Department of Homeland Security, College Park, MD: START.

Yusup, Yasin, 2016, 'Resiliensi Komunitas di Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi dalam Perspektif Konstruksi Ruang-Waktu', *Disertasi,* Tidak dipublikasikan, Bandung: Institut Teknologi Bandung.

Zhao, Tong, 2010, 'Social Cohesion and Islamic Radicalization: Implications from the Uighur Insurgency', *Journal of Strategic Security*, Number 3 Vol. 3.

LAMPIRAN

DAFTAR PERISTIWA RADIKALISME - TERORISME DI INDONESIA
2000-2019

No.	Hari/ Tanggal	Lokasi kejadian	Jenis senjata	Jumlah korban
1.	1 Agustus 2000	Jakarta Pusat, Depan rumah Duta Besar Filipina, Menteng,	Bom biasa	2 tewas 21 terluka
2.	24 Desember 2000, Bom malam natal	38 gereja di Jakarta, Medan, Pekanbaru, Bandung,Batam, Mojokerto, Mataram, dan Sukabumi	Bom biasa	19 tewas 120 terluka
3.	27 Agustus 2000	Jakarta Selatan, Kompleks Kedutaan Besar Malaysia	Bom biasa	Tidak ada
4.	13 September 2000	Jakarta, Lantai parkir P2 Gedung Bursa Efek	Bom biasa	10 tewas, 90 luka 104 mobil rusak berat, 57 rusak ringan.
5.	24 Desember 2000	Jakarta, Bekasi, Sukabumi, Mataram, Pematangsiantar, Medan, Batam, P ekanbaru	Bom ledak	16 tewas 96 luka
6.	22 Juli 2001	Jakarta Timur, Gereja Santa Anna Duren Sawit Dan Greja Huria Kristen Batak Protestan Kalimalang,	Bom ledak	5 tewas

No.	Hari/ Tanggal	Lokasi kejadian	Jenis senjata	Jumlah korban
7.	1 Agustus 2001/ 23 Septemb 2001	Jakarta Pusat, Plaza Atrium,Senen,	Bom ledakn	6 terluka
8.	12 Oktober 2001	Sulawesi Selatan. Jl. Pengayoman, Makassar,	Bom biasa	3 tewas 18 luka.
9.	6.November 2001	Jakarta, Australian International School (AIS), Pejaten	Bom rakitan	1 tewas, 22 terluka.
10.	1 Januari 2002	Jakarta, Rumah Makan Bulungan	Granat manggis	1 tewas 1 luka
11.	1 Juli 2002	Jakarta Timur, Mal Cijantung	Ledakan	7 tewas 1 terluka
12.	5 Desember 2002,	Makassar, Restoran McDonald›s	Bom rakitan	3 tewas 11 luka
13.	12 Oktober 2002	Bali, Club dan Paddy's Café, Jalan Legian, Kuta,	Bom biasa	202 tewas, 164 WNA 24 negara, 38 WNI 209 luka
14.	Senin, 3 Februari 2003	Lobi Wisma Bhayangkari, Mabes Polri Jakarta	Bom rakitan	Tidak ada
15.	Kamis, 24 April 2003	Jembatan Kali Cideng, belakang kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa	Ledakan	Tidak ada
16.	27 April 2003	Cengkareng, Jakarta Terminal 2F, Bandara Soekarno-Hatta	Bom ledakan	2 luka berat 8 luka sedang

No.	Hari/ Tanggal	Lokasi kejadian	Jenis senjata	Jumlah korban
17.	5 Agustus 2003	di Hotel JW Marriot Jakarta	Bom bunuh diri	11 tewas, 152 luka
18.	31 Desember 2003	Aceh, Pasar malam	Bom biasa	10 tewas
19.	10 Januari 2004	Palopo, Sulawesi	Bom cafe	4 tewas (BBC)
20.	15 Oktober 2004	Cicurung, Sukabumi	Bom Kedubes	ada korban jiwa
21.	12 Desember 2004	Sulawesi Tengah Gereja Immanuel Palu	Ledakan bom	
22.	21 Maret 2005.	Ambon, Batu Merah, Jl. Sultan Hasanuddin Angkutan Kota	Granat	12 luka
23.	28 Mei 2005	Sulawesi Tengah Tentena, Poso,	Ledakan	22 tewas 90 luka
24.	8 Juni 2005	Pamulang Barat, rumah Ahli Dewan Pemutus Kebijakan Majelis Mujahidin Indonesia		Tidak ada
25.	1 Oktober 2005	Kuta, Jimbaran Beach Resort	Bom biasa	22 tewas 102 luka
26.	31 Desember 2005	Pasar di Palu, Sulawesi Tengah	Bom ledakan	8 tewas 45 luka
27.	6 Januari 2006	Poso Kantor Satuan Tugas Pengamanan	Bom biasa	Tidak ada
28	10 Maret 2006	Poso, Pura Parisada Hindu, Desa Toini, Kec. Poso Pesisir	Bom ledakan	1 luka I Nengah Sugiarta,

No.	Hari/ Tanggal	Lokasi kejadian	Jenis senjata	Jumlah korban
29	Rabu 17 Mei 2008	Jawa Barat, Jawa Timur, dan Riau	Bom ledakan	Puluhan tewas
30.	Mei 2008	Jawa Barat, Mako Brimob Depok	Bom ledakan	5 tewas
31.	13 Mei 2008	Wonocolo, Sidoarjo	Bom bunuh diri	3 tewas (ayah, ibu dan anak sulung). 3 anak luka
32.	14 Mei 2008	Mapolrestabes Surabaya	Bom ledakan	4 dari 5 pelaku tewas 4 polisi 6 warga
34.	16 Mei 2008	Polda Riau	Penyerangan	4 tewas tertembak polisi. 2 wartawan luka
35.	17 Juli 2009	Jakarta, Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton	Bom bunuh diri	3 WNA tewas 50 terluka
36.	15 Maret 2010	Kebumen, Markas Polsek Prembun,	Penembakan	1 tewas, Briptu Yona Anton Setiawan
37.	10 April 2010	Purworejo, Jawa Tengah Pos Polisi Kentengrejo	Penembakan	2 tewas Bripka Wagino dan Briptu Iwan Eko Nugroho
38.	15 April 2010	Cirebon, Jawa Barat, Masjid Mapolresta	Bom bunuh diri	1 tewas (pelaku) 25 tewas polisi

No.	Hari/ Tanggal	Lokasi kejadian	Jenis senjata	Jumlah korban
39.	29 September 2010	Kapolres Bekasi	Bom bunuh diri	Tidak ada
40.	6 Desember 2010	Sukoharjo, Gereja Katholik Kristus Raja Jl. Pramuka No 2 Blimbing Gathak	Bom low explosive	Tidak ada
41	30 Desember 2010	Solo Baru, Masjid Baitul Makmur	Bom	Tidak ada
42.	15 Maret 2011	Ciganjur Jakarta Selatan	Bom Buku	Ulil Abshar aktivis JIL Utan Kayu, Gories Mere (BNN), Ahmad Dhani dan Yapto Suryosumarno
43.	25 September 2011	Gereja Bethel Injil Sepenuh Kepunthon Solo, Jawa Tengah.	Bom bunuh diri	1 tewas (pelaku) 22 luka
44.	17 Agustus 2012	Solo, Pasar Kliwon Pos Polisi Pengamanan Lebaran Gemblengan	Penembakan bersenjata	2 polisi luka
45.	19 Agustus 2012	Solo, Bunderan Gladag	Granat	Tidak ada
46.	30 Agustus 2012	Solo, Singosaren	Penembakan bersenjata	1 polisi tewas
47.	31 Agustus 2012	Tipes, Serengan, Solo	Kontak senjata	1 tewas anggota Densus 2 teroris Farhan dan Muhsin

No.	Hari/ Tanggal	Lokasi kejadian	Jenis senjata	Jumlah korban
48.	5 Januari 2013	Nusa Tenggara Barat (NTB) Kabupaten Dompu, Bima,		
49.	10 Maret 2013	Tambora	Perampokan bersenjata	1 tewas 1 luka (pegawai)
50.	2 Mei 2013	Sulawesi Tengah. Poso, Depan Masjid Mapolresta		
51.	3 Juni 2013,	Sulawesi Tengah. Poso, Depan Masjid Mapolresta	Bom Bunuh Diri	1 tewas Pelaku 1 luka
52.	7 Oktober 2014	Kecamatan Poso Pesisir Selatan Desa Dewua,	Ledakan bom	1 luka (polisi)
53.	20 Agustus 2015	Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah	Tembakan	1 tewas (Santoso) 18 Juli 2016.
54.	14 Januari 2016	Jakarta Pusat, Jl. MH Thamrin Menara Cakrawala, Pos Polisi Mall Sarinah	Tembakan dan bom biasa	8 tewas (4 pelaku dan 4 warga sipil) 24 luka
55.	5 Juli 2016	Surakarta, Mapolreta	Ledakan	1 luka (pelaku)
56.	20 Oktober 2016	Cikokol, Tangerang, Provinsi Banten	Penyerangan	3 luka (polisi)
57.	13 Nov 2016	Samarinda, depan Gereja Oikumene,	Ledakan bom	4 luka anak-anak 1 tewas

No.	Hari/ Tanggal	Lokasi kejadian	Jenis senjata	Jumlah korban
58.	Akhir Mei 2017	Jakarta Timur. Kampung Melayu	Bom bunuh diri	16 korban 11 luka 5 tewas (polisi)
59.	Februari 2017	Kota Bandung Taman Pandawa Cicendo	Ledakan bom	Tak ada
60.	8 April 2017	di Taman Pandawa, Cicendo, Bandung	Ledakan bom	1 pelaku tewas
61.	11 April 2017	JawaTengah, Polres Banyumas,	Penembakan	Tidak ada
62.	24 Mei 2017	Jakarta Timur, Terminal Kampung Melayu, polisi yang berjaga di	Bunuh diri	3 polisi tewas
63.	25 Juni 2017	Polda Sumatera Utara	Penyerangan	1 tewas 2 tewas (pelaku)
64.	30 Juni 2017	Jakarta Selatan Masjid Falatehan kawasan Blok M	Penyerangan	2 tewas
65.	12 November 2017	Sumatera Barat Markas Polres Dharmasraya,	pembakaran	2 orang dari pelaku
66.	13 November 2017	Kalimantan Timur Gereja Oikumene HKBP Samarinda,	Ledakan bom	1 tewas, 4 luka-luka
67.	11 Februari 2018	Yogyakarta, Gereja Lidwina, Sleman,	Serangan senjata tajam	3 orang terluka
68.	8 Mei 2018	Jawa Barat. Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok,	Penyerangan	5 tewas (polisi)

No.	Hari/ Tanggal	Lokasi kejadian	Jenis senjata	Jumlah korban
69.	13 Mei 2018	Surabaya, Jawa Timur 3 Gereja Jl. Arjuna Surabaya - Gereja Santa Maria Tak Bercela, - GKI Diponegoro - Gereja Pentakosta	Bom biasa	11 tewas 40 luka 1 keluarga dan 1 dari masyarakat 3 tewas (ayah, ibu dan anak sulung). 3 anak luka
70.	14 Mei 2018	Mapolresta Surabaya	Bom Bunuh Diri	4 tewas dari 5 pelaku
71.	16 Mei 2018	Mapolda Riau	Serangan Teroris	1 polisi tewas ditabrak mobil
72.	14 November 2018	Kalimantan Barat Vihara Budi Dharma, Singkawang		Tidak ada
73. 66.	Senin, 3 Juni 2019	Sukoharjo, Jawa Tengah Pos Pantau Lalu Lintas Tugu Kartasura,	Bom Low Explosive	1 terluka (Pelaku)
74	Sabtu, 17 Agustus 2019	Polsek Wonokromo	Senjata Tajam	2 terluka
75.	Kamis, 10 Oktober 2019	Banten, Alun-Alun Menes, Pandeglang,	Pisau	1 luka tusuk (Jenderal Wiranto) Fuad Syauki (ajudan) dan Kapolsek

Diolah dari berbagai sumber, 2019

Tentang Penulis

Dr. H. Najahan Musyafak, M.A adalah dosen UIN Walisongo Semarang. Menempuh pendidikan S1 di Fakultas Dakwah IAIN (kini UIN) Walisongo pada 1993. Pada 2001 pria kelahiran Magelang, 20 Oktober 1970 ini mendapatkan gelar S2 dari University of South Australia dalam bidang *Communication and Information Studies* pada 2001.

Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah periode 2013-2018 ini menyelesaikan pendidikan S3 di Universitas Gadjah Mada dalam bidang Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan pada 2015. Selain aktif di berbagai organisasi seperti menjadi Wakil Ketua Umum di DPP Asosiasi Prodi Komunikasi dan Penyiaran (ASKOPIS) sejak 2017-2022, salah satu asesor BAN PT ini juga aktif memberikan ceramah ilmiah baik dalam bentuk pengajian, seminar, workshop maupun yang lain. Karya tulisnya antara lain *Islam dan Komunikasi* (Semarang: UIN Walisongo Press, 2015), *Bersinergi untuk Deradikalisasi* (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2017), *Framing Radikalisme di Internet* (Semarang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2017), *Agama dan Ujaran Kebencian* (Semarang: CV Lawwana, 2020), dan puluhan karya ilmiah yang tersebar di berbagai buku, jurnal dan media massa lainnya. Ia bisa dihubungi melalui email: ***najahan_musyafak@walisongo.ac.id***

Lulu Choirun Nisa, M.Pd adalah dosen di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang. Perempuan kelahiran Banjarnegara, 20 Juli 1981 ini menempuh pendidikan S1 Prodi Statistika Jurusan Matematika di UGM pada 1998-2003, lalu melanjutkan S2 Prodi Pendidikan Matematika di PPs UNNES 2006-2008, dan sekarang sedang menyelesaikan program doktoralnya.

Karya tulisnya antara lain *The Lost Process of Mathematical Literacy on Excellent Students at MAN 2 Kudus* (Journal of Physics: Conference Series tahun 2019), *Cognitive Obstacles In Interiorization Of The Riemanns Sum Concept Through Apos Approach* (Journal of Physics: Conference Series tahun 2019), *Kemampuan Berpikir Kritis Siswa pada Materi Barisan dan Deret Berdasarkan Gaya Berpikir* (Jurnal Kreano: Jurnal Matematika Kkreatif-Inovatif tahun 2019), *Interactive Learning Media Using Kvisoft Flipbook Maker for Mathematics Learning* (Journal of Physics: Conference Series tahun 2019), dan puluhan karya tulis yang tersebar di jurnal dan media massa lainnya. Ia dapat dihubungi melalui email: ***lulu.choirunnisa@walisongo.ac.id***

View publication stats

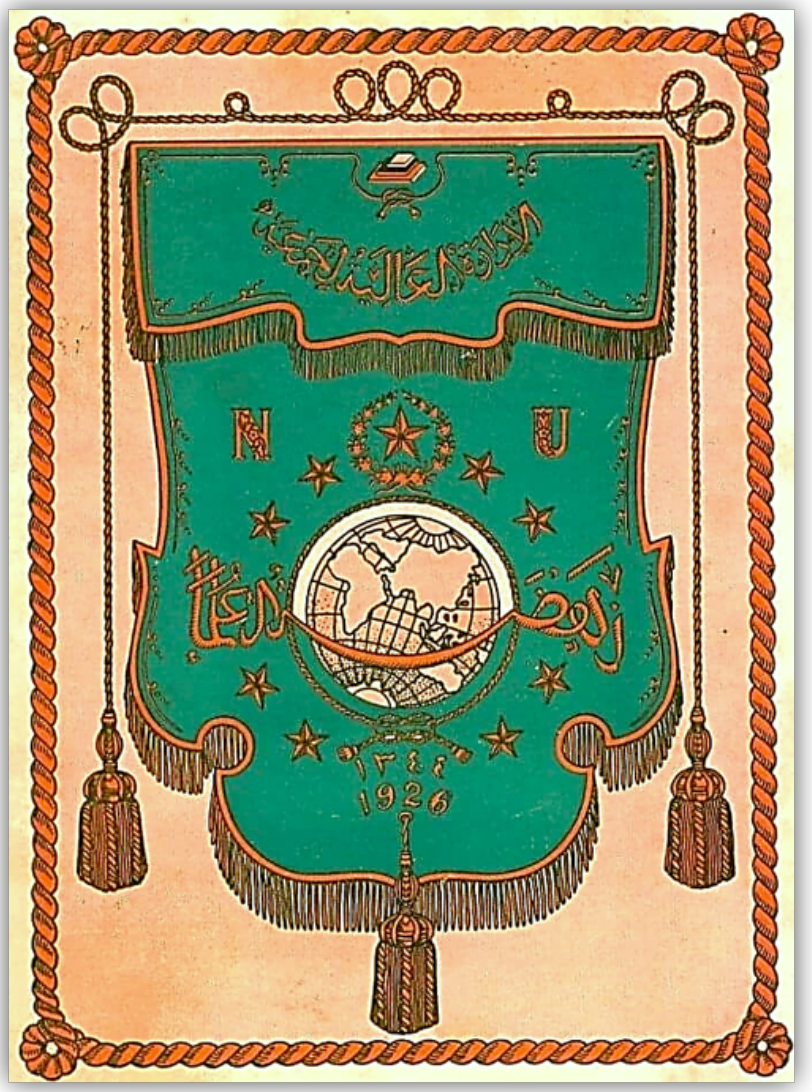
الإدارة العالية للجمعية
N
U
نهضة العلماء
١٣٤٤
1926

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

WALISONGO

SEMARANG – JAWA TENGAH

BHINNEKA TUNGGAL IKA
Lawwana